



Bank Syariah  
**Bangka Belitung**  
Bank Perekonomian Rakyat Syariah

2025

# LAPORAN TAHUNAN

PT. BPRS BANGKA BELITUNG



## KANTOR PUSAT & KPO

Ruko TJ. Tower Blok 21-22, Jl. Kampung Melayu No. 402  
Kel. Bukit Merapin Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang  
Telp : (0717) 9103567



## Daftar Isi

1	Informasi Umum Perseroan
7	Ikhtisar Kinerja Keuangan
9	Laporan Manajemen
25	Laporan Pengawasan DPS

### Informasi Umum Perusahaan

Nama Perseroan	1
Legalitas Perseroan	1
Riwayat Pendirian	1
Visi Perseroan	1
Misi Perseroan	1
Susunan Pengurus	1
Data Pejabat Eksekutif	2
Kepemilikan	2
Moto Perusahaan	2
Penanganan Pembiayaan Bermasalah	3
Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan dan Perubahan Penting Lain	3
Strategi dan Kebijakan Manajemen	4

### Ikhtisar Kinerja Keuangan

Laporan Neraca	7
Laporan Laba Rugi	7
Rasio Keuangan	7
Kualitas Aset Produktif	8

### Laporan Manajemen

Profile Pengurus	9
Struktur Organisasi	14
Bidang Usaha	15
Teknologi Informasi	15
Perkembangan dan Target Pasar	18
Jumlah, Jenis dan Lokasi Kantor	21
Kerjasama dengan Lembaga jasa Keuangan atau Lembaga Lain	22
Pengembangan Sumber Daya Manusia	22

### Laporan Pengawasan DPS

Semester I Tahun 2025	25
Semester II Tahun 2025	27

# Daftar Isi

- 30 **Transparansi Tata Kelola**
- 41 **Laporan Keuangan Tahunan**
- 48 **Surat Pernyataan Direksi**
- 49 **Laporan Auditor Independen**

## Transparansi Tata Kelola

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	30
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	31
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	32
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota DPS	33
Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR Syariah	34
Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS pada Perusahaan Lain	35
Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS dan Pemegang Saham pada BPR Syariah	35
Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR Syariah	35
Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah	35
Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	36
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	36
Rapat Dewan Komisaris	36
Rapat Dewan Pengawas Syariah	37
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	38
Permasalahan Hukum yang dihadapi	38
Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan	38
Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Lain	39

## Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Posisi Keuangan	41
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	42
Laporan Komitmen dan Kontinjensi	43
Laporan Perubahan Ekuitas	44
Laporan Arus Kas	45
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf	46
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	46
Laporan Distribusi Bagi Hasil	47

## Surat Pernyataan Direksi

## Laporan Auditor Independen

Opini dari Akuntan Publik	49
Laporan Akuntan Publik	50



# Informasi Umum Perusahaan

**Nama Perseroan**

**Legalitas Perseroan**

**Riwayat Pendirian**

**Visi Perseroan**

**Misi Perseroan**

**Susunan Pengurus**

**Data Pejabat Eksekutif**

- **Kepemilikan**

- **Moto Perusahaan**

- **Penanganan Pembiayaan Bermasalah**

- **Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan dan**

- **Perubahan Penting Lain**

- **Strategi dan Kebijakan Manajemen**

## 1. Nama Perseroan

PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bangka Belitung

## 2. Legalitas Perseroan

- ❖ Akta Notaris No.09, tanggal 15 Februari 2002 jo Akta Notaris No. 25, tanggal 20 Desember 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- ❖ SK Menteri Kehakiman & HAM No.C-06603.HT.01.04-Th.2002 jo SK Menteri Hukum & HAM No. AHU-008648.AH.01.02 Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung.
- ❖ Tanda Daftar Perusahaan No. 310317000447
- ❖ Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) 01 606 073 3 315 001
- ❖ Nomor Pokok Wajib Zakat ( NPWZ ) B1 000 010 8 304 000

## 3. Riwayat Pendirian

PT. BPRS Bangka Belitung pertama sekali melakukan kegiatan operasional pada tanggal 03 Juni 2002 setelah peresmian pada tanggal 31 Mei 2002 dimana sebelumnya dengan nama PT. BPRS Tijari Baitul Maal yang berkedudukan di Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 9 April 2002 PT. BPRS Tijari Baitul Maal pindah alamat ke Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta berubah nama menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka. Seiring dengan berjalannya waktu, PT. BPRS Bangka telah mengalami perubahan nama menjadi PT. BPRS Bangka Belitung dan kini sejak tanggal 16 Januari 2025 telah berubah lagi menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bangka Belitung sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK dengan kondisi Kantor tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## 4. Visi Perseroan

Menjadi bank daerah dambaan masyarakat negeri serumpun sebalai yang terpercaya, sehat dan menguntungkan.

## 5. Misi Perseroan

- ❖ Menggerakkan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam rangka turut serta berperan menuju masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang maju, mandiri dan sejahtera.
- ❖ Menyebarkan nilai-nilai Dienul Islam dalam bidang ekonomi dan dunia usaha.
- ❖ Meningkatkan kualitas pelayanan diseluruh kantor.
- ❖ Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya insani menuju tenaga kerja yang profesional.
- ❖ Meningkatkan kerjasama dan bersinergi dengan pihak lain.

## 6. Susunan Pengurus

Sesuai dengan Akta No. 03 tanggal 02 Februari 2022 oleh Notaris Fachrizal, S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Selesai Menjabat
1	Chairul Ichwan	Direktur Utama	14-Feb-2025	14-Feb-2030
2	Hendra Dharma	Direktur	14-Dec-2023	14-Dec-2028
3	Sugianto	Komisaris	14-Apr-2023	14-Apr-2028
4	Syaipul Zohri	Ketua Dewan Pengawas Syariah	29-May-2024	29-May-2029
5	Hasyim	Anggota Dewan Pengawas Syariah	29-May-2024	29-May-2029

## 7. Data Pejabat Eksekutif

NO	Nama	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat
1	Ichwan Rizal	Kepala Satuan Kerja Audit Internal	19-Aug-2020
2	Fuad Hasanudin	Kepada Divisi SDI dan Personalia	10-Jan-2023
3	Heny Puspita	Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko	02-May-2024
4	Hermansyah Putra	Kepala Divisi Marketing dan Remedial	03-Oct-2023
5	Latifah Hidayati	Kepala Divisi Operasional	06-Jan-2025
6	Yulianto	Kepala Satuan Kerja IT	20-May-2025
7	Irwan	Pimpinan Cabang	02-Jan-2023
8	Deny Saputra	Pimpinan Cabang	10-Jan-2023
9	Dedi Pratama	Pimpinan Cabang	04-Jan-2022
10	Gusti	Pimpinan Cabang	03-Jan-2024
11	I Wayan Agus Ardiana	Pimpinan Cabang	03-Jan-2024

## 8. Kepemilikan

Pada tahun 2025 tidak ada penurunan maupun penambahan modal dari pemegang saham. Penambahan modal terakhir terjadi pada tahun 2023 melalui notaris Fachrizal.S.H., M.Kn Notaris di Bangka dengan Akte Notaris No. 17 tanggal 14 April 2023, telah dilakukan penambahan Modal Disetor sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sehingga Modal Disetor perusahaan menjadi sebesar Rp.50.287.140.000,- (Lima Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Adapun susunan pemegang saham per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Dalam ribuan Rupiah

Pemegang Saham	Nominal	% Kepemilikan	Keterangan
Pemkot. Pangkalpinang	14,755,000	29.34%	PSP
Pemkab. Bangka Tengah	11,549,910	22.97%	
Pemkab. Bangka	7,750,000	15.41%	
Pemkab. Belitung	7,010,000	13.94%	
Pemkab. Bangka Barat	4,520,000	8.99%	
Pemprov. Kep. Bangka Belitung	3,599,990	7.16%	
Yayasan Kesejahteraan Pensiunan Timah (YKPT)	680,900	1.35%	
Yayasan Peduli Koba	421,340	0.84%	
<b>Total</b>	<b>50,287,140</b>	<b>100,00%</b>	

## 9. Moto Perusahaan

*“Bank Masyarakat Negeri Serumpun Sebalai”*

## 10. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Non Performing Financing (NPF) periode 31 Desember 2025 sebesar 12,90% dengan Baki Debet sebesar Rp. 24.735.704.000,- sedangkan NPF periode 31 Desember 2024 sebesar 16,82% dengan Baki Debet sebesar Rp. 35.346.429.968,- Terdapat penurunan NPF sebesar 3,92% namun masih tinggi dari Standarisasi NPF BPRS yaitu sebesar 7%.

Langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penagihan langsung secara intensif baik lunas secara langsung dan sebagian/bertahap.
- b. Melakukan restrukturisasi bagi nasabah yang masih punya sumber pengembalian yang jelas.
- c. Melakukan Penagihan melalui Pihak ketiga.
- d. Gugatan Sederhana (GS) atau Gugatan Biasa dan Lelang.
- e. Strategi pemenuhan potensi kekurangan PPKA yaitu BPRS akan melakukan penilaian kembali jaminan pembiayaan macet yang diikat APHT oleh Penilai Independen untuk pengembalian PPKA dan pemenuhan kembali PPKA nasabah macet dengan jaminan yang diikat selain APHT.

## 11. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan dan Perubahan Penting Lain

BPRS Bangka Belitung mencatat beberapa perkembangan usaha dan perubahan penting yang berdampak signifikan terhadap arah dan operasional perusahaan.

### a. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Sepanjang tahun 2025, BPRS Bangka Belitung berhasil mencatatkan perbaikan kualitas pembiayaan yang signifikan dengan menurunkan rasio Non Performing Financing (NPF) hingga mencapai 3.92%. Pencapaian ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan manajemen dalam memperkuat proses pengelolaan risiko pembiayaan.

Berbagai langkah strategis yang dilakukan antara lain peningkatan kualitas analisis pembiayaan sejak tahap awal, penguatan fungsi monitoring pembiayaan oleh unit bisnis dan manajemen risiko, serta optimalisasi upaya penagihan dan restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah. Selain itu juga melakukan evaluasi berkala terhadap portofolio pembiayaan guna memastikan kualitas pembiayaan tetap terjaga.

Keberhasilan dalam menurunkan rasio NPF ini memberikan dampak positif terhadap kesehatan Bank, khususnya dalam menjaga stabilitas kualitas aset, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta memperkuat fondasi pertumbuhan pembiayaan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

### b. Penguatan Permodalan melalui Peningkatan KPMM

Pada tahun 2025, BPRS Bangka Belitung juga berhasil meningkatkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sehingga berada pada tingkat yang lebih kuat dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Peningkatan rasio KPMM ini didukung oleh berbagai langkah penguatan permodalan dan pengelolaan aset tertimbang menurut risiko secara lebih optimal. Manajemen secara konsisten melakukan pengendalian terhadap eksposur risiko pembiayaan serta menjaga pertumbuhan aset yang selaras dengan kapasitas permodalan Bank.

Dengan posisi permodalan yang semakin kuat, Bank memiliki ruang yang lebih memadai untuk mendukung ekspansi usaha, meningkatkan ketahanan terhadap risiko, serta memperkuat stabilitas operasional dalam menghadapi dinamika industri perbankan syariah.

### c. Peningkatan Penghimpunan Dana melalui Layanan Kas Keliling

Dalam rangka memperluas akses layanan kepada masyarakat serta meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), BPRS Bangka Belitung mengembangkan layanan

kas keliling sebagai salah satu strategi perluasan jaringan layanan mengganti peran fisik kantor kas yang kurang efisien.

Layanan kas keliling memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap kantor layanan perbankan. Melalui layanan ini, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi perbankan seperti penyetoran tabungan maupun transaksi layanan lainnya secara lebih mudah dan efisien.

Implementasi layanan kas keliling terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pertumbuhan penghimpunan dana Bank selama tahun 2025. Selain memperkuat basis dana murah, layanan ini juga meningkatkan inklusi keuangan syariah serta memperluas jangkauan layanan Bank kepada masyarakat.

d. Penguatan Kebijakan Internal dan Tata Kelola

Sepanjang tahun 2025, BPRS Bangka Belitung juga melakukan berbagai penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur internal guna memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap ketentuan regulator.

Penyempurnaan tersebut antara lain dilakukan melalui pembaruan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank, termasuk pada aspek pembiayaan, manajemen risiko, serta layanan operasional kepada nasabah. Pembaruan kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyesuaian terhadap perkembangan regulasi serta peningkatan kualitas proses bisnis di lingkungan Bank.

Melalui pembaruan kebijakan internal tersebut, Bank diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal, memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian, serta mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

## 12. Strategi dan Kebijakan Manajemen

- 1.) BPRS Bangka Belitung merupakan BPR/BPRS memiliki aset terbesar diwilayah Bangka Belitung dengan jaringan kantor yang tersebar di seluruh Kota / Kabupaten diwilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga posisi BPRS Bangka Belitung sangat kuat dalam persaingan usaha baik dalam penyaluran dana maupun penghimpunan dana, dan dalam operasional sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- 2.) Sepanjang tahun 2025, BPRS Bangka Belitung telah meningkatkan produktifitas pembiayaan dan melakukan efisiensi terkait kegiatan operasional, dengan langkah strategi sebagai berikut:
  - a. Pertumbuhan pembiayaan dengan fokus pada pembiayaan UMKM, pembiayaan pegawai (Negeri dan swasta), dan pembiayaan kepada kontraktor proyek pemerintah maupun swasta.
  - b. Menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau penurunan NPF sebesar 3,92% berbanding tahun 2024.
  - c. Melakukan Write Off terhadap pembiayaan yang pencadangan PPKA sudah full 100%.
- 3.) Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Risiko
  - a. Tata Kelola :
    1. Pada Tahun 2025 BPRS Bangka Belitung telah berusaha memenuhi kelengkapan Jumlah Dewan Komisaris, namun memang belum bisa terealisasikan dikarenakan wajib ada pengembangan kompetensi sesuai dengan ketentuan regulator. Sedangkan untuk Anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang dimiliki BPRS telah terpenuhi, demikian juga halnya dengan Satuan Kerja Kepatuhan & Manajemen Risiko telah ditunjuk dari Pejabat Eksekutif dan Satuan Kerja Audit Internal yang independen dari unit bisnis dan operasional
    2. BPRS juga telah melakukan pengkinian/penyesuaian Struktur Organisasi
    3. Dengan adanya rangkap jabatan Direktur Utama sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, Direktur yang membawahi kepatuhan wajib independen (tidak

menangani penyaluran pembiayaan) telah sesuai dengan aturan tentang Tata kelola BPRS.

4. BPRS akan terus melakukan pengkinian terhadap beberapa prosedur atau kebijakan bank terkait dengan penyesuaian pertumbuhan atau kompleksitas bisnis BPRS dengan mengacu pada perubahan struktur organisasi, penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPRS.

b. Manajemen Risiko :

Berdasarkan modal inti BPRS lebih kecil dari 50 miliar, maka BPRS Bangka Belitung wajib menangani 4 Risiko sebagai berikut :

1. Risiko pembiayaan/kredit

Pengelolaan Risiko Pembiayaan dilakukan melalui pengawasan cermat dari tahap permohonan pembiayaan dari nasabah, proses analisis pembiayaan, hingga proses pemantauan pembiayaan. BPRS Bangka Belitung telah membentuk/pemisahan fungsi unit kerja untuk menangani risiko pembiayaan, yaitu :

- a.) Unit kerja Analis Pembiayaan, untuk melakukan fungsi analisis kelayakan pembiayaan. Unit ini dibawah Divisi Marketing Kantor Pusat.
- b.) Satuan Kerja Manajemen Risiko, yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pelaporan realisasi penyaluran pembiayaan berdasarkan limit portofolio yang telah ditentukan, yaitu mengawasi posisi risiko pembiayaan dan dampak yang ditimbulkan terhadap posisi kecukupan penyediaan modal minimum (CAR).

2. Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional dilakukan dengan strategi:

- a.) Penerapan metode Risk and Control Self Assessment (RCSA) yang aktif melibatkan Kantor Pusat dan Kantor Cabang dalam proses indentifikasi dan pengukuran risiko operasional di unit kerja serta penentuan strategi untuk menetapkan langkah mitigasi risiko yang tepat.
- b.) Pelaporan kerugian dan potensi kerugian di masing-masing unit kerja dengan tujuan membangun Loss Even Database (LED).
- c.) Pelatihan manajemen risiko operasional, program penyegaran (refreshment) dan Risk and Compliance Awareness kepada karyawan.

3. Risiko Likuiditas

Pengelolaan Risiko Likuiditas dilakukan dengan strategi :

- a.) Analisis Arus Kas.
- b.) Pemantauan Maturity Gap antara posisis aktiva dan pasiva.
- c.) Analisis deposito inti.
- d.) Stress Testing.
- e.) Strategi tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi serta menjamin bahwa dana yang ada cukup untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu.

4. Risiko Kepatuhan dengan mengedepankan prinsip T.A.R.P.F yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsif, Profesional dan Fairness.

Pelaksanaan penerapan manajemen resiko yang dijalankan oleh BPRS Bangka Belitung dengan cara menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.

4.) Strategi Penghimpunan Dana

- a. Melakukan Literasi/sosialisasi untuk memperkenalkan produk produk BPRS Bangka Belitung.
- b. Referral nasabah potensial dari nasabah existing.

- c. Melakukan kerjasama dengan sekolah sekolah untuk memaksimalkan Tabungan Simpel.
  - d. Promosi aktif di status Whatsapp dan Media Sosial.
- 5.) Strategi Penyaluran Pembiayaan
- a. Meningkatkan penetrasi pasar secara maksimal dengan melakukan sosialisasi dan kerjasama terhadap instansi terkait baik pemerintah maupun swasta.
  - b. Melakukan promosi dengan gencar dan terukur baik melalui media elektronik diseluruh wilayah kerja BPRS.
  - c. Meningkatkan pelayanan prima dengan proses yang cepat serta tetap mengacu pada prudential banking.
  - d. Meningkatkan kompetensi marketing sehingga lebih memahami dan mempercepat penetrasi pasar terkait dengan produk pembiayaan BPRS Bangka Belitung.
- 6.) Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah BPRS Bangka Belitung
- a. Melakukan penagihan langsung secara intensif.
  - b. Melakukan Write Off terhadap pembiayaan Nasabah yang pencadangan PPKA yang sudah terpenuhi 100%.
  - c. Melakukan restrukturisasi bagi nasabah yang masih punya sumber pengembalian yang jelas,
  - d. Melakukan penagihan melalui pihak ke-3 berdasarkan MOU dengan ke Kejati dan kejarri.
  - e. Gugatan sederhana (GS) dan lelang HT KPKNL.
- 7.) Strategi Penyelesaian Permasalahan Strategis BPRS Bangka Belitung
- Pemenuhan ketentuan-ketentuan/SPO internal BPRS Bangka Belitung dilaksanakan melalui Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai fungsi yang bertugas terhadap pelaksanaannya yaitu :
- a. Secara kontinu melakukan review atas rancangan / penyesuaian terhadap seluruh ketentuan internal BPRS sesuaikan dengan Kebutuhan BPRS dan ketentuan regulator, Peraturan Perundang-undangan serta prinsip syariah.
  - b. Menyusun daftar seluruh ketentuan Internal dan menyediakan kompilasi regulasi dalam bentuk dokumen (Pdf) perusahaan sehingga mudah dipantau terhadap ketentuan-ketentuan BPRS yang sudah diterbitkan ataupun yang belum diterbitkan dan masa pemberlakuan ketentuan tersebut. Serta agar mudah dilakukan penyesuaian/pengkinian dan mudah diakses setiap waktu oleh unit kerja terkait (end user).
  - c. Melakukan pemantauan secara berkala atas ketentuan dan peraturan regulator serta peraturan perundang-undangan yang baru diterbitkan dan memahami setiap peraturan yang diterbitkan tersebut untuk selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan pemenuhan dan pengkinian/penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam kegiatan operasional BPRS.
- 8.) Dalam setiap pelaksanaan pemenuhan dan pengkinian Ketentuan internal, Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko berkoordinasi bersama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan Unit kerja lainnya yang terkait.



Bank Syariah  
**Bangka Belitung**  
Bank Perekonomian Rakyat Syariah

# Ikhtisar Kinerja Keuangan

**Laporan Neraca**

**Laporan Laba Rugi**

**Rasio Keuangan**

**Kualitas Aset Produktif**

## 1. Laporan Neraca

Dalam ribuan Rupiah

POS	2024 (audited)	2025 (audited)	Pertumbuhan	
			Nominal	%
<b>Total Aset</b>	<b>338.407.766</b>	<b>347.405.187</b>	<b>8.997.422</b>	<b>103%</b>
Aset Produktif				
a. Kas dan Bank	103.533.776	123.640.608	20.106.832	119%
b. Pembiayaan yang Diberikan	210.166.212	191.734.569	(18.431.643)	91%
c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(11.198.271)	(2.401.742)	8.796.529	21%
<b>Jumlah Aset Produktif</b>	<b>302.501.717</b>	<b>312.973.435</b>	<b>10.471.718</b>	<b>103%</b>
Dana Pihak Ketiga				
a. Tabungan Wadiah	9.156.475	10.158.162	1.001.686	111%
b. Tabungan Mudharabah	160.460.433	150.606.197	(9.854.236)	94%
c. Deposito Mudharabah	153.440.205	163.331.695	9.891.490	106%
<b>Jumlah Dana Pihak Ketiga</b>	<b>323.057.113</b>	<b>324.096.054</b>	<b>1.038.941</b>	<b>100%</b>
Ekuitas				
a. Modal Disetor	50.287.140	50.287.140	-	100%
b. Tambahan Modal Disetor	70.852	70.852	-	100%
c. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	2.810.667	2.810.667	-	100%
d. Cadangan Umum dan Tujuan	4.697.001	4.697.001	-	100%
e. Laba Rugi Tahun Lalu	(27.068.265)	(41.238.781)	(14.170.516)	152%
f. Laba Rugi Tahun Berjalan	(18.982.992)	2.971.492	21.954.485	116%
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>11.814.402</b>	<b>19.598.371</b>	<b>7.783.969</b>	<b>166%</b>

## 2. Laporan Laba Rugi

Dalam ribuan Rupiah

POS	2024 (audited)	2025 (audited)	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pendapatan				
a. Bagi Hasil dan Margin	37.352.323	41.643.472	4.291.149	111%
b. Operasional Lainnya	6.671.982	15.540.112	8.868.130	233%
c. Non Operasional	169.999	742.332	572.333	437%
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>44.194.304</b>	<b>57.925.916</b>	<b>13.731.612</b>	<b>131%</b>
Beban				
a. Dana Pihak Ketiga	11.367.181	13.235.985	1.868.805	116%
b. Beban Operasional	51.637.387	41.484.688	(10.152.699)	80%
c. Non Operasional	172.729	233.750	61.022	135%
<b>Jumlah Beban</b>	<b>63.177.297</b>	<b>54.954.424</b>	<b>(8.222.873)</b>	<b>87%</b>
<b>Laba Rugi</b>	<b>(18.982.992)</b>	<b>2.971.492</b>	<b>21.954.485</b>	<b>116%</b>

## 3. Rasio Keuangan

NO	Jenis Rasio	2024 (audited)	2025 (audited)	Pertumbuhan
				%
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	4,62%	13,13%	8,51%
2	Rasio Cadangan terhadap Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA)	100,00%	100,00%	0,00%
3	Non Performing Financing (NPF) Neto	11,75%	12,21%	0,46%
4	Non Performing Financing (NPF) Gross	16,82%	12,90%	-3,92%
5	Return on Asset (ROA)	-5,81%	1,20%	7,01%
6	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	143,11%	91,09%	-52,02%
7	Net Imbalan (NI)	8,37%	9,24%	0,87%
8	Financing to Deposit Ratio (FDR)	65,06%	59,08%	-5,98%
9	Cash Ratio	18,19%	13,67%	-4,52%

#### 4. Kualitas Aset Produktif

Dalam ribuan Rupiah

NO	POS	31 Desember 2025					Jumlah
		L	DPK	KL	D	M	
1	Surat Berharga Syariah	-	-	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	-
3	Penempatan pada Bank Syariah Lain	<b>119.962.261</b>	-	-	-	-	<b>119.962.261</b>
4	Piutang	<b>82.986.571</b>	<b>14.865.988</b>	<b>1.434.768</b>	<b>1.258.801</b>	<b>12.365.583</b>	<b>112.911.711</b>
	a. Piutang Murabahah	82.669.359	13.806.128	1.321.642	1.052.908	12.039.701	110.889.737
	b. Piutang Istishna	-	-	-	-	-	-
	c. Piutang Multijasa	50.025	11.097	-	-	-	61.122
	d. Piutang Qardh	-	-	-	-	-	-
	e. Piutang Sewa	267.187	1.048.762	113.126	205.893	325.883	1.960.852
5	Pembiayaan Bagi Hasil	<b>2.068.291</b>	<b>780.302</b>	<b>1.118.782</b>	<b>1.243.644</b>	<b>5.592.455</b>	<b>10.803.473</b>
	a. Mudharabah	-	-	-	-	-	-
	b. Musyarakah	2.068.291	780.302	1.118.782	1.243.644	5.592.455	10.803.473
	c. Lainnya	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Sewa	<b>55.046.721</b>	<b>11.250.994</b>	<b>824.241</b>	<b>661.137</b>	<b>236.292</b>	<b>68.019.384</b>
7	Jumlah Aset Produktif	<b>260.063.844</b>	<b>26.897.283</b>	<b>3.377.792</b>	<b>3.163.582</b>	<b>18.194.330</b>	<b>311.696.830</b>
8	Aset Produktif kepada Pihak Terkait	<b>382.695</b>	-	-	-	-	<b>382.695</b>



Bank Syariah  
**Bangka Belitung**  
Bank Perekonomian Rakyat Syariah

# Laporan Manajemen

**Profile Pengurus**

**Struktur Organisasi**

**Bidang Usaha**

**Teknologi Informasi**

**Perkembangan dan Target Pasar**

**Jumlah, Jenis dan Lokasi Kantor**

**Kerjasama dengan Lembaga jasa Keuangan atau Lembaga Lain**

**Pengembangan Sumber Daya Manusia**



**CHAIRUL ICHWAN**

Direktur Utama

Warga negara Indonesia, lahir di Pangkalpinang.

Usia 43 tahun Per Desember 2025.

Berdomisili di Pangkalpinang.



#### RIWAYAT PELATIHAN

- Kompetensi Direktur BPRS, Lembaga Certif (2022).
- Kompetensi Direktur BPR , Lembaga Certif (2018)
- Menyusun Rencana Bisnis BPR , Z-Pro (2017)
- Analisa Pembiayaan KPR Syariah, Iqtishad Consulting (2017)
- Account Manager - Strategic Partnership, Manulife (2015)
- Muamalat Sales Model, Bank Muamalat (2012)
- MODP Officer Muamalat, Muamalat Institute (2013)
- Fast Service, IAS & Associates (2009)
- Perbankan Syariah, IAS & Associates (2008):



#### RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia Bandung (2007)



#### PENGALAMAN KERJA

- Direktur Utama PT. BPRS Bangka Belitung (2020 - Sekarang)
- Direktur BPR Kapital Mandiri (2018-2020)
- Kasubdiv Remedial & AYDA PT. BPRS Bangka Belitung (2018)
- Kasubdiv Funding & Lending PT. BPRS Bangka Belitung (2017-2018)
- Head Of Financing Pangkalpinang Branch PT. Bank Muamalat Indonesia (2014-2016)
- Sub Branch Manager PT. Bank Muamalat Indonesia (2011-2013)
- RM Funding & Remedial PT. Bank Muamalat Indonesia (2009-2011)
- Account Manager Lending PT. Bank Muamalat Indonesia (2007-2009)



#### DASAR HUKUM PENGANGKATAN PERTAMA

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 14 Februari 2020

#### DASAR HUKUM PENGANGKATAN TERAKHIR

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 20 Desember 2024



#### JABATAN RANGKAP

- Direktur Membawahkan Fungsi Kepatuhan



#### KEPEMILIKAN SAHAM

- Tidak Memiliki Saham Perusahaan



#### PERIODE JABATAN

- Kedua



#### HUBUNGAN AFILIASI

- Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali



**HENDRA DHARMA**

Direktur

Warga negara Indonesia, lahir di Pangkalpinang

Usia 45 tahun Per Desember 2025.

Berdomisili di Pangkalpinang.



#### RIWAYAT PELATIHAN

- Kompetensi Direktur BPRS, Lembaga Certif (2022)
- Aspek Hukum Penanganan Pembiayaan Bermasalah, Jakarta Financial Institute (2017)
- Strategi Pemasaran Produk, Jakarta Financial Institute (2017)
- Analisa Pembiayaan KPR Syariah, Iqtishad Consulting (2017)
- Inhouse Training Komite Pembiayaan, BPRS Bangka Belitung (2015)
- Manajemen Risiko BPR, PERBARINDO (2015)
- Leadership For Manager, LPPI (2014)
- Banking Crime Mitigation, Muamalat Institute (2013)
- Serifikasi Direksi, LPPI (2012)
- Officer BPR Syariah, ASBISINDO (2011)



#### RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi STIE YPKP Bandung (2004)



#### PENGALAMAN KERJA

- Direktur Marketing & Bisnis PT. BPRS Bangka Belitung (2018 - Sekarang)
- Kadiv Marketing Remedial & AYDA (2018)
- Pimpinan Cabang Sungailiat PT. BPRS Bangka Belitung (2018)
- Kepala Kantor Pusat Operasional PT. BPRS Bangka Belitung (2015-2017)
- Pimpinan Cabang Pangkalpinang PT. BPRS Bangka Belitung (2013-2015)
- Pimpinan Cabang Koba PT. BPRS Bangka Belitung (2012-2013)
- Pimpinan Cabang Tanjung Pandan PT. BPRS Bangka Belitung (2009-2012)
- Kabag Marketing Tanjung Pandan PT. BPRS Bangka Belitung (2009)
- Staf Marketing Koba PT. BPRS Bangka Belitung (2006-2009)



#### DASAR HUKUM PENGANGKATAN PERTAMA

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 14 Desember 2018

#### DASAR HUKUM PENGANGKATAN TERAKHIR

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 14 November 2023



#### JABATAN RANGKAP

- Tidak Memiliki Rangkap Jabatan



#### KEPEMILIKAN SAHAM

- Tidak Memiliki Saham Perusahaan



#### PERIODE JABATAN

- Kedua



#### HUBUNGAN AFILIASI

- Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali



**SUGIANTO**

Komisaris

Warga negara Indonesia, lahir di Pangkalpinang.

Usia 61 tahun Per Desember 2025.

Berdomisili di Koba



#### RIWAYAT PELATIHAN

- Kompetensi Komisaris BPRS, Lembaga Certif (2022)
- Eksekutif Overview of Islamic Bank, LPPI



#### RIWAYAT PENDIDIKAN

- Magister Ilmu Pemerintahan IPDN (2016)
- Drs. FKIP Universitas Sebelas Maret (1987)



#### PENGALAMAN KERJA

- Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah (2016 - 2024)
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah (2011 - 2016)
- Staf Ahli Bupati Bangka Tengah ( 2010 - 2011)
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah (2008 - 2010)
- Kepala Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah (2006-2008)
- Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Koba (2003-2006)
- Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sungaiselan (2002-2003)
- Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Merawang (1999-2002)
- Guru SMA Negeri 2 Pangkalpinang (1989-1999)



#### DASAR HUKUM PENGANGKATAN PERTAMA

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 23 Juli 2018



#### DASAR HUKUM PENGANGKATAN TERAKHIR

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 14 April 2023



#### JABATAN RANGKAP

- Tidak Memiliki Rangkap Jabatan



#### KEPEMILIKAN SAHAM

- Tidak Memiliki Saham Perusahaan



#### PERIODE JABATAN

- Kedua



#### HUBUNGAN AFILIASI

- Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali



**H. SYAIPUL ZOHRI**

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Warga negara Indonesia, lahir di  
Lampung

Usia 61 tahun Per Desember 2025.

Berdomisili di Sungailiat, Bangka



#### RIWAYAT PELATIHAN

- Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah XIX (2023)
- Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah VIII Bidang BPRS (2023)
- Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah VII (2022)
- Workshop Hybrid Contracts pada Produk Perbankan Syariah, Iqtishad Consulting (2015)
- Overview for Islamic Banking for BPRS Bangka Belitung, ICDIF - International Center for
- Development in Islamic Finance (2011)
- Training Figh Muamalat Advance Training on Islamic, MES - Masyarakat Ekonomi Syariah (2010)
- Pelatihan Pembimbing Manasik Haji Profesional, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (2015)



#### RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana PAI IAIN RF. Palembang (1992)



#### PENGALAMAN KERJA

- Ketua Badan Pelaksana Pengelolaan Masjid Agung Sungailiat (2016 - sekarang)
- Ketua Pengawas Yayasan Bahrul Ulum Islamic Center Sungailiat (2016 - sekarang)
- Ketua Yayasan Kesejahteraan Anak Sosial Anak / Panti Asuhan Al Kausar (2014 - sekarang)
- Ketua BAZ/ BAZNAZ (2008 - 2016)
- Ketua Umum DP. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bangka (2011 - sekarang)
- Kasi PD. Pontren Kementerian Agama (1995 - sekarang)



#### DASAR HUKUM PENGANGKATAN PERTAMA

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 11 September 2009



#### DASAR HUKUM PENGANGKATAN TERAKHIR

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 17 Mei 2024



#### JABATAN RANGKAP

- Tidak Memiliki Rangkap Jabatan



#### KEPEMILIKAN SAHAM

- Tidak Memiliki Saham Perusahaan



#### PERIODE JABATAN

- Keempat



#### HUBUNGAN AFILIASI

- Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali



**HASYIM**

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga negara Indonesia, lahir di Pangkalpinang.

Usia 72 tahun Per Desember 2025.

Berdomisili di Koba, Bangka Tengah



#### RIWAYAT PELATIHAN

- Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah VIII Bidang BPRS (2023)
- Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah VII (2022)
- Sertifikasi Halal, MUI Prov. Bangka Belitung (2017)
- Workshop Eksekutif Hybrid Contracts pada Produk Perbankan Syariah, Iishad Consulting (2015)
- Produk Halal, Kanwil Agama Babel (2007)
- Munas IV Forum Zakat, Forum Zakat Nasional (2006)
- Orientasi Instruktur Amil Zakat, Depag RI (2005)
- Orientasi Pembimbing/Pelatih Calon Haji, Depag Kanwil Prov. Kep. Babel (2004)



#### RIWAYAT PENDIDIKAN

- Madrasah Aliyah Negeri (MAN) MAAIN Bantul (1973)



#### PENGALAMAN KERJA

- Ketua BAZNAZ Kabupaten Bangka Tengah (2006 - sekarang)
- Ketua MUI Bangka Tengah (2005 - sekarang)
- Guru Honorer Dinas Pendidikan / SMPN 1 Koba dan PP Al- Muhajirin Koba (1983 - 2000)



#### DASAR HUKUM PENGANGKATAN PERTAMA

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 11 September 2009

#### DASAR HUKUM PENGANGKATAN TERAKHIR

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 17 Mei 2024



#### JABATAN RANGKAP

- Tidak Memiliki Rangkap Jabatan



#### KEPEMILIKAN SAHAM

- Tidak Memiliki Saham Perusahaan



#### PERIODE JABATAN

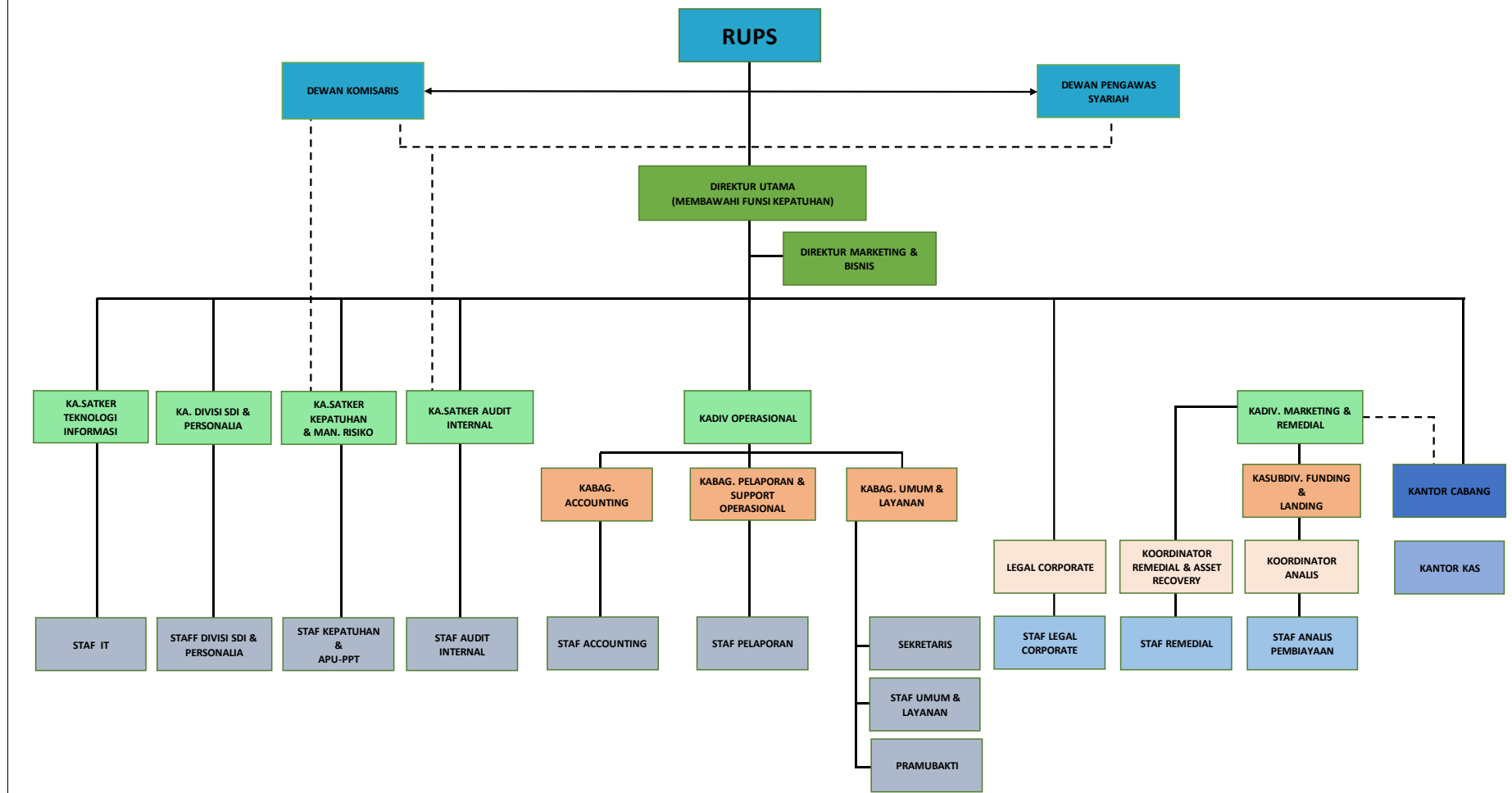
- Keempat



#### HUBUNGAN AFILIASI

- Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PUSAT  
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH BANGKA BELITUNG  
PER 31 DESEMBER 2025**



### 3. Bidang Usaha

#### A. Penghimpunan Dana

- a. Tabungan Hidayah merupakan salah satu jenis produk penghimpunan dana unggulan yang ada di PT. BPRS Bangka Belitung, Hidayah dapat didefinisikan sebagai Himpunan Dana Syariah dengan konsep bagi hasil.
- b. Tabungan Pendidikan merupakan jenis tabungan yang diperuntukan bagi pelajar mulai dari Paud & TK hingga SMA.
- c. Tabungan Simpel merupakan jenis tabungan khusus untuk pelajar, juga salah satu produk program OJK sebagai sarana Literasi dan Inklusi.
- d. Simpanan Wadiah merupakan Dana investasi murni bagi nasabah yang tidak mau adanya bagi hasil.
- e. Tabungan Rencana, merupakan tabungan khusus yang diperuntukan untuk merencanakan ibadah haji, umroh, qurban dan pendidikan yang penarikan dan penyetorannya dilakukan dengan syarat-syarat tertentu dan buku tabungan sebagai media.
- f. Tabungan Pembiayaan merupakan jenis tabungan khusus untuk nasabah yang melakukan pembiayaan di PT. BPRS Bangka Belitung.
- g. Deposito Mudharabah, merupakan salah satu produk investasi unggulan berjangka dengan bagi hasil lebih besar dibandingkan dengan Tabungan.

#### B. Penyaluran Dana

- a. Pembiayaan dengan akad Murabahah digunakan pada beberapa produk pembiayaan seperti Pembiayaan Cikgu (Sertifikasi Guru) yang sumber pembayarannya berasal dari Tunjangan Sertifikasi Guru baik itu ASN maupun Swasta, Pembiayaan Serbaguna Pegawai, juga Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor dimana prinsipnya adalah jual beli barang.
- b. Pembiayaan Multijasa dipergunakan untuk pembiayaan seperti Pendidikan, Kesehatan, Umroh, dan /atau Pernikahan, dengan cara sewa menyewa paket.
- c. Pembiayaan IMBT merupakan pembiayaan untuk memperoleh hak manfaat atas barang dan/atau memperoleh peluang untuk mendapatkan kepemilikan barang.

### 4. Teknologi Informasi

#### 1.) Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi (TI) yang pesat telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Penerapan sistem teknologi informasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Di lingkungan PT BPRS Bangka Belitung, kebutuhan akan sistem informasi yang andal dan terintegrasi menjadi semakin penting, seiring dengan meningkatnya kompleksitas proses bisnis dan tuntutan terhadap layanan yang cepat, akurat, dan transparan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi sebagai bagian strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai kondisi teknologi informasi yang digunakan saat ini, termasuk evaluasi terhadap infrastruktur, sistem aplikasi, keamanan informasi, serta sumber daya manusia di bidang TI. Dengan adanya laporan ini, diharapkan

manajemen dapat memperoleh informasi yang akurat untuk perencanaan pengembangan teknologi informasi ke depan, guna menunjang pertumbuhan dan keberlanjutan operasional perusahaan.

2.) Sistem Teknologi Informasi yang digunakan

Dalam menjalankan aktifitas bisnisnya, PT. BPRS Bangka Belitung membutuhkan teknologi informasi untuk mempermudah dan mendukung seluruh aktifitas yang ada didalam perusahaan. Sehingga seluruh proses layanan terhadap Nasabah dapat berlangsung dengan maksimal tanpa hambatan. Berikut daftar sistem teknologi informasi yang digunakan PT. BPRS Bangka Belitung untuk mendukung proses bisnis yang ada di dalam perusahaan:

a. IBA (Islamic Banking Application)

Merupakan sebuah sistem inti perbankan yang digunakan untuk mendukung seluruh aktifitas pelayanan baik itu penghimpunan dana serta penyaluran dana. Sistem yang dibuat dan dikembangkan oleh pihak ketiga ini merupakan sistem utama yang menjadi kunci dari kelancaran dan keberhasilan aktifitas bisnis yang ada diperusahaan.

b. Website Perusahaan

Merupakan sebuah sistem dalam bentuk website yang digunakan untuk menginformasikan kepada nasabah terkait produk – produk yang dimiliki, laporan keuangan, informasi perubahan kebijakan, aktifitas yang terjadi pada perusahaan serta informasi Lelang Asset yang dimiliki PT. BPRS Bangka Belitung.

c. E-Mail Corporate

Merupakan Sebuah Sistem Surat Digital yang dapat dipergunakan oleh internal user untuk aktifitas penyampain surat secara digital dan realtime kepada seluruh pegawai maupun pihak eksternal.

d. Whistleblowing System (WBS)

Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas, PT BPRS Bangka Belitung telah menerapkan Whistleblowing System (WBS) sebagai mekanisme pelaporan atas dugaan pelanggaran atau tindakan tidak etis yang dilakukan oleh karyawan, manajemen, maupun pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan. System ini dapat diakses siapapun baik internal maupun eksternal melalui website Perusahaan.

e. System Absensi dan Payroll

Merupakan sistem absensi dan payroll yang digunakan PT. BPRS Bangka Belitung untuk mendukung aktifitas kehadiran dan penggajian yang tersistematis untuk menghindari terjadinya fraud maupun manipulasi kehadiran dan perhitungan gaji karyawan.

3.) Pemanfaatan Teknologi dalam Layanan Nasabah

Pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses Layanan terhadap Nasabah menjadi keutamaan dalam aktifitas perbankan yang ada di PT. BPRS Bangka Belitung. Berikut aktifitas – aktifitas yang mendapat dukungan teknologi dalam pelaksanaannya :

a. Penghimpunan Dana

Dalam Aktifitas Penghimpunan Dana yang dilakukan oleh PT. BPRS Bangka Belitung saat ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci utama sehingga proses penghimpunan dana nasabah dapat berjalan dengan baik. Dengan didukung oleh teknologi (*core banking*) saat ini, Nasabah dapat melakukan penarikan serta penyetoran dana / simpanan diseluruh kantor cabang / kas terdekat secara *real time* tanpa harus datang ke kantor Dimana penempatan dana dilakukan.

- b. **Penyaluran Dana**  
Dalam Aktifitas Penyaluran Dana yang telah dihimpun oleh Perusahaan, pemanfaatan teknologi juga diperlukan untuk kelancaran aktifitas penyaluran dana baik itu penarikan dana yang telah disalurkan serta pembayaran kewajiban/angsuran nasabah kepada bank. Sistem Inti saat ini telah mempermudah nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran pembiayaan di kantor cabang / kas terdekat manapun, tanpa harus mengunjungi kantor dimana nasabah melakukan peminjaman dana tersebut.
- c. **Pengaduan Nasabah**  
Untuk mendukung komitmen Perusahaan dalam pelayanan, saat ini telah tersedia sebuah system (**Whistleblowing System**) yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun melalui website Perusahaan untuk menjaga reputasi Perusahaan dari aktifitas yang tidak etis dari karyawan Perusahaan dalam melakukan aktifitas dengan nasabah.
- 4.) **Keamanan System dan Tata Kelola Teknologi Informasi**  
Dalam era digital yang semakin kompleks, keamanan sistem informasi menjadi aspek krusial dalam mendukung kelangsungan operasional dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. PT BPRS Bangka Belitung menempatkan keamanan sistem dan tata kelola teknologi informasi sebagai prioritas utama dalam pengelolaan infrastruktur dan layanan TI.
- a. **Keamanan Sistem Informasi**  
Keamanan sistem difokuskan pada tiga aspek utama: **kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability)** data dan sistem. Beberapa langkah yang telah diterapkan meliputi :
- Penggunaan firewall dan antivirus untuk melindungi jaringan internal dari serangan eksternal.
  - Penerapan sistem autentikasi berlapis dan manajemen hak akses untuk memastikan hanya pihak berwenang yang dapat mengakses data atau sistem tertentu.
  - Pengamanan fisik terhadap server dan perangkat keras penting.
  - Prosedur pencadangan (backup)
- b. **Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance)**  
Tata kelola TI diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh investasi, penggunaan, dan pengelolaan teknologi informasi sejalan dengan tujuan strategis perusahaan. Aspek-aspek tata kelola yang menjadi fokus antara lain :
- Penyusunan dan implementasi kebijakan serta prosedur TI yang terdokumentasi dengan baik.
  - Penetapan struktur organisasi TI yang mendukung pemisahan tugas dan tanggung jawab secara jelas.
  - Evaluasi dan pengendalian internal terhadap proses pengadaan, pengembangan, serta pemeliharaan sistem.
  - Monitoring kinerja layanan TI
- 5.) **Pengembangan dan Inovasi**  
Pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk memastikan seluruh proses bisnis dapat terintegrasi dengan baik. Salah satu pengembangan yang dilakukan :
- a. memberikan masukan terhadap pengembang aplikasi inti terkait adanya perubahan kebijakan otoritas, perubahan kebijakan internal maupun permintaan perbaikan aplikasi inti dari permintaan user.
- b. Realisasi penyimpanan terpusat masih terkendala infrastruktur dan sumber daya pendukung serta biaya yang cukup besar. sedangkan inovasi melakukan pendekatan kepada pihak ketiga untuk penerapan layanan Virtual Account yang sudah sampai tahap pengenalan produk dan teknologi. Akan dilanjutkan pada rencana bisnis 2026.
- Inovasi teknologi yang telah ditawarkan untuk dapat segera di implementasikan adalah pemanfaatan whatsapp blast, PPOB atau payment gateway, VA / Virtual Account untuk aktifitas transaksi dengan bank koresponden.

## 6.) Tantangan dan Mitigasi Risiko

Dalam implementasi dan pengelolaan teknologi informasi, PT BPRS Bangka Belitung menghadapi berbagai tantangan dan risiko yang perlu dikelola secara tepat untuk menjaga kelangsungan layanan dan keamanan informasi. Tantangan tersebut bersifat teknis, operasional, maupun strategis, dan dapat berdampak terhadap kinerja organisasi jika tidak ditangani secara optimal.

### a. Ancaman Keamanan Siber

Peningkatan intensitas serangan siber, seperti malware, phishing, ransomware, dan upaya peretasan, menjadi tantangan utama bagi sistem perbankan. Risiko ini dapat mengakibatkan kebocoran data, gangguan operasional, hingga kerugian finansial dan reputasi.

### b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) TI

Ketersediaan tenaga ahli di bidang teknologi informasi, khususnya yang memahami sistem perbankan syariah dan keamanan informasi, masih terbatas. Hal ini dapat memengaruhi kecepatan dalam pengembangan, pemeliharaan, dan respons terhadap insiden TI.

### c. Ketergantungan pada Pihak Ketiga

Beberapa sistem dan infrastruktur TI yang digunakan bergantung pada vendor eksternal. Risiko muncul ketika terdapat gangguan pada layanan pihak ketiga, baik dari sisi teknis maupun administratif (misalnya keterlambatan pemeliharaan, pembaruan sistem, atau kontrak kerja sama).

### d. Perubahan Regulasi

Perubahan atau pembaruan regulasi dari otoritas seperti OJK terkait keamanan data, perlindungan konsumen, atau pelaporan berbasis digital memerlukan penyesuaian sistem secara cepat. Ketidaksiapan dalam merespon perubahan regulasi dapat menimbulkan risiko ketidakpatuhan.

### e. Risiko Teknologi Usang

Perangkat keras dan lunak yang tidak diperbarui secara berkala berpotensi mengalami keterbatasan performa, kerentanan terhadap serangan, serta tidak kompatibel dengan sistem atau kebutuhan operasional terbaru.

### f. Kesadaran Pengguna yang Rendah

Masih terdapat gap pemahaman terkait keamanan informasi di kalangan pengguna internal, seperti penggunaan kata sandi yang lemah atau ketidakhati-hatian dalam menerima tautan mencurigakan, yang dapat menjadi titik masuk bagi ancaman siber.

## 5. Perkembangan dan Target Pasar

Sebagai lembaga keuangan syariah yang berperan dalam mendukung inklusi keuangan dan penguatan sektor riil di daerah, BPRS Bangka Belitung terus melakukan pengembangan usaha yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, kebutuhan masyarakat, dan arah kebijakan pengembangan perbankan nasional.

### 1.) Pertumbuhan Masing-Masing Jenis Produk dan Layanan

#### a. Produk Pembiayaan

Tahun 2025, Realisasi pembiayaan BPRS Bangka Belitung masih didominasi oleh akad Murabahah, IMBT, dan Musyarakah. Masing-masing produk mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024 mengingat adanya persaingan dengan produk sejenis oleh lembaga keuangan lain. Prosentase penurunan dapat dilihat pada table berikut :

Dalam ribuan Rupiah

Jenis Produk	Akad Syariah	Tujuan Penggunaan	Tahun 2024	Tahun 2025	Pertumbuhan
Murabahah	Jual Beli	Kendaraan, barang dagangan, alat kerja	58,475,927	51,033,070	87,27%
IMBT	Sewa Beli	Aset kendaraan, alat produktif	54,408,500	36,927,650	67,87%
Musarakah	Kemitraan	Proyek Pemerintah dan Swasta	5,725,676	3,846,000	67,17%
Multijasa	Ijarah	Konsumtif	40,000	-	0%
<b>Jumlah</b>			<b>118,650,103</b>	<b>91,806,720</b>	<b>77,38%</b>

b. Produk Penghimpunan Dana

Pada tahun 2025, BPRS Bangka Belitung mencatat adanya pertumbuhan dalam penghimpunan dana masyarakat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Prosentase pertumbuhan dapat dilihat pada table berikut :

Dalam ribuan Rupiah

Jenis Produk Dana	Akad Syariah	Segmen Pasar	Tahun 2024	Tahun 2025	Pertumbuhan
Tabungan	Mudharabah	Pelajar, pedagang, ASN, Masyarakat, Organisasi, Lembaga Sosial, Masjid	160,460,433	150,576,197	93,84%
Deposito	Mudharabah	Pegawai, pensiunan, pengusaha lokal	153,440,205	163,331,695	106,45%
Simpanan	Wadiah	Masyarakat	9,181,475	10,188,162	110,96%
<b>Jumlah</b>			<b>323,082,113</b>	<b>324,096,054</b>	<b>100,31%</b>

Dari sisi eksternal, kondisi ekonomi regional yang fluktuatif serta tingginya tekanan biaya hidup bagi masyarakat menengah ke bawah cukup berdampak pada kemampuan menabung, terutama pada segmen pelaku usaha mikro dan masyarakat non-fixed income. Di sisi lain, persaingan antar lembaga keuangan, termasuk maraknya promosi digital bank dan fintech dengan penawaran bunga/imbal hasil kompetitif, turut memengaruhi preferensi sebagian nasabah.

Dari sisi internal, terdapat evaluasi terhadap efisiensi jaringan kantor yang menyebabkan penutupan beberapa kantor kas fisik, namun dapat ditutupi dengan membuka layanan kas keliling (mobil branch) sehingga meningkatkan optimalisasi pemanfaatan layanan.

2.) Peningkatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana berdasarkan Sektor Ekonomi dan Akad

a. Sektor Ekonomi yang dibiayai

BPRS Bangka Belitung menyalurkan pembiayaan ke berbagai sektor ekonomi, dengan fokus pada sektor-sektor produktif yang berdampak langsung terhadap perekonomian lokal, diantaranya : Kepemilikan Sepeda motor, Multiguna kebutuhan rumah tangga, Perkebunan Kelapa Sawit, Perdagangan eceran, dan Perikanan.

b. Portofolio Penyaluran Dana

Portofolio penyaluran dana pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 18.431.642.736,- atau setara 9.61%. hal ini akibat dari banyaknya penyelesaian pembiayaan baik dari pelunasan pembiayaan murni, Pelunasan Agunan yang diambil alih (AYDA), dan Hapus Buku (WO).

Dalam ribuan Rupiah

Tahun 2024	Tahun 2025	Variance
210,166,211	191,734,569	(18,431,643)

3.) Strategi Pengembangan dan Target Pasar untuk tahun 2026

BPRS Bangka Belitung menetapkan arah pengembangan jangka pendek melalui strategi berikut:

- a. Ekspansi Pasar  
Memperluas pembiayaan kepada sektor yang sama dengan tahun 2025, namun lebih luas lagi jangkauannya.
- b. Optimalisasi Pelayanan  
Pengadaan Kantor Kas Keliling untuk menjangkau wilayah pelosok.
- c. Inklusi Keuangan  
Literasi keuangan kepada siswa-siswi (tabungan pelajar), ASN (multijasa), dan pelaku UMKM (murabahah modal kerja).
- d. Penguatan Digitalisasi Internal termasuk pemanfaatan aplikasi produktivitas, sistem informasi, dan CBS sebagai sarana penunjang layanan operasional dan pelaporan.

Perkembangan BPRS Bangka Belitung selama tahun 2025 menunjukkan arah positif dalam meningkatkan kinerja intermediasi, penguatan produk syariah, serta pencapaian pada sektor pembiayaan mikro dan penghimpunan dana masyarakat. Dengan strategi yang terfokus pada literasi, pelayanan langsung, dan penyesuaian produk terhadap segmen pasar, BPRS Bangka Belitung optimis dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan syariah yang berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerah sambil terus berupaya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang masih menjadi fokus dari BPRS Bangka Belitung.

## 6. Jumlah, Jenis dan Lokasi Kantor

### Kantor Cabang

No	Nama Kantor	Alamat	Status Kepemilikan Gedung	Nama Pimpinan Kantor	Jumlah Pegawai	Jumah Kantor Kas	Jumlah Kas Keliling	Jumlah EDC	
								Milik Sendiri	Milik Bank Umum
1	KPO Pangkalpinang	Jl. Kampung Melayu No.402 Pangkalpinang	Milik Sendiri	Irwan	28	2	1	0	1
2	KC Sungailiat	Jl. Jend. Sudirman No. 20 Sungailiat	Milik Sendiri	Deny Saputra	23	2	0	0	1
3	KC Muntok	Jl. Jend. Sudirman Sungai Daeng Muntok	Milik Sendiri	Ariadi	19	1	0	0	1
4	KC Koba	Jl. Namang – Koba No.12 Berok	Milik Sendiri	Gusti	16	0	0	0	1
5	KC Tanjung Pandan	Jl. Diponegoro No. 19, Paal Satu Tanjung Pandan	Sewa	I Wayan Agus Ardiana	16	0	0	0	1
6	KC Toboali	Jl. Jend. Sudirman No. 81 Toboali	Sewa	Dede Oktoberi	15	0	0	0	1
7	KC Manggar	Jl. Jend. Sudirman Manggar	Sewa	Dedi Pratama	16	0	0	0	1

### Kantor Kas

No	Nama Kantor Kas	Nama Kantor Induk	Alamat	Status Kepemilikan Gedung	Nama Pimpinan
1	Kantor Kas BTC	KPO Pangkalpinang	Jl. Perniagaan Blok B1-B2 BTC Pangkalpinang	Milik Sendiri	Febria Wulandari
2	Kantor Kas Ayani	KPO Pangkalpinang	Jl. Ayani Dalam Pangkalpinang	Sewa	Silvia Sri Handayani
3	Kas Keliling	KPO Pangkalpinang	Jl. Kampung Melayu No.402 Pangkalpinang	Sewa	Ricky Septiadi
4	Kantor Kas Belinyu	KC Sungailiat	Jl. Sriwijaya Terminal Lama Belinyu	Sewa	Lorena Apriditia
5	Kantor Kas Puding Besar	KC Sungailiat	Jl. Sungailiat Dusun II Puding Besar	Sewa	Darma Saputra
6	Kantor Kas Parit Tiga Jebus	KC Muntok	Jl. Parit Tiga Jebus	Sewa	Kemas Panca Satria

## 7. Kerjasama dengan Lembaga jasa Keuangan atau Lembaga Lain

No	Nama Lembaga Lain	Jenis Kerja Sama	Uraian Kerja Sama	Tanggal Mulai Kerja Sama
1.	DPLK Syariah Muamalat	Pengelolaan Program Pensiun untuk Kompensasi Pasca Kerja	PPUPKP ini dipergunakan untuk keperluan pembayaran kewajiban yang timbul sebagai akibat PHK terhadap Karyawan	25-Oct-2024
2.	PT. Mitrasoft Global Perdana	Perawatan Aplikasi Islamic Banking Application (IBA) dan Surrounding Service	Penyesuaian atau pengembangan IBA dalam bentuk update berkala sesuai dengan ketentuan PSAK dan Perundang-undangan yang berlaku, serta mengerjakan dan menyediakan layanan-layanan Surrounding servis dalam hal Cloud Server untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan Data BPRS Bangka Belitung	03-Jan-2024
3.	PT. People Intelligence Indonesia	Aplikasi dan Jasa Implementasi Greatday	Pemanfaatan Aplikasi untuk keperluan SDM dalam hal rekam kehadiran, payroll, pajak, dsb	04-Apr-2022
4.	PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin	Bancassurance Produk Asuransi Jiwa dengan Model Bisnis Referensi	Perlindungan asuransi kepada penerima manfaat Asuransi syariah (Banker's Clause) sesuai polis	25-Oct-2023
5.	PT. Asuransi Ramayana TBK	Asuransi Kendaraan Bermotor	Perlindungan asuransi terhadap jaminan pembiayaan Kendaraan Bermotor	02-Des-2024

## 8. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Semua kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan realisasi dari Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

No	Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
1.	Workshop Perubahan Lapbul 2025	06-Jan-2025	Eksternal	Pejabat Eksekutif	2	Workshop perubahan ketentuan dan format Laporan Bulanan (Lapbul) 2025 termasuk penyesuaian sistem pelaporan dan validasi data kepada OJK.
2.	Aspek Perlindungan Konsumen dan Masyarakat ke dalam Alur Bisnis PUJK sesuai POJK 22 tahun 2023	16-Jan-2025	Eksternal	Pejabat Eksekutif	2	Pembahasan integrasi perlindungan konsumen dalam proses bisnis, layanan pengaduan, dan kewajiban pelaporan sesuai POJK 22/2023.
3.	Pelatihan dan Sosialisasi RBB 2025	26-Jan-2025	Internal	Seluruh Pegawai	174	Sosialisasi Rencana Bisnis Bank 2025 meliputi target keuangan, strategi bisnis, manajemen risiko, dan pengembangan SDM.
4.	Teknik & Strategi Mitigasi Risiko & Pencegahan Fraud	25-Feb-2025	Eksternal	Pejabat Eksekutif	3	Pelatihan identifikasi risiko, strategi mitigasi, penguatan internal control, dan pencegahan fraud.

5.	Undangan Pembekalan dan Coaching	03-Mar-2025	Internal	Pejabat Eksekutif	4	Pembekalan dan coaching peningkatan kepemimpinan dan pengambilan keputusan strategis.
6.	Pendidikan Khusus Profesi Advokat	12-Apr-2025	Eksternal	Pejabat Eksekutif	1	Pendidikan lanjutan untuk pemenuhan kualifikasi dan kompetensi profesi advokat.
7.	Undangan Sosialisasi Ketentuan Absensi dan Kewajiban Pegawai	09-May-2025	Internal	Seluruh Pegawai	174	Sosialisasi kebijakan absensi, disiplin kerja, serta hak dan kewajiban pegawai.
8.	Auditing Syariah	22-May-2025	Eksternal	Pejabat Eksekutif	2	Pelatihan audit kepatuhan syariah dan penyusunan laporan hasil audit sesuai standar DPS.
9.	Penilaian Kinerja berbasis KPI	27-May-2025	Eksternal	Pejabat Eksekutif	2	Workshop penyusunan dan evaluasi Key Performance Indicator sebagai dasar penilaian kinerja.
10.	Ujian Profesi Advokat	31-May-2025	Eksternal	Pejabat Eksekutif	1	Pelaksanaan ujian profesi sebagai syarat memperoleh lisensi advokat.
11.	Perpanjangan KTA PPKHI	05-Jun-2025	Eksternal	Pejabat Eksekutif	1	Pemenuhan persyaratan administrasi dan perpanjangan keanggotaan organisasi profesi hukum.
12.	Strategi Proaktif Mencegah dan Menghadapi PHK	24-Jun-2025	Eksternal	Pejabat Eksekutif	3	Strategi manajemen SDM dalam mencegah PHK melalui efisiensi dan optimalisasi kinerja.
13.	Pengangkatan dan Pelatihan Advokat	01-Jun-2025	Eksternal	Pejabat Eksekutif	1	Pengangkatan resmi dan pelatihan lanjutan advokat untuk peningkatan kompetensi.
14.	Menyusun Tahapan Perubahan Kinerja SDM & Organisasi Pendekatan Manajemen dan Kepemimpinan	02-Jul-2025	Eksternal	Pejabat Eksekutif	2	Pelatihan manajemen perubahan dan strategi peningkatan kinerja organisasi.
15.	Leadership & Human Capital Strategy	17-Jul-2025	Eksternal	Pejabat Eksekutif	41	Strategi pengembangan SDM, talent management, dan kepemimpinan strategis.
16.	Refreshment Implementasi POJK No.22 Tahun 2023 (Perlindungan Konsumen, Layanan Pengaduan s.d Pelaporan)	28-Aug-2025	Eksternal	Pejabat Eksekutif	2	Penyegaran implementasi POJK 22/2023 terkait perlindungan konsumen dan pelaporan.
17.	Pendidikan Dasar Perbankan Syariah	06-Sep-2025	Internal	Pejabat Eksekutif	30	Pelatihan prinsip dasar perbankan syariah, akad, dan manajemen risiko syariah.

18.	Implementasi & Evaluasi Restrukturisasi Pembiayaan BPRS Bangka Belitung	04-Sep-2025	Internal	Pejabat Eksekutif	20	Evaluasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah.
19.	Analisa Pembiayaan	08-Sep-2025	Eksternal	Pejabat Eksekutif	1	Pelatihan analisa kelayakan pembiayaan dan penilaian risiko debitur.
20.	Undangan Workshop Implementasi Produk Unik Syariah bagi Industri BPRS Batch 2	21-Sep-2025	Eksternal	Pejabat Eksekutif	1	Pengembangan dan implementasi produk inovatif syariah untuk meningkatkan daya saing.
21.	Undangan Workshop Pra-Ijtima' Sanawi DPS X tahun 2025 Bidang Bank Perkeonomian Rakyat Syariah	24-Sep-2025	Eksternal	Pejabat Eksekutif	1	Pembahasan isu strategis kepatuhan syariah dan penguatan fungsi DPS.
22.	Sertifikasi Ulang DPS	20-Oct-2025	Eksternal	Pejabat Eksekutif	2	Pemenuhan kewajiban sertifikasi ulang Dewan Pengawas Syariah.
23.	Training & Sertifikasi CIAO	27-Oct-2025	Eksternal	Pejabat Eksekutif	1	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi audit internal.
24.	Analisa Pembiayaan	08-Nov-2025	Internal	Pejabat Eksekutif	7	Penguatan kemampuan analisa pembiayaan internal untuk meningkatkan kualitas portofolio.
25.	Motivation & Service Excellence	15-Nov-2025	Internal	Pejabat Eksekutif	56	Pelatihan peningkatan motivasi kerja dan budaya pelayanan prima kepada nasabah.
26.	Pelatihan & Uji Kompetensi Pejabat Eksekutif BPRS	21-Nov-2025	Eksternal	Pejabat Eksekutif	4	Pelatihan dan uji kompetensi pejabat eksekutif sesuai ketentuan OJK.
27.	Teknik & Metodologi Penilaian Agunan	06-Dec-2025	Internal	Pejabat Eksekutif	13	Pelatihan metode penilaian agunan dan mitigasi risiko kredit berbasis agunan.
28.	Pelatihan APU PPT & PPSPM	20-Dec-2025	Internal	Pejabat Eksekutif	30	Pelatihan implementasi APU PPT dan penguatan manajemen risiko sesuai regulasi.



Bank Syariah  
**Bangka Belitung**  
Bank Perekonomian Rakyat Syariah

# Laporan Pengawasan DPS

**Semester I Tahun 2025**

**Semester II Tahun 2025**

## 1. Periode Semester I Tahun 2025

### Pokok Pembahasan

- 1) Pembahasan hasil Audit Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Perkeonomian Rakyat Syariah (BPRS) Babel di Kantor Cabang Toboali kab. Bangka Selatan, BPRS Babel cabang Mentok kab. Bangka Barat, BPRS Babel Cabang Koba kab. Bangka Tengah, cabang KPO Pangkal Pinang serta cabang Sungailiat kab. Bangka dimulai sejak 28 Juli 2025 sd 11 Agustus 2025.
- 2) Pembiayaan dengan akad Murabahah pada BPRS Babel merupakan realisasi yang paling dominan bila dibandingkan dengan akad yang lainnya, namun seperti hasil audit syariah pada semester sebelumnya masih ditemukan tidak adanya bukti atau kurangnya kelengkapan Bukti/nota pembelian barang yang semestinya semuanya harus ada, nota yang terlampir hanya sebagian dari plafond yang ada sehingga terdapat sisa dana yang tidak terlampir bukti pembelian barang. Pemenuhan nota/kwitansi pembelian barang yang menjadi obyek akad jual beli dilampirkan terlambat dari waktu yang telah disepakati dalam lembar akad wakalah. Begitu juga nama toko, alamat toko tempat pembelian barang-barang dilengkapi dengan stempel pembeliannya hal ini terjadi pada pembelian barang-barang tertentu yang menggunakan akad wakalah, karenanya akad wakalah ini diupayakan untuk dikurangi, sedangkan pada pembelian kendaraan bermotor umumnya tidak lagi menggunakan akad wakalah. Masih ditemukan side streaming dana yang dilakukan oleh nasabah.
- 3) Untuk pembiayaan IMBT pada prinsipnya sudah memenuhi prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN MUI, sungguhpun demikian perlu diadakan pembinaan-pembinaan demi penyempurnaan akad IMBT itu sendiri, karena masih ditemukan pelanggaran dari klausul akad pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang diketahui bahwa rumah yang diagunkan saat ini masih disewakan kepada orang lain dan nasabah sendiri bertempat tinggal dengan orang tua nasabah dan hal ini terjadi di Kacab. Tanjung Pandan. Diketahui pula bahwa Lembar Surat Jual Beli (Sale and Lease Back) nasabah tidak ditandatangani oleh semua pemilik SHM yang berjumlah empat orang serta tidak ditemukan surat penunjukan kuasa yang diwakilkan, ini terjadi di Kacab. Toboali.
- 4) Reschedulling/Restrukturisasi secara prinsip sudah memenuhi ketentuan prinsip syariah, namun diperlukan lagi peningkatan analisa yang tepat dan akurat terkait sumber penghasilan untuk melakukan pembayaran yang dijalankan nasabah, apakah nasabah masih mempunyai iktikad yang kuat untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, usaha yang digelutinya apakah masih berjalan atau sudah terhenti, maupun karena menurunnya hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah. Ini semua memiliki keterkaitan dengan kemampuan bayar nasabah terhadap kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, namun secara keseluruhan sudah ada progress dalam penyempurnaan dan ketajaman analisa dalam menentukan laik atau tidaknya untuk tindakan selanjutnya.
- 5) Pada Aplikasi Lembaran Formulir Pembukaan Rekening tabungan maupun deposito masih ditemukan kekeliruan dalam kelengkapan data seperti terdapat kesalahan pembukuan biaya penutupan rekening atas tabungan simple. Penulisan nisbah bagi hasil pada tabungan wadiah yang ditulis (.....) pihak pertama dan (.....) pihak kedua yang seharusnya tetap ditulis ( 0 ) untuk

pihak pertama dan ( 0 ) untuk pihak kedua. Pada Surat Perjanjian deposito 12 bulan ada yang tidak ditulis perjanjian bagi hasilnya berapa ...% yang didapat oleh pihak pertama maupun pihak sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan umum poin 4 (empat) menyebutkan:

- a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- b. Tidak adanya validasi dengan tick mark/penulisan akad yang digunakan pada dokumen pembukaan rekening dan deposito terkait penentuan akad.

### **Hasil Pembahasan**

- 1) Hasil pembahasan Audit Syariah ini akan ditindak lanjuti pada audit semester II tahun 2025 berikutnya.
- 2) Pada produk pembiayaan murabahah diharapkan pihak BPRS Babel berupaya secara konsisten mengurangi penggunaan akad wakalah, karena penggunaan akad wakalah ini sangat rentan dengan berbagai kelemahannya, seperti nasabah sering kali tidak melengkapi bukti-bukti pembelian barang seperti nota/kwitansi, nota/kwitansi tidak jelas alamatnya, nama tempat pembelian barang tidak jelas, sering tidak ada stempel bukti pembelian barang, pelaksanaan akad wakalah bersamaan dengan akad murabahah pada saat itu barang belum dibeli atau belum menjadi milik BPRS secara sah, pemenuhan nota/kwitansi pembelian dari barang yang menjadi obyek akad jual beli dilampirkan terlambat dari waktu yang telah disepakati dalam lembar akad wakalah, yaitu 14 hari setelah dilakukan droping, masih sering terjadi side streaming dana yang dilakukan oleh nasabah karena dana yang digunakan tidak sepenuhnya ( full ) digunakan untuk obyek yang dimaksud sehingga nota yang dilampirkan hanya sebagiannya saja. Masih ditemukan nota/kwitansi palsu dari beberapa nasabah murabahah yang dilakukan atas dasar mengejar angka droping agar bisa bersaing dengan kompetitor lainnya. Jika adanya keterbatasan tenaga sehingga BPRS Babel harus menggunakan akad wakalah maka BPRS Babel wajib memenuhi rukun dan syarat wakalah itu sendiri yakni: Muwakkil ( yang mewakilkan ) pemilik yang sah terhadap sesuatu yang diwakilkan, orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu. Wakil ( yang mewakili ) harus cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya, wakil adalah orang yang diberi amanat. Hal-hal yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dapat diwakilkan menurut syariat Islam, dan ini berarti perlu mendapat perhatian semua pihak dan khususnya bagian marketing. Permasalahannya dalam pelaksanaan akad wakalah yang terjadi pada BPRS Bangka Belitung masih lemah dan rentan dengan berbagai kekurangan terutama sekali dikarenakan Sumber Daya Insani (SDI) dan ini perlu mendapatkan perhatian semua pihak terutama sekali dari pihak marketing.
- 3) Pada pembiayaan IMBT, semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah berlaku pula dalam akad IMBT, itu berarti dalam produk IMBT, selanjutnya para pihak dapat melakukan akad pemindahan kepemilikan dengan cara jual beli (bay) atau pemberian (hibah), dengan syarat akad tersebut dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai, berdasarkan DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002.

- 4) Dalam prakteknya masih terdapat pembiayaan dimana barang sewa yang hak sewanya dipindahkan kepihak lain tanpa persetujuan dari bank, sehingga tidak sesuai dengan salah satu pasal dalam akad IMBT, karenanya dalam pembiayaan IMBT teruslah untuk disempurnakan secara bersama-sama untuk mengetahui adakah unsur keterpaksaan dari penjual sebagai pemilik barang untuk menjual assetnya dan keterpaksaan dari pembeli (pihak bank) dalam membeli asset (barang) milik nasabah, atau adakah unsur kezaliman dari salah satu pihak dikarenakan harga barang tersebut bisa lebih murah atau lebih mahal akan tetapi karena keterpaksaan untuk mengambil uang tunai maka barang diperjualbelikan, sementara prinsip jual beli itu harus suka sama suka tidak ada unsur kezoliman.
- 5) Pada Restrukturisasi diharapkan dilakukan dengan sebenar-benarnya analisa yang tetap akurat terkait dengan usaha yang digeluti oleh nasabah, masih berjalan atau tidak usaha yang dikerjakan nasabah, mampu atau tidaknya kemampuan bayar nasabah terhadap kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, apabila tidak memungkinkan penyelesaian dengan cara restrukturisasi maka dapat dilakukan penyelesaian dari agunan yang ada.
- 6) Diharapkan dalam penghimpunan dana nasabah, khususnya kepada petugas Customer Service untuk selalu mencatat data-data pada aplikasi dengan teliti dan benar, jangan sampai terjadi kekeliruan dalam penentuan bagi hasil karena dalam transaksi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito karena formulirnya sama maka hendaklah mentike mark (mencentang) salah satunya supaya jelas nisbah bagi hasilnya.

## 2. Periode Semester II Tahun 2025

### Pokok Pembahasan

- 1) Pembahasan hasil Audit Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Babel di Kantor Cabang KPO Pangkal Pinang, Kantor Cabang Sungailiat Kab. Bangka, Kantor Cabang Manggar kab. Belitung Timur, Kantor Cabang Tanjung Pandan kab. Belitung dan Kantor Cabang Koba kab. Bangka Tengah dari tanggal 29 Desember 2025 s/d 27 Januari 2026.
- 2) Pembiayaan dengan akad Murabahah pada BPRS Bangka Belitung merupakan realisasi yang paling dominan bila dibandingkan dengan akad yang lainnya, namun seperti hasil audit syariah pada semester sebelumnya masih ditemukan tidak adanya bukti atau kurangnya kelengkapan Bukti/nota pembelian barang yang semestinya semuanya harus ada, terlampir, begitu juga identitas toko harus jelas, alamat toko tempat pembelian barang-barang dilengkapi dengan stempel pembeliannya hal ini terjadi pada pembelian barang-barang tertentu yang menggunakan akad wakalah. Begitu juga belum dilengkapi laporan monitoring penggunaan dana pasca realisasi. Karenanya akad wakalah ini diupayakan untuk dikurangi, sedangkan pada pembelian kendaraan bermotor umumnya tidak lagi menggunakan akad wakalah.
- 3) Untuk pembiayaan IMBT pada prinsipnya sudah memenuhi prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN MUI, sungguhpun demikian perlu diadakan pembinaan-pembinaan demi penyempurnaan akad IMBT itu sendiri.
- 4) Pembiayaan dengan Akad Musyarakah sudah berjalan dengan baik namun perlu terus dilakukan pemantauan demi kesempurnaan dan kesesuaian dengan prinsip syariah

- 5) Reschedulling/Restrukturisasi secara prinsip sudah memenuhi prinsip syariah, sungguhpun demikian sangat diperlukan analisa yang tepat dan akurat terkait dengan usaha yang dijalankan nasabah yang menjadi sumber dana dalam memenuhi tanggung jawabnya. Perlu dipertegas apakah nasabah masih mempunyai iktikad yang kuat untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, usaha yang digelutinya apakah masih berjalan atau sudah terhenti, maupun karena menurunnya hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah. Ini semua memiliki keterkaitan dengan kemampuan bayar nasabah terhadap kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, namun secara keseluruhan sudah ada progress dalam penyempurnaan dan ketajaman analisa dalam menentukan laik atau tidaknya untuk tindakan selanjutnya.
- 6) Pada Aplikasi Lembaran Formulir Pembukaan Rekening Perorangan dikarenakan formulir pembukaan pada isian setoran awal ( tabungan ) dan atau nominal bank ( deposito ) adalah sama, untuk menghindari ketidakjelasan nisbah bagi hasil antara keduanya, apabila terjadi transaksi dalam hal Tabungan maka nominal bank ( deposito ) harus ditick mark (centang) begitu pula apabila terjadi sebaliknya. Dalam penerapannya ada kelemahan yang dilakukan oleh petugas pada unit kerja operasional (Customer Service, yaitu: terdapat pencairan dana ( deposito dan tabungan ) yang dilakukan oleh ahli waris nasabah yang telah meninggal dunia, namun tansaksinya dilakukan pada orang ( istri nasabah ) yang tidak diberi kuasa untuk melakukan kepengurusan transaksi pencairan, karena berdasarkan Surat Kuasa diberikan kepada anak.

### **Hasil Pembahasan**

- 1) Hasil pembahasan Audit Syariah ini akan ditindak lanjuti pada audit semester I tahun 2026 berikutnya.
- 2) Pada produk pembiayaan murabahah diharapkan pihak BPRS Babel berupaya secara konsisten mengurangi penggunaan akad wakalah, karena penggunaan akad wakalah ini sangat rentan dengan berbagai kelemahannya, seperti nasabah sering kali tidak melengkapi bukti-bukti pembelian barang seperti nota/kwitansi, nota/kwitansi tidak jelas alamatnya, nama tempat pembelian barang tidak jelas, sering tidak ada stempel bukti pembelian barang, pelaksanaan akad wakalah bersamaan dengan akad murabahah pada saat itu barang belum dibeli atau belum menjadi milik BPRS secara sah, tidak sesuai dengan nilai kebutuhan pembiayaan. Kondisi berpotensi melemahkan kejelasan obyek akad dan membuka risiko gharar. kalau memang adanya keterbatasan tenaga sehingga BPRS Babel harus menggunakan akad wakalah maka BPRS Babel wajib memenuhi rukun dan syarat wakalah itu sendiri yakni: Muwakkil ( yang mewakilkan ) pemilik yang sah terhadap sesuatu yang diwakilkan, orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu. Wakil ( yang mewakili ) harus cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya, wakil adalah orang yang diberi amanat. Hal-hal yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dapat diwakilkan menurut syariat Islam, dan ini berarti perlu mendapat perhatian semua pihak dan khususnya bagian marketing.

- 3) Permasalahannya dalam pelaksanaan akad wakalah yang terjadi pada BPRS Bangka Belitung masih lemah dan rentan dengan berbagai kekurangan terutama sekali dikarenakan Sumber Daya Insani (SDI) dan hal ini harus mendapat perhatian dari berbagai pihak, terutama sekali pihak marketing.
- 4) Dalam penyaluran Pembiayaan Sertifikasi Guru dengan akad muarabah, terjadi praktek setoran biaya dan angsuran yang mengendap selama kurang lebih tiga bulan dengan pola setoran tunai tanpa penyerahan uang fisik terlebih dahulu, dan selanjutnya diperhitungkan atau dipotong dari dana realisasi pembiayaan dan ini berakibat nasabah tidak menerima dana secara penuh sesuai dengan plafond pembiayaan yang direalisasikan. Hal ini perlu didiskusikan kembali agar pihak-pihak yang terlibat dapat memahami dan bekerja sesuai dengan aturan yang ditentukan.
- 5) Pada pembiayaan IMBT, semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah berlaku pula dalam akad IMBT, itu berarti dalam produk IMBT, selanjutnya para pihak dapat melakukan akad pemindahan kepemilikan dengan cara jual beli (bay) atau pemberian (hibah), dengan syarat akad tersebut dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai, berdasarkan DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002.
- 6) Untuk pembiayaan IMBT teruskan untuk disempurnakan secara bersama-sama untuk mengetahui adakah unsur keterpaksaan dari penjual sebagai pemilik barang untuk menjual assetnya dan keterpaksaan dari pembeli (pihak bank) dalam membeli asset (barang) milik nasabah, atau adakah unsur kezaliman dari salah satu pihak dikarenakan harga barang tersebut bisa lebih murah atau lebih mahal akan tetapi karena keterpaksaan untuk mengambil uang tunai maka barang diperjualbelikan, sementara prinsip jual beli itu harus suka sama suka tidak ada unsur kezaliman.
- 7) Pada pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan prinsip syariah.
- 8) Pada Restrukturisasi diharapkan dilakukan dengan sebenar-benarnya analisa yang tetap akurat terkait dengan usaha yang digeluti oleh nasabah tentang masih berjalan atau tidak usaha yang dikerjakan nasabah, mampu atau tidaknya kemampuan bayar nasabah terhadap kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, apabila tidak memungkinkan penyelesaian dengan cara restrukturisasi maka dapat dilakukan penyelesaian dari agunan yang ada.
- 9) Diharapkan dalam penghimpunan dana nasabah baik tabungan maupun deposito, khususnya kepada petugas Customer Service untuk selalu mencatat data-data pada aplikasi dengan teliti dan benar. Dalam transaksi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito karena formulirnya sama maka hendaklah mentike mark ( mencentang) salah satunya supaya jelas tabungan atau deposito yang menjadi pilihan transaksinya, karena nisbah bagi hasil keduanya (tabungan/deposito) sangat berbeda



# Transparansi Tata Kelola

**Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola**

**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris**

**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota DPS**

**Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR Syariah**

**Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS pada Perusahaan Lain**

**Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS dan Pemegang Saham pada BPR Syariah**

**Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR Syariah**

**Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah**

**Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS**

**Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah**

**Rapat Dewan Komisaris**

**Rapat Dewan Pengawas Syariah**

**Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)**

**Permasalahan Hukum yang dihadapi**

**Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan**

**Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Lain**

Sebagai Lembaga keuangan kepercayaan Masyarakat Negeri Serumpun Sebalai, BPRS Bangka Belitung memiliki komitmen tinggi untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam operasional dan kegiatan usaha. Hal ini merupakan faktor sangat penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan masyarakat dan pemegang saham. Tata Kelola yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan

Dengan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dan pengelolaan risiko yang baik, dalam mengelola bank dan terus berupaya meningkatkan, konsisten dan berkelanjutan dalam implementasi dari prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mempertahankan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif.

### 1. Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bangka Belitung periode Semester II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Faktor	nilai
1	Aspek Pemegang Saham	2
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dan wewenang Direksi	2
3	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	3
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah	2
5	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	
6	Penanganan Benturan Kepentingan	2
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan	3
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	2
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2
10	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi anti fraud termasuk Sistem Pengendalian Intern	2
11	Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)	2
12	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	2
13	Rencana Bisnis BPRS.	2
<b>Nilai Komposit</b>		<b>2</b>

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Surat No. S-80/KO.1703/2026 tanggal 7 April 2026 , Penerapan Tata Kelola PT. BPRS Bangka Belitung untuk periode Desember 2025 dinilai Peringkat Komposit 4 (PK-4) atau Kurang Sehat.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Struktur Organisasi yang meliputi Anggota Direksi berdasarkan Modal inti yang dimiliki PT. BPRS Bangka Belitung saat ini adalah sebanyak 2 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama yang juga sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, dan 1 (satu) orang Direktur Marketing.

### 1.) Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama

- a. Bertanggung jawab akan terselenggaranya kegiatan bisnis dan operasional Bank sesuai ketentuan AD/ART perusahaan serta peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Wajib dengan iktikad baik dan penuh rasa tanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan operasional Bank secara menyeluruh.
- c. Menyusun RBB perusahaan sekaligus merealisasikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- d. Menyusun dan menetapkan SOP bersama-sama anggota Direksi lain dan unit kerja terkait secara fleksibel, efektif dan efisien.
- e. Menetapkan kebijakan umum perusahaan sebagai acuan dalam kegiatan bisnis dan operasional Bank.
- f. Mengelola kekayaan dan hutang Bank dengan sebaik-baiknya sesuai yang tercantum di Anggaran Dasar Perusahaan.
- g. Memberi laporan pertanggung jawaban pengelolaan Bank baik kepada pemegang saham dan stakeholder.
- h. Melakukan pengawasan secara menyeluruh atas kegiatan operasional Bank.
- i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dalam RUPS.
- j. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.
- k. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit internal dan eksternal.
- l. Mengungkap kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.
- m. Bertanggung jawab atas penerapan kebijakan APU-PPT sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Membawahkan fungsi kepatuhan dan Manajemen risiko, melakukan koordinasi dan pengawasan kepada unit kerja dibawahnya, sehingga operasional Bank dapat berjalan dengan lancar dan efektif.
- o. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan Ketentuan undang-undang.
- p. Memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.
- q. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan terkait dengan Ketentuan OJK yang terbaru dan penerapan prinsip syariah.

### 2.) Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Marketing dan Bisnis

- a. Wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara professional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bertanggung jawab dengan kegiatan bisnis bank yang terkait dengan kegiatan pemasaran dan kegiatan Penghimpunan dana serta penyaluran dana kepada masyarakat.

- c. Menyusun dan memberikan masukan kepada Direktur Utama tentang penyempurnaan sistem dan prosedur kerja sesuai perkembangan yang dihadapi bank dengan tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undang lainnya.

### 3.) Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Direksi

- a. Rencana Bisnis Bank telah disusun berdasarkan pencapaian masa lalu, dengan menggunakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.
- b. Rencana Bisnis Bank telah dijadikan acuan bagi Direksi dalam mengelola perusahaan agar target-target bisnis dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan.
- c. Direksi telah memastikan penerapan Tata Kelola dan Kepatuhan dapat dilaksanakan oleh seluruh bagian, dengan menetapkan kebijakan struktur organisasi dan Job desk secara jelas dan tegas pada masing-masing bagian.
- d. Penyelesaian telah melakukan pemantauan dan upaya penyelesaian Pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi termasuk melalui restrukturisasi Pembiayaan, Write Off (WO), AYDA.
- e. Direksi telah menindaklanjuti terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan OJK.
- f. Mengupayakan pemenuhan modal untuk meningkatkan rasio KPMM.

### 3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris yang dimiliki PT. BPRS Bangka Belitung saat ini hanya ada 1 (satu) Komisaris sehingga PT. BPRS Bangka Belitung masih memerlukan 1 (satu) anggota dewan komisaris lagi agar memenuhi ketentuan mengenai komposisi anggota Dewan Komisaris berdasarkan POJK No. 9 Tahun 2024.

#### 1.) Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

- a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan POJK, peraturan perundang undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- b. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- c. Melakukan pengawasan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Memberikan saran atau advice kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses perkerjaan.

#### 2.) Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

- a. Penyusunan Rencana Bisnis Bank hendaknya disusun berdasarkan kondisi dan kemampuan BPRS dengan mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal.
- b. RBB digunakan sebagai acuan bagi Direksi dan seluruh staf pegawai didalam melaksanakan tugas tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan operasional BPRS.
- c. Meningkatkan penerapan Tata Kelola BPRS disetiap bagian dan menjadikan budaya Kepatuhan sebagai kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan operasional BPRS.

- d. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah secara maksimal dan optimal serta melakukan pemantauan dan penyelesaian Pembiayaan bermasalah termasuk restrukturisasi Pembiayaan, Write Off (WO), AYDA.
- e. Direksi telah menindaklanjuti terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan OJK.
- a. Direksi akan Mengupayakan pemenuhan modal dari pemegang saham lama.

#### **4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. BPRS Bangka Belitung terdiri dari 2 orang, yaitu 1 (satu) orang sebagai Ketua dan 1 (satu) orang sebagai anggota.

##### **1.) Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Dewan Pengawas Syariah**

- a. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan Bank.
- b. Bertugas sebagai pengawas kegiatan Syariah Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah yang berlaku.
- c. Berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah.
- d. Berfungsi sebagai mediator antara Bank dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Bank yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- e. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- f. Mengawasi proses pengembangan produk baru yang dikeluarkan Bank.
- g. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
- h. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah, terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- i. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya
- j. Menerapkan prinsip Tata Kelola Bank yang baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **2.) Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah**

- a. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan Bank.
- b. Bertugas sebagai pengawas kegiatan Syariah Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah yang berlaku.
- c. Berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah.
- d. Berfungsi sebagai mediator antara Bank dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Bank yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- e. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- f. Mengawasi proses pengembangan produk baru yang dikeluarkan Bank.
- g. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
- h. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah, terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.

- i. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- j. Menerapkan prinsip Tata Kelola Bank yang baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.) Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

- a. Terhadap hasil temuan Audit Syariah terkait dengan kekurangan ataupun adanya hal yang tidak sesuai atau kurang lengkap, maka diharapkan kepada Dewan Direksi untuk segera mengambil langkah atau tindakan untuk perbaikan-perbaikan, lewat pembinaan-pembinaan, pelatihan-pelatihan khususnya yang berhubungan dengan prinsip syariah dan Dewan Pengawas Syariah ( DPS ) siap dilibatkan apabila memang dibutuhkan untuk kebaikan dan kebersamaan.
- b. Terkait hasil temuan Audit Syariah tersebut akan dilakukan pemeriksaan/Audit kembali pada semester 1 tahun 2026.
- c. Terkait dana ZIS, sudah cukup jelas penggunaan dan penyalurannya. Pendistribusiannya ditujukan kepada kelompok asnaf yang berhak menerimanya atau hanya beberapa asnaf saja, sementara untuk dana infaq, shadaqoh dan dana non halal agar dimanfaatkan untuk berbagai kebaikan dan kemaslahatan umat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah kemudian diharapkan dalam penyaluran dana ZIS dari BPRS Babel agar bisa berkoordinasi dengan pihak BAZNAS atau LAZ setempat supaya dalam pendistribusiannya tidak terjadi tumpang tindih sehingga penyalurannya bisa merata dan tepat sasaran.

### 5. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR Syariah

Sejalan dengan aspek keterbukaan, kepemilikan saham Anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah pada PT. BPRS Bangka Belitung per 31 Desember 2025 diungkapkan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Nama Kelompok Usaha BPRS	Nominal	Prosentase Kepemilikan (%)
1.	Sugianto	Komisaris	-	Rp -	0%
2.	Saipul Zohri	Ketua DPS	-	Rp -	0%
3.	Hasyim	Anggota DPS	-	Rp -	0%
4.	Chairul Ichwan	Direktur Utama	-	Rp -	0%
5.	Hendra Dharmas	Direktur	-	Rp -	0%
6.	Pemilik Bank	Pemegang Saham	-	Rp -	0%

- 6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS pada Perusahaan Lain** kepemilikan saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS pada perusahaan lain per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Nama Perusahaan Lain	Nominal	Prosentase Kepemilikan (%)
1.	Sugianto	Komisaris	-	Rp -	0%
2.	Saipul Zohri	Ketua DPS	-	Rp -	0%
3.	Hasyim	Anggota DPS	-	Rp -	0%
4.	Chairul Ichwan	Direktur Utama	-	Rp -	0%
5.	Hendra Dharma	Direktur	-	Rp -	0%

- 7. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS dan Pemegang Saham pada BPR Syariah**

Hubungan keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS dan pemegang saham pada PT. BPRS Bangka Belitung per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan			
			Direksi	Dekom	DPS	Pemegang Saham
1.	Sugianto	Komisaris	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Saipul Zohri	Ketua DPS	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Hasyim	Anggota DPS	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4.	Chairul Ichwan	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5.	Hendra Dharma	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

- 8. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR Syariah**

Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS dan pemegang saham pada PT. BPRS Bangka Belitung per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga			
			Direksi	Dekom	DPS	Pemegang Saham
1.	Sugianto	Komisaris	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Saipul Zohri	Ketua DPS	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Hasyim	Anggota DPS	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4.	Chairul Ichwan	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5.	Hendra Dharma	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

- 9. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah**

Rangkap jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah Lain per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan	
			Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1.	Saipul Zohri	Ketua DPS	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Hasyim	Anggota DPS	Tidak Ada	Tidak Ada

## 10. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Tidak terdapat fasilitas lain yang diperoleh Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah selain paket remunerasi berupa gaji dan tunjangan :

Jenis Remunerasi	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)
<b>Remunerasi</b>						
Gaji	2	877,649,809	1	166,291,544	2	70,211,985
Tunjangan	2	227,111,136	1	83,145,772	2	18,168,891
Tantiem	-	-	-	-	-	-
Bonus	-	-	-	-	-	-
Kompensasi Berbasis Saham	-	-	-	-	-	-
Remunerasi-Lainnya	-	-	-	-	-	-
<b>Total Remunerasi</b>		<b>1,104,760,945</b>		<b>249,437,316</b>		<b>88,380,876</b>
<b>Fasilitas Lain</b>						
Perumahan	-	-	-	-	-	-
Transportasi	-	-	-	-	-	-
Kesehatan	-	-	-	-	-	-
Fasilitas Lain-Lainnya	-	-	-	-	-	-
<b>Total Fasilitas Lain</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Total Remunerasi dan Fasilitas Lain</b>		<b>1,104,760,945</b>		<b>249,437,316</b>		<b>88,380,876</b>

## 11. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Penetapan besaran remunerasi bagi Pengurus telah ditetapkan berdasarkan hasil RUPS dan gaji bagi staf karyawan telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direksi :

No	Deskripsi	Perbandingan (a/b)
1.	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang terendah	1.11
2.	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	1.00
3.	Rasio gaji anggota DPS yang tertinggi terhadap gaji anggota DPS yang terendah	1.11
4.	Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang terendah	4.52
5.	Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0.36
6.	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang tertinggi	0,27

## 12. Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2025 telah dilakukan enam rapat Dewan Komisaris sebagai upaya pengawasan dengan topik pembahasan meliputi kinerja keuangan, implementasi rencana kerja, pengelolaan risiko dan isu-isu penting lainnya yang mempengaruhi jalannya perusahaan.

### 1.) Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris menyelenggarakan 6 (Enam) kali rapat internal Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris mencapai 100 persen secara fisik.

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
15-Jan-2025	5	Rapat Kinerja Pengurus BPRS Bulan Desember 2024
20-Mei-2025	4	Evaluasi Kinerja Posisi 31 April 2025, Rencana Pelaksanaan RUPS Tahun 2025, Usulan Kembali Jabatan Komisaris Utama dan Pemenuhan Modal Dalam Simpanan
27-Mei-2025	4	Review Pedoman Dewan Komisaris SK No. 002/SK-KOM/BSB/2023, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2025 dan Pembahasan Persiapan RUPS Tahunan dan LB
10-Jun-2025	6	Rencana Revisi atas SK Komisaris No. 001/SK-Kom/BSB/I/2020 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dekom dan DPS, Pengawasan Pemenuhan KHP OJK Tahun 2025 dan Pengawasan Pemenuhan Surat OJK SR-9 tentang Tindak Lanjut Uji Tuntas LPS
11-Agt-2025	4	Evaluasi Kinerja, Usulan Kembali Jabatan Komisaris, dan Pemenuhan Modal Dalam Simpanan
09-Sep-2025	4	Evaluasi Kinerja, Percepatan Modal dan Penerapan APU PPT

2.) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Kehadiran rapat anggota Dewan Komisaris sebanyak 6 (Enam) kali.

Nama	Jabatan	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
Sugianto	Komisaris	6	0	100%

### 13. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2025 telah dilakukan tiga rapat Dewan Pengawas Syariah untuk memberikan opini Dewan Pengawas Syariah atas permasalahan yang diajukan Direksi serta koordinasi terkait hasil temuan Otoritas Jasa Keuangan.

1.) Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah menyelenggarakan 3 (Tiga) kali dengan tingkat kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah rata-rata mencapai 100 persen secara fisik.

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
11-Agt-2025	4	Evaluasi Kinerja, Usulan Kembali Jabatan Komisaris, dan Pemenuhan Modal Dalam Simpanan
09-Sep-2025	4	Evaluasi Kinerja, Percepatan Modal dan Penerapan APU PPT
04-Nov-2025	8	Pembahasan Pedoman dan Tata Tertib DPS, Pelaporan DPS Melalui Sistem APOLO dan Pelaksanaan Akad

2.) Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

Kehadiran rapat anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak 3 (Tiga) kali.

Nama	Jabatan	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
Saipul Zohri	Ketua DPS	3	0	100%
Hasyim	Anggota DPS	3	0	100%

#### 14. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Selama periode tahun 2025 terdapat Dua (2) penyimpangan yang dilakukan oleh Enam Belas (16) orang Pegawai Tidak Tetap dan 0 (Nihil) orang Pegawai Tetap, sedangkan periode tahun pelaporan 2024 terdapat 3 (Tiga) penyimpangan yang dilakukan oleh 11 (Sebelas) orang Pegawai Tetap.

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Anggota Direksi		Anggota Dewan		Anggota DPS		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		2		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0		0

#### 15. Permasalahan Hukum yang dihadapi

Terdapat 5 (lima) Permasalahan Hukum yang dihadapi sepanjang tahun 2025 yaitu :

- a. Permasalahan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu :
  - Gustianto, dimana gugatan telah selesai dan pembiayaan yang menjadi dasar gugatan telah dilunasi berdasarkan hasil putusan pengadilan.
  - Pebriani (Telah selesai gugatan di PA Sungailiat berdasarkan putusan dalam akta van dading).
- b. Permasalahan yang masih dalam proses, yaitu :
  - Sodri (Upaya Hukum tingkat kasasi di MA RI telah di putus, saat ini masih menunggu salinan putusan tingkat kasasi untuk di ajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke MA RI).
  - Taufik Rahmansyah (saat ini dalam proses persidangan upaya hukum tingkat Kasasi di MA RI).
  - Qhelvin (saat ini dalam proses persidangan Gugatan Sederhana di PA Sungailiat).

Uraian Permasalahan	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	2	0
Dalam Proses Penyelesaian	3	0
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

#### 16. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2025 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

## 17. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Lain

Pemberian bantuan dana kegiatan sosial yang dilakukan oleh BPRS Bangka Belitung melalui Baitul Maal BPRS Bangka Belitung merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan berupa sumbangan sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan.

Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
14-Feb-2025	Sosial	PAKET SEMBAKO RAMADHAN BINA INSANI	YATIM PIATU DAN DHUAFA TANJUNGPANDAN	3.000.000
14-Feb-2025	Sosial	SANTUNAN FAKIR MISKIN DAN DHUAFA IPHI KOTA PANGKALPINANG	YATIM PIATU DAN DHUAFA KOTA PANGKALPINANG	2.500.000
27-Feb-2025	Sosial	BANTUAN BEROBAT AN ERZAKA	ERZAKA	500.000
27-Feb-2025	Sosial	KEGIATAN RAMADHAN MASJID AGUNG SUNGAILIAT	MASJID AGUNG SUNGAILIAT	1.000.000
03-Mar-2025	Sosial	PAKET SEMBAKO YATIM PIATU DAN DHUAFA	YATIM PIATU DAN DHUAFA KOTA PANGKALPINANG	5.000.000
13-Mar-2025	Sosial	IFTAR BERSAMA ANAK YATIM PIATU	YATIM PIATU DAN DHUAFA TANJUNGPANDAN	1.000.000
13-Mar-2025	Sosial	PAKET LEBARAN PETUGAS KEBERSIHAN BANGKA TENGAH	DHUAFA BANGKA TENGAH	32.500.000
19-Mar-2025	Sosial	BERBAGI KASIH BERSAMA ANAK YATIM PIATU	YATIM PIATU KOKA	5.000.000
21-Mar-2025	Sosial	PAKET LEBARAN S2RJH PANGKALPINANG	DHUAFA KEC RANGKUI	4.427.500
14-Apr-2025	Sosial	RENOVASI MASJID ATTAQWA MANGGAR	MASJID ATTAQWA	1.500.000
26-May-2025	Sosial	PEMBANGUNAN MASJID HODIDJAH PANGKALPINANG	MASJID HODIDJAH	2.000.000
26-May-2025	Sosial	BANTUAN PERLENGKAPAN QURBAN MASJID KUBAH TIMAH	MASJID KHUBAH TIMAH	1.000.000
25-Jun-2025	Sosial	SANTUNAN YATIM PIATU MASJID NURUL ITTIHAD PANGKALPINANG	YATIM PIATU	7.500.000
01-Jul-2025	Sosial	KHITANAN MASAL BERSAMA BAZNAS TANJUNG PANDAN	BAZNAS TANJUNGPANDAN	5.000.000
18-Jul-2025	Sosial	PEMBANGUNAN MUSHOLA SD N 3 PANGKALPINANG	SDN3 PANGKALPINANG	5.000.000
24-Jul-2025	Sosial	SANTUNAN FAKIR MISKIN DAN DHUAFA MASJID ASY SYUKUR	MASJID ASY SYUKUR	3.000.000
07-Aug-2025	Sosial	FESTIVAL BUDAYA ISLAM KEMUJA	DESA KEMUJA	2.000.000
07-Aug-2025	Sosial	PANGGUNG LITERASI SD N 12 PANGKALPINANG	SDN 12 PANGKALPINANG	2.000.000
25-Aug-2025	Sosial	SANTUNAN ANAK YATIM PIATU	YATIMPIATU KOTA PANGKALPINANG	4.500.000
25-Aug-2025	Sosial	FASILITAS PERPUSTAKAAN DIGITAL BANGKA TENGAH	PEMKAB BANGKA TENGAH	1.000.000
29-Aug-2025	Sosial	BAKSOS PEMBAGIAN SEMBAKO KEJARI BANGKA TENGAH	FAKIR MISKIN DAN DHUAFA WILAYAH BANGKATENGAH	5.000.000
10-Sep-2025	Sosial	KEGIATAN PENYALURAN BEASISWA ANAK TIDAK MAMPU	BAZNAS KOTA PANGKALPINANG	2.000.000

10-Sep-2025	Sosial	PEMBANGUNAN MASJID ISLAMIC CENTER ATTAUHID	YAYASAN ATTAUHID	2.000.000
02-Oct-2025	Sosial	MTQH KONTIGEN KOTA PANGKALPINANG	PEMKOT KOTA PANGKALPINANG	2.500.000
08-Oct-2025	Sosial	RENOVASI MASJID JABAL RAHMAH	MASJID JABAL RAHMAH	1.000.000
09-Oct-2025	Sosial	PEMBANGUNAN POSYANDU DESA TAIB	POSYANDU DESA TAIB	1.500.000
16-Oct-2025	Sosial	PEMBANGUNAN SURAU ALAMANAH	SURAU ALAMANAH	1.000.000
17-Nov-2025	Sosial	KONTIGEN TAEKWONDO CTTC PANGKALPINANG	CTTC PANGKALPINANG	5.000.000
17-Nov-2025	Sosial	HUT SMPN 2 PANGKALPINANG	SMPN 2 PANGKALPINANG	1.500.000
25-Nov-2025	Sosial	1 TON BANTUAN BERAS HUT BANGKA BELITUNG	PEMPROV BANGKABELITUNG	15.200.000
02-Dec-2025	Sosial	DANA PEDULI SUMATERA	KORBAN BENCANA BANJIR SUMATERA	5.000.000
02-Dec-2025	Sosial	KHITANAN MASAL BERSAMA RUMAH SEHAT BAZNAS	ANAK YANG TIDAK MAMPU	16.800.000



Bank Syariah  
**Bangka Belitung**  
Bank Perekonomian Rakyat Syariah

# Laporan Keuangan Tahunan

**Laporan Posisi Keuangan**

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

**Laporan Komitmen dan Kontinjensi**

**Laporan Perubahan Ekuitas**

**Laporan Arus Kas**

**Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf**

**Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan**

**Laporan Distribusi Bagi Hasil**

## 1. Laporan Posisi Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dalam ribuan Rupiah

NO	POS	2024 (audited)	2025 (audited)	Pertumbuhan	
				Nominal	%
1	Kas	3.180.033	3.186.709	6.676	100%
2	Surat Berharga Syariah	-	-	-	0%
3	Penempatan pada Bank Lain	100.353.743	120.453.900	20.100.157	120%
4	Piutang Murabahah	121.112.194	110.889.737	(10.222.457)	92%
5	Piutang Istishna	-	-	-	0%
6	Piutang Multijasa	273.160	61.122	(212.037)	22%
7	Piutang Qard	-	-	-	0%
8	Piutang Sewa	1.521.119	1.960.852	439.733	129%
9	Pembiayaan Mudharabah	-	-	-	0%
10	Pembiayaan Musyarakah	17.148.822	10.803.473	(6.345.349)	63%
11	Penyertaan Modal	-	-	-	0%
12	Salam	-	-	-	0%
13	Ijarah	70.110.917	68.019.384	(2.091.533)	97%
14	Persediaan	-	-	-	0%
15	Agunan yang Diambil Alih	13.723.920	11.595.281	(2.128.639)	84%
16	Properti Terbengkalai	-	-	-	0%
17	Aset Tetap Dan Inventaris	31.161.473	30.369.598	(791.875)	97%
18	Akum Peny. dan Cadangan Penurunan Nilai	(12.392.228)	(11.779.178)	613.050	95%
19	Aset Tidak Berwujud	1.586.443	1.573.048	(13.395)	99%
20	Akum Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai	(1.586.443)	(1.573.048)	13.395	99%
21	Aset Keuangan Lainnya	-	-	-	0%
22	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(11.198.271)	(2.401.742)	8.796.529	21%
23	Aset Lainnya	3.412.884	4.246.051	833.167	124%
<b>TOTAL ASET</b>		<b>338.407.766</b>	<b>347.405.187</b>	<b>8.997.422</b>	<b>103%</b>
1	Liabilitas Segera	448.716	918.893	470.178	205%
2	Tabungan Wadiah	9.156.475	10.158.162	1.001.686	111%
3	Simpanan Mudharabah	313.900.638	313.937.892	37.254	100%
a.	Tabungan	160.460.433	150.606.197	(9.854.236)	94%
b.	Deposito	153.440.205	163.331.695	9.891.490	106%
4	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	0%
5	Liabilitas kepada Bank Lain	25.000	439.943	414.943	1760%
6	Pembiayaan Diterima	-	-	-	0%
7	Liabilitas Lainnya	3.062.535	2.351.927	(710.608)	77%
8	Dana Syirkah Temporer	-	-	-	0%
9	Modal Disetor	50.287.140	50.287.140	-	100%
10	Tambahan Modal Disetor	70.852	70.852	-	100%
11	Ekuitas Lain	2.810.667	2.810.667	-	100%
a.	Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	-	-	-	0%
b.	Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	2.810.667	2.810.667	-	100%
c.	Lainnya	-	-	-	0%
d.	Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain -/-	-	-	-	0%
12	Cadangan	4.697.001	4.697.001	-	100%
13	Laba/Rugi	(46.051.258)	(38.267.289)	7.783.969	83%
a.	Tahun-tahun Lalu	(27.068.265)	(41.238.781)	(14.170.516)	152%
b.	Tahun Berjalan	(18.982.992)	2.971.492	21.954.485	116%
<b>TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS</b>		<b>338.407.766</b>	<b>347.405.187</b>	<b>8.997.422</b>	<b>103%</b>

## 2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dalam ribuan Rupiah

NO	POS	2024 (audited)	2025 (audited)	Pertumbuhan	
				Nominal	%
I	PENDAPATAN DARI PENYALURAN DANA	37.352.323	41.643.472	4.291.149	111%
1	Surat Berharga	-	-	-	0%
2	Dari Penempatan Pada Bank Syariah Lain	4.658.386	4.120.037	(538.349)	88%
3	Pembiayaan yang diberikan	32.693.937	37.523.435	4.829.498	115%
a.	Kepada bank lain	-	-	-	0%
b.	Kepada pihak ketiga bukan bank	32.693.937	37.523.435	4.829.498	115%
4	Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi hasil/ljarah	-	-	-	0%
II	BAGI HASIL BAGI PEMILIK DANA	11.367.181	13.235.985	1.868.805	116%
1	Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah	11.367.181	13.235.985	1.868.805	116%
a.	Kepada Bank Lain	-	4.895	4.895	0%
b.	Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	11.367.181	13.231.091	1.863.910	116%
i.	Tabungan	3.600.793	3.973.266	372.473	110%
ii.	Deposito	7.766.388	9.257.825	1.491.437	119%
2	Dana Syirkah Temporer	-	-	-	0%
a.	Kepada Bank Lain	-	-	-	0%
b.	Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	-	-	-	0%
III	PENDAPATAN SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL	25.985.142	28.407.487	2.422.344	109%
IV	PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	6.671.982	15.540.112	8.868.130	233%
V	BEBAN OPERASIONAL	51.637.387	41.484.688	(10.152.699)	80%
1	Premi Asuransi dan Penjaminan	807.536	814.089	6.553	101%
2	Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	28.330.140	11.709.695	(16.620.445)	41%
3	Penyusutan/amortisasi	863.567	629.014	(234.553)	73%
4	Kerugian Pelepasan Aset Yang Diambil Alih	477.551	182.292	(295.260)	38%
5	Tenaga Kerja	17.173.061	23.608.146	6.435.085	137%
6	Pendidikan & Pelatihan	426.419	500.836	74.416	117%
7	Sewa	1.190.848	1.300.468	109.621	109%
8	Pemasaran	33.041	50.924	17.883	154%
9	Barang & Jasa	221.870	269.999	48.129	122%
10	Lainnya	2.113.354	2.419.225	305.872	114%
VI	LABA ( RUGI ) OPERASIONAL	(18.980.263)	2.971.492	21.951.755	116%
VII	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	169.999	742.332	572.333	437%
VIII	BEBAN NON OPERASIONAL	172.729	233.750	61.022	135%
IX	ZAKAT	-	-	-	0%
X	PAJAK PENGHASILAN	-	-	-	0%
XI	LABA ( RUGI ) BERSIH	(18.982.992)	2.971.492	21.954.485	116%
XII	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	-	-	-	0%
XIII	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(18.982.992)	2.971.492	21.954.485	116%

### 3. Laporan Komitmen dan Kontinjensi

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dalam ribuan Rupiah

NO	POS	2024 (audited)	2025 (audited)	Pertumbuhan	
				Nominal	%
<b>I.</b>	<b>TAGIHAN KOMITMEN</b>	-	-	-	<b>0%</b>
	1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	-	-	-	0%
	2. Lainnya	-	-	-	0%
<b>II.</b>	<b>KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	-	-	-	<b>0%</b>
	1. Fasilitas Pembiayaan Bagi Hasil yang Belum Ditarik	-	-	-	0%
	2. Lainnya	-	-	-	0%
<b>III.</b>	<b>TAGIHAN KONTIJENSI</b>	<b>7.417.516</b>	<b>5.752.424</b>	<b>(1.665.092)</b>	<b>78%</b>
	1. Jaminan atau Garansi (Kafalah) yang Diterima	-	-	-	0%
	2. Pendapatan dalam Penyelesaian	7.417.516	5.752.424	(1.665.092)	78%
	3. Lainnya	-	-	-	0%
<b>IV.</b>	<b>LAINNYA</b>	<b>30.754.241</b>	<b>37.595.888</b>	<b>6.841.647</b>	<b>122%</b>
	1. Aset Produktif yang Dihapusbuku	30.754.241	37.595.888	6.841.647	122%
	a. Aset Produktif	30.754.241	37.595.888	6.841.647	122%
	b. Aset Produktif Dihapusbuku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih	-	-	-	0%
	2. Aset Produktif yang Dihapus Tagih	-	-	-	0%
	3. Penerusan Dana (Channeling)	-	-	-	0%

#### 4. Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dalam ribuan Rupiah

NO	POS	Modal Disetor	Tambahan Modal	Modal Sumbangan	Dana Setoran Modal	Laba/Rugi Yang Belum Direalisasi	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Saldo Laba Belum Ditetapkan Penggunaannya	Jumlah
1	Saldo per 31 Des Tahun T-2	50.287.140	-	70.852	-	-	2.810.667	2.348.500	2.348.500	(27.068.265)	30.797.394
2	Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembentukan Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dana Setoran Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Laba/Rugi Periode Berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	(18.982.992)	(18.982.992)
8	Pos Penambah/Pengurang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Saldo per 31 Des Tahun T-1	50.287.140	-	70.852	-	-	2.810.667	2.348.500	2.348.500	(46.051.258)	11.814.402
10	Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pembentukan Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dana Setoran Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.108.307)
14	Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	-	(1.108.307)	-	-	-	-	-
15	Laba/Rugi Periode Berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	4.079.799	4.079.799
16	Pos Penambah/Pengurang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	4.812.476	4.812.476
17	Saldo per 31 Des Tahun T	50.287.140	-	70.852	-	(1.108.307)	2.810.667	2.348.500	2.348.500	(37.158.982)	19.598.371

## 5. Laporan Arus Kas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dalam ribuan Rupiah

NO	POS	2024 (audited)	2025 (audited)	Pertumbuhan	
				Nominal	%
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI METODE LANGSUNG</b>					
	Pendapatan dari Penyaluran Dana	37.352.323	41.643.472	4.291.149	111%
	Pembayaran Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Mudarabah	(11.367.181)	(13.235.985)	(1.868.805)	116%
	Penerimaan Pendapatan Operasional Lainnya	6.671.982	15.716.816	9.044.834	236%
	Penerimaan Dari Pembiayaan dan Piutang yang Dihapusbukkan	-	-	-	0%
	Beban Bonus Titipan Wadiah	-	-	-	0%
	Beban Tenaga Kerja	(17.173.061)	(22.499.840)	(5.326.779)	131%
	Beban Premi Aasuransi dan Penjaminan	(807.536)	(814.089)	(6.553)	101%
	Beban Operasional Lainnya	(33.656.790)	(18.170.759)	15.486.031	54%
	Pendapatan Non Operasional	169.999	565.628	395.629	333%
	Beban Non Operasional	(172.729)	(233.750)	(61.022)	135%
	Pembayaran Pajak Penghasilan	-	-	-	0%
	Pembayaran Zakat	-	-	-	0%
	Penyaluran Dana Kebajikan	-	-	-	0%
	Penyesuaian Lainnya	-	-	-	0%
<b>Penurunan/Kenaikan atas Aset Operasional</b>					
	Penempatan Pada Bank Lain	15.637.113	(20.100.157)	(35.737.270)	-129%
	Piutang Syariah	12.665.227	9.994.761	(2.670.466)	79%
	Pembiayaan Syariah	7.099.573	6.345.349	(754.225)	89%
	Ijarah	(21.527.355)	2.091.533	23.618.888	-10%
	Salam	-	-	-	0%
	Agunan yang Diambil Alih	(165.158)	2.128.639	2.293.797	-1289%
	Aset Lain-Lain	368.141	(833.167)	(1.201.309)	-226%
	Penyesuaian Lainnya	6.680.784	(8.796.529)	(15.477.312)	-132%
<b>Kenaikan/Penurunan liabilitas operasional</b>					
	Liabilitas Segera	43.257	13.157	(30.100)	30%
	Simpanan dari Nasabah	(2.266.681)	1.448.884	3.715.564	-64%
	Simpanan dari Bank Lain	25.000	5.000	(20.000)	20%
	Pinjaman yang Diterima	-	-	-	0%
	Liabilitas Imbalan Kerja	178.183	(402.116)	(580.299)	-226%
	Liabilitas Lain-Lain	391.023	148.528	(242.495)	38%
	Penyesuaian Lainnya	-	-	-	0%
	<b>Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi</b>	<b>146.115</b>	<b>(4.984.626)</b>	<b>(5.130.742)</b>	<b>-3411%</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>					
	Pembelian/Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	(12.146)	791.875	804.021	-6520%
	Pembelian/Penjualan Aset Tidak Berwujud	-	13.395	13.395	0%
	Pembelian/Penjualan Surat Berharga	-	-	-	0%
	Pembelian/Penjualan Penyertaan Modal	-	-	-	0%
	Penyesuaian Lainnya	298.076	(626.445)	(924.521)	-210%
	<b>Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi</b>	<b>285.930</b>	<b>178.825</b>	<b>(107.105)</b>	<b>63%</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>					
	Penerimaan/Pembayaran Pembiayaan Subordinasi - Diperhitungkan Sebagai Modal Inti Tambahan	-	-	-	0%
	Penerimaan/Pembayaran Pembiayaan Subordinasi - Diperhitungkan Sebagai Modal Pelengkap	-	-	-	0%
	Pembayaran Dividen	-	-	-	0%
	Penyesuaian Lainnya	-	4.812.476	4.812.476	0%
	<b>Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>-</b>	<b>4.812.476</b>	<b>4.812.476</b>	<b>0%</b>
	Peningkatan (Penurunan) Arus Kas	432.046	6.676	(425.370)	2%
	Kas dan Setara Kas Awal Periode	2.747.987	3.180.033	432.046	116%
	Kas dan Setara Kas Akhir Periode	3.180.033	3.186.709	6.676	100%

## 6. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dalam ribuan Rupiah

NO	POS	2024 (audited)	2025 (audited)	Pertumbuhan	
				Nominal	%
<b>I. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat</b>					
1.	Penerimaan Dana Zakat yang Berasal dari:				
a.	Intern BPRS	121.642	159.734	38.092	131%
b.	Ekstern BPRS	-	-	-	0%
	<b>Total Penerimaan</b>	<b>121.642</b>	<b>159.734</b>	<b>38.092</b>	<b>131%</b>
2.	Penyaluran Dana Zakat kepada Entitas Pengelola Zakat				
a.	Lembaga Amil Zakat	128.420	118.408	(10.013)	92%
b.	Badan Amil Zakat	-	-	-	0%
	<b>Total Penyaluran</b>	<b>128.420</b>	<b>118.408</b>	<b>(10.013)</b>	<b>92%</b>
<b>II. Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf</b>					
1.	Penerimaan Dana Wakaf yang Berasal dari:				
a.	Intern BPRS	-	-	-	0%
b.	Ekstern BPRS	-	-	-	0%
	<b>Total Penerimaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
2.	Penyaluran Dana Wakaf kepada Entitas Pengelola Wakaf				
a.	Badan Wakaf Indonesia	-	-	-	0%
b.	Nadzir Lain*	-	-	-	0%
	<b>Total Penyaluran</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>

## 7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dalam ribuan Rupiah

NO	POS	2024 (audited)	2025 (audited)	Pertumbuhan	
				Nominal	%
<b>I.</b>	<b>Saldo Awal Dana Kebajikan</b>	<b>17.231</b>	<b>17.099</b>	<b>(132)</b>	<b>99%</b>
<b>II. Penerimaan Dana Kebajikan</b>					
a.	Infak dan Sedekah	44.455	39.705	(4.750)	89%
b.	Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	-	-	-	0%
c.	Denda	-	-	-	0%
d.	Penerimaan Nonhalal	15.414	23.199	7.785	151%
e.	Lainnya	-	-	-	0%
	<b>Total Penerimaan</b>	<b>59.869</b>	<b>62.904</b>	<b>3.035</b>	<b>105%</b>
<b>III. Penggunaan Dana Kebajikan</b>					
a.	Dana Kebajikan Produktif	-	-	-	0%
b.	Sumbangan	43.001	67.200	24.199	156%
c.	Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum	17.000	5.960	(11.040)	35%
	<b>Total Penggunaan</b>	<b>60.001</b>	<b>73.160</b>	<b>13.159</b>	<b>122%</b>
<b>IV.</b>	<b>Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan</b>	<b>(132)</b>	<b>(10.256)</b>	<b>(10.124)</b>	<b>7762%</b>
<b>V.</b>	<b>Saldo Akhir Dana Kebajikan</b>	<b>17.099</b>	<b>6.842</b>	<b>(10.256)</b>	<b>40%</b>

## 8. Laporan Distribusi Bagi hasil

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Dalam ribuan Rupiah

NO	Jenis Penghimpunan	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang Akan Dibagi Hasilkan	Porsi Pemilik Dana		
				Nisbah	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return
1	Liabilitas Kepada Bank Lain	-	-	-	-	0,00
2	Tabungan Mudarabah	143.713.916	1.724.923	13,75	339.030	1,98
3	<b>Deposito Mudarabah</b>	<b>163.331.695</b>	<b>1.960.385</b>	37,50	<b>834.934</b>	5,41
4	1 bulan	5.422.600	65.085	30,00	19.525	4,32
5	3 bulan	17.130.500	205.608	35,00	71.963	5,04
6	6 bulan	28.967.500	347.682	40,00	139.073	5,76
7	12 bulan	111.811.095	1.342.010	45,00	604.373	6,53
8	Pembiayaan Diterima	-	-	0,00	-	0,00
9	<b>JUMLAH</b>	<b>307.045.611</b>	<b>3.685.308</b>		<b>1.173.964</b>	

NO	Jumlah Penyaluran Dana	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang Diterima
1	Penempatan pada Bank Lain	120.453.900	384.352
2	Piutang Murabahah	155.689.438	1.767.228
3	Piutang Istishna	-	-
4	Piutang Multijasa	104.832	3.999
5	Pembiayaan Gadai	-	-
6	Pembiayaan Mudarabah	-	-
7	Pembiayaan Musyarakah	26.640.667	25.517
8	Ijarah	69.980.236	1.504.213
9	Pembiayaan Lainnya	-	-
10	<b>JUMLAH</b>	<b>372.869.072</b>	<b>3.685.308</b>



Bank Syariah  
**Bangka Belitung**  
Bank Perekonomian Rakyat Syariah

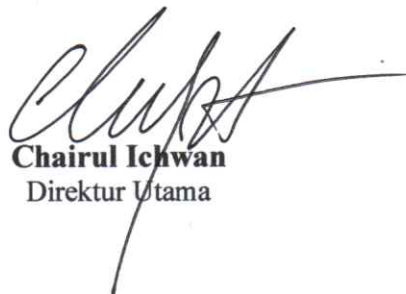
# Surat Pernyataan Direksi

**Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris  
Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025  
PT Bank Persekonomian Rakyat Syariah Bangka Belitung**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Persekonomian Rakyat Syariah Bangka Belitung tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pangkalpinang, 30 April 2026

**Direksi**



**Chairul Ichwan**  
Direktur Utama



**Hendra Dharma**  
Direktur

**Dewan Komisaris**



**Sugianto**  
Komisaris



Bank Syariah  
**Bangka Belitung**  
Bank Perekonomian Rakyat Syariah

# Laporan Auditor Independen

**Opini dari Akuntan Publik**

**Laporan Akuntan Publik**

## Opini dari Akuntan Publik

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025 opininya adalah

Opini Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik
Wajar Tanpa Pengecualian	KAP Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG**

**LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2025

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI**

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 29

**LAMPIRAN - INFORMASI TAMBAHAN**

Laporan Sumber Dana dan Penggunaan Dana Kebajikan	1
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	2
Laporan Sumber dan Penggunaan Infaq dan Shadaqah	3

**SURAT PERNYATAAN PERNYATAAN DIREKSI**  
**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG**  
**TENTANG**  
**TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chairul Ichwan, SE  
Alamat Kantor : Ruko TJ Tower Jalan Kampung Melayu No 21-22 Kelurahan Bukit Merapin  
Kecamatan Gerunggung Kota Pangkalpinang - Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33172  
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Entitas.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Entitas telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan Entitas tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Entitas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bangka Belitung, 30 April 2026



Chairul Ichwan, SE  
Direktur Utama



## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00081/2.1061/AU.8/07/1080-1/1/IV/2026

Pemegang Saham, Dewan Pengurus, dan Dewan Pengawas Syariah  
**PT BPR Syariah Bangka Belitung**

### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT BPR Syariah Bangka Belitung (“Perusahaan”) yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025 serta kinerja laporan keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP).

### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung Jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Hal lain

Selain laporan keuangan tersebut di atas, Perusahaan menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dana infaq dan shadaqah, dan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai informasi tambahan, yang disajikan sebagai lampiran dalam laporan ini. Informasi tambahan tersebut bukan merupakan bagian dari laporan keuangan yang diaudit berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat, sehingga kami tidak menyatakan opini atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan tersebut.

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 18 Februari 2025.





## **Tanggung Jawab Manajemen Dan Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

## **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Audit Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian materi dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.



## Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Audit Laporan Keuangan – lanjutan

Sebagai bagian suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

## Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan

**Slamet Riyanto, CA., CPA**  
Nomor Izin Akuntan Publik : AP 1080

Jakarta, 30 April 2026



**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG**  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
Per 31 Desember 2025 dan 2024  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<b>Catatan</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas	3.c, 1	3.186.708.500	3.180.033.000
Penempatan pada bank lain	3.d, 2	120.453.899.536	100.353.742.610
Piutang dan pembiayaan - bersih	3.e, 3.f, 3	119.352.590.904	127.335.905.011
Pendapatan yang akan diterima	3.l, 8	4.528.611.697	3.755.669.714
Aset lain-lain	3.m, 9	500.794.882	1.178.332.732
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>248.022.605.519</b>	<b>235.803.683.067</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Agunan yang diambil alih	3.k, 4	11.595.281.201	13.723.919.751
Aset tetap - bersih	3.i, 5	86.843.540.944	88.880.162.869
Aset hak guna - bersih	3.aa, 6	943.759.722	-
Aset tidak berwujud - bersih	3.j, 7	23	30
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>		<b>99.382.581.890</b>	<b>102.604.082.650</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>347.405.187.409</b>	<b>338.407.765.717</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS LANCAR</b>			
Utang pajak	3.o, 10	258.157.448	220.331.584
Tabungan wadiah	3.b, 3.p, 11	10.188.161.559	9.181.475.286
Dana syirkah temporer	3.b, 3.q, 12	314.347.834.951	313.900.637.710
Liabilitas imbalan pascakerja	3.bb, 13	37.670.929	-
Liabilitas lainnya	3.s, 14	2.974.991.793	3.290.919.008
<b>JUMLAH LIABILITAS LANCAR</b>		<b>327.806.816.680</b>	<b>326.593.363.588</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>327.806.816.680</b>	<b>326.593.363.588</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>19.598.370.729</b>	<b>11.814.402.129</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>347.405.187.409</b>	<b>338.407.765.717</b>

Bangka Belitung, 30 April 2026



**Chairul Ichwan**  
Direktur Utama

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG****LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<b>Catatan</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN BAGI HASIL</b>			
Margin kontraktual	3.v, 15.a	81.020.272.126	70.512.709.626
Provisi & Administrasi	3.v, 15.b	22.500.000	32.700.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN BAGI HASIL</b>		<b>81.042.772.126</b>	<b>70.545.409.626</b>
<b>BEBAN BAGI HASIL</b>			
Bagi hasil kontraktual	3.w, 16	13.862.918.453	11.984.401.934
<b>JUMLAH BEBAN BAGI HASIL</b>		<b>13.862.918.453</b>	<b>11.984.401.934</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN BAGI HASIL BERSIH</b>		<b>67.179.853.673</b>	<b>58.561.007.692</b>
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>	3.v, 17	<b>20.629.517.794</b>	<b>13.215.528.935</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>		<b>87.809.371.467</b>	<b>71.776.536.627</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban penyisihan kerugian	3.w, 18	11.709.694.505	28.330.139.719
Beban penyusutan dan amortisasi	3.w, 19	40.351.321.435	34.023.953.701
Beban pemasaran	3.w, 20	50.924.189	33.040.950
Beban administrasi & umum	3.w, 21	26.464.842.108	21.088.093.255
Beban operasional lainnya	3.w, 22	171.268.895	191.096.000
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>		<b>78.748.051.132</b>	<b>83.666.323.625</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan non operasional	3.x, 23.a	3.388.357.960	958.275.111
Beban non operasional	3.y, 23.b	8.369.879.275	8.051.480.480
<b>JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		<b>(4.981.521.315)</b>	<b>(7.093.205.369)</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>		<b>4.079.799.019</b>	<b>(18.982.992.367)</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN KINI</b>	3.z, 24	-	-
<b>LABA (RUGI) SETELAH PAJAK</b>		<b>4.079.799.019</b>	<b>(18.982.992.367)</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN</b>		<b>(1.108.306.645)</b>	-
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>		<b>2.971.492.374</b>	<b>(18.982.992.367)</b>

Bangka Belitung, 30 April 2026



**Chairul Ichwan**  
Direktur Utama

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG**

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Per 31 Desember 2025 dan 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

	<b>Modal Disetor</b>	<b>Modal Sumbangan</b>	<b>Surplus Revaluasi Aset</b>	<b>Cadangan</b>	<b>Saldo Laba (Rugi)</b>	<b>Other Comprehensive Income</b>	<b>Jumlah Ekuitas</b>
<b>Saldo Per 1 Januari 2024</b>	<b>50.287.140.000</b>	<b>70.852.000</b>	<b>2.810.667.065</b>	<b>4.697.000.664</b>	<b>(27.068.265.233)</b>	-	<b>30.797.394.496</b>
Laba (Rugi) tahun berjalan	-	-	-	-	(18.982.992.367)	-	(18.982.992.367)
<b>Saldo Per 31 Desember 2024</b>	<b>50.287.140.000</b>	<b>70.852.000</b>	<b>2.810.667.065</b>	<b>4.697.000.664</b>	<b>(46.051.257.600)</b>	-	<b>11.814.402.129</b>
Dampak perhitungan aktuarial:							
Penyesuaian saldo laba	-	-	-	-	4.812.476.225	-	4.812.476.225
Penghasilan komprehensif lain (OCI):							
Kerugian aktuarial	-	-	-	-	-	(1.108.306.645)	(1.108.306.645)
Jumlah penghasilan komprehensif	-	-	-	-	4.079.799.019	(1.108.306.645)	2.971.492.374
<b>Saldo Per 31 Desember 2025</b>	<b>50.287.140.000</b>	<b>70.852.000</b>	<b>2.810.667.065</b>	<b>4.697.000.664</b>	<b>(37.158.982.355)</b>	<b>(1.108.306.645)</b>	<b>19.598.370.729</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG****LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Laba (Rugi) bersih	4.079.799.019	(18.982.992.367)
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba komprehensif menjadi arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	73.006.225	6.680.783.675
Pendapatan margin ditangguhkan	-	(20.526.571.228)
Penyusutan aset tetap	11.793.644.505	232.320.194
Amortisasi	2.332.707	65.756.901
Aset hak guna - bersih	(943.759.722)	-
Selisih pembulatan	7	-
Dampak penerapan hasil perhitungan aktuaris:		
Penyesuaian saldo laba	4.812.476.225	-
Other Comprehensif Income	(1.108.306.645)	-
<b>Penurunan (Kenaikan):</b>		
Penempatan pada bank lain	(20.100.156.926)	15.637.112.829
Piutang dan pembiayaan	7.910.307.882	19.132.158.620
Agunan yang diambil alih	2.128.638.550	(165.158.198)
Pendapatan yang akan diterima	(772.941.983)	-
Aset lain-lain	675.205.143	-
<b>Kenaikan (Penurunan):</b>		
Utang pajak	37.825.864	9.361.133
Simpanan	1.453.883.514	(2.241.680.758)
Kewajiban imbalan kerja	37.670.929	178.182.992
Kewajiban lain-Lain	(315.927.215)	424.918.758
<b>ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH (DIGUNAKAN UNTUK) DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b><u>9.763.698.080</u></b>	<b><u>444.192.550</u></b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penambahan aset tetap	(35.821.848.000)	(12.146.000)
Pengurangan aset tetap	26.064.825.420	-
<b>ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH (DIGUNAKAN UNTUK) DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b><u>(9.757.022.580)</u></b>	<b><u>(12.146.000)</u></b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
<b>ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH (DIGUNAKAN UNTUK) DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b><u>6.675.500</u></b>	<b><u>432.046.550</u></b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<b><u>3.180.033.000</u></b>	<b><u>2.747.986.450</u></b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b><u>3.186.708.500</u></b>	<b><u>3.180.033.000</u></b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

## **PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

## **1. UMUM**

### **a. Gambaran Umum**

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung didirikan berdasarkan Akta Notaris Surdjono Arham, SH, SpN No. 9 Tanggal 15 Februari 2002, sebagai kelanjutan dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Tijari Baitul Maal. Akta Notaris tersebut telah mengalami beberapa perubahan, dengan perubahan terakhir dengan Akta Notaris Wahyu Dwicahyo, SH, M.Kn No. 28 tanggal 26 Juli 2008 mengenai peningkatan modal ditempatkan/disetor dan perubahan anggaran dasar perusahaan sesuai dengan Undang-undang perseroan terbatas yang berlaku. Perubahan anggaran dasar perusahaan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-66742.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 22 September 2008.

Saat ini, PT BPRS Bangka Belitung berkedudukan dengan Kantor Pusat di Komplek Ruko TJ. Tower Blok 21-22 Jl. Kampung melayu No. 402, Kel. Bukit Merapin, Kec. Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung 33123. Perusahaan saat ini telah mengoperasikan 1 (satu) kantor pusat operasional Pangkal Pinang, 6 (enam) kantor cabang masing-masing di Sungailiat, Toboali, Mentok, Koba, Tanjung Pandan dan Manggar serta 7 (tujuh) kantor kas.

Maksud dan tujuan didirikan perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dengan melaksanakan kegiatan usaha mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berdasarkan prinsip-prinsip bagi hasil yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, qard, ijarah dan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain, Bank Umum Konvensional dan Unit usaha syariah serta menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

### **b. Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas**

Sesuai dengan akta notaris Akta notaris Wahyu Dwicahyono, SH, MKn No. 42 tanggal 26 April 2012, modal dasar perseroan berjumlah Rp100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah) terbagi atas 10.000.000 (Sepuluh juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 38,73% atau sejumlah 3.873.164 (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp38.731.640.000,- (Tiga puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Perubahan modal dasar dan modal disetor sudah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dengan nomor surat S-65/KO.5312/2015 tanggal 12 Maret 2015. Perubahan Modal Dasar sudah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dengan nomor surat 15/75.DpS/Pg tanggal 16 Agustus 2013 dan atas perubahan modal dasar dari Rp35.000.000.000,- (Tiga puluh lima milyar rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah) telah dicatat dengan surat nomor 147/KO.5312/2014 tanggal 7 Agustus 2014 di Administrasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Pada tahun 2015 melalui Notaris Wahyu Dwicahyono, SH, M Kn Notaris di Pangkalpinang dengan Akte Notaris No. 78 tanggal 29 April 2015, telah dilakukan penambahan Modal Disetor oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), Pemerintah Kabupaten Bangka sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar Rp5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah), atau dengan jumlah saham sebanyak 650.000 (enam ratus lima puluh ribu) lembar saham.

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)***1. UMUM****b. Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas - Lanjutan**

Pada tahun 2015 melalui Notaris Wahyu Dwicahyono, SH, M.Kn Notaris di Pangkalpinang dengan Akte Notaris No. 06 tanggal 04 Agustus 2015, telah dilakukan penambahan Modal Disetor oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) atau dengan jumlah saham sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham; sehingga untuk selanjutnya seluruhnya berjumlah 4.733.964 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp47.339.640.000,- (Empat puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Pada tahun 2016 tepatnya tanggal 28 April 2016 melalui Notaris Wahyu Dwicahyono, SH, M.Kn Notaris di Pangkalpinang dengan Akte Notaris No. 124 tanggal 28 April 2016, telah dilakukan usulan penurunan Modal Disetor dari nilai nominal sebesar Rp47.339.640.000,- (Empat puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.47.337.140.000,- (Empat puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Pada tahun 2018 tepatnya tanggal 14 Desember 2018 melalui Notaris Fachrizal, S.H., M.Kn Notaris di Bangka dengan Akte Notaris No. 24 tanggal 14 Desember 2018, telah dilakukan penambahan Modal Disetor sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Modal Disetor perusahaan menjadi sebesar Rp47.587.140.000,- (Empat puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Pada tahun 2022 tepatnya tanggal 02 Februari 2022 melalui Notaris Fachrizal S.H, M.Kn Notaris di Bangka dengan Akte Notaris No. 03 tanggal 02 Februari 2022, telah dilakukan penambahan Modal Disetor sebesar Rp700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) sehingga Modal Disetor perusahaan menjadi sebesar Rp48.287.140.000,- (Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Pada tahun 2023 tepatnya tanggal 14 April 2023 melalui Notaris Fachrizal, S.H., M.Kn Notaris di Bangka dengan Akte Notaris No. 17 tanggal 14 April 2023, telah dilakukan penambahan Modal Disetor sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sehingga Modal Disetor perusahaan menjadi sebesar Rp50.287.140.000,- (Lima Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Pada tahun 2025 tidak ada penurunan maupun penambahan modal dari pemegang saham, sehingga susunan pemegang saham per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah (Rupiah)
1	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	1.475.500	10.000	29,34	14.755.000.000
2	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	1.154.991	10.000	22,97	11.549.910.000
3	Pemerintah Kabupaten Bangka	775.000	10.000	15,41	7.750.000.000
4	Pemerintah Kabupaten Belitung	701.000	10.000	13,94	7.010.000.000
5	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	452.000	10.000	8,99	4.520.000.000
6	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	359.999	10.000	7,16	3.599.990.000
7	Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah (YKKPT)	68.090	10.000	1,35	680.900.000
8	Yayasan Peduli Koba	42.134	10.000	0,84	421.340.000
	<b>Total</b>	<b>5.028.714</b>		<b>100</b>	<b>50.287.140.000</b>

## **PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

#### **1. UMUM**

##### **c. Susunan Pengurus**

Berdasarkan Akta No.03 tanggal 02 Februari 2022 dari Notaris Fachrizal, SH, M.Kn Susunan Pengurus dan Pengawas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

##### **Pengurus :**

Direktur Utama	: Chairul Ichwan, SE
Direktur	: Hendra Dharmas, SE
Komisaris	: Sugianto, M.Si

##### **Dewan Pengawas Syariah :**

Ketua	: Drs. H. Syaipul Zohri
Anggota	: H. Hasyim Syachroni

#### **2. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung menyatakan bahwa laporan keuangan 2025 disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI) serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) tahun 2013 yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS-IAI) dan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengakuan dan pengukuran aset keuangan syariah, termasuk penurunan nilainya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) 414 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.

#### **3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung mengacu pada SAK EP dengan format Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan berbasis Syariah (PAPSI) serta ketentuan lain yang ditetapkan OJK sebagai basis penyusunan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang signifikan, yang diterapkan oleh perseroan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

##### **a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi dasar:

- Dasar akrual (*accrual basis*), kecuali tagihan bagi hasil atas aset produktif yang digolongkan sebagai non performing dicatat atas dasar kas basis.
- Biaya historis (*historical cost*), kecuali aset tetap tertentu yang dinilai kembali berdasarkan peraturan pemerintah, penyertaan saham tertentu yang dicatat berdasarkan metode ekuitas dan surat-surat berharga tertentu yang dinilai berdasarkan nilai pasar serta aset yang menurut standar akuntansi harus dilakukan penilaian ulang.

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**b. Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa**

Laporan arus kas disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang dikelompokkan ke dalam kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan dengan menggunakan metode tidak langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

Transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pengalihan sumber daya, jasa atau Liabilitas antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terlepas dari harga yang dibebankan. Transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang biasanya terjadi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Transaksi antara entitas dengan pemilik utamanya.
- Transaksi antara entitas dengan entitas lain dimana kedua entitas tersebut di bawah pengendalian bersama dari suatu entitas atau individu.
- Transaksi dimana entitas atau individu yang mengendalikan entitas pelapor menimbulkan beban secara langsung yang bukan ditanggung oleh entitas pelapor.

**c. Kas**

Kas adalah mata uang kertas dan logam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Dalam pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri dan kas dalam perjalanan.

Mata uang rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Mata uang dimaksud tidak termasuk dalam pengertian kas dan disajikan dalam aset lain-lain.

Tidak termasuk dalam pengertian kas adalah emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (*commemorative coins/notes*) dan mata uang emas.

**d. Penempatan pada Bank Lain**

Penempatan pada Bank Lain terdiri dari: giro pada bank umum, tabungan pada bank lain, deposito pada bank lain, dan sertifikat deposito pada bank umum.

1. Giro pada bank umum  
Merupakan simpanan BPRS pada bank umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM (kartu debit), sarana perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan.
2. Tabungan pada bank lain  
Merupakan simpanan BPRS pada bank umum dan BPRS lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
3. Deposito pada bank lain  
Merupakan simpanan BPRS pada bank umum dan BPRS lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara BPRS dan bank yang bersangkutan. Deposito terdiri dari deposito yang berjangka waktu dan deposit on call. Deposit on call adalah deposito yang berjangka waktu relatif singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.

## **PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### **3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **d. Penempatan pada Bank Lain**

Penempatan pada Bank Lain terdiri dari: giro pada bank umum, tabungan pada bank lain, deposito pada bank lain, dan sertifikat deposito pada bank umum.

##### **4. Sertifikat deposito**

Merupakan simpanan BPRS pada bank umum dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (atas unjuk). Bagi hasil sertifikat deposito dihitung dengan cara diskonto, yaitu selisih antara nominal deposito dengan jumlah uang yang disetor.

##### **5. Penempatan pada bank syariah**

Merupakan penempatan dana BPRS pada bank umum syariah, unit usaha syariah, dan BPR syariah dengan menggunakan akad syariah.

#### **e. Piutang**

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam pembiayaan murabahah, Bank sebagai penjual memberikan kuasa kepada nasabah atau pembeli untuk melakukan pembelian barang-barang yang dimaksud dan dikehendaki, menyerahkan uang pembayaran, menerima faktur pembelian/kwitansi dan menyerahkan faktur pembelian kepada Bank selaku pemberi kuasa. Pembiayaan murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pembiayaan Murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yakni saldo pembiayaan dengan memperhitungkan penyisihan kerugian. Margin murabahah yang ditanggihkan disajikan sebagai pos lawan pembiayaan murabahah.

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani'). Berdasarkan akad istishna', pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (mashnu') sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh.

#### **f. Pembiayaan**

Pembiayaan yang diberikan terdiri dari mudharabah dan musyarakah dinyatakan sebesar pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non - kas kepada pengelola dana dikurangi dengan penyisihan penghapusan pembiayaan.

Pembiayaan musyarakah yang diberikan dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, dan aset non kas dinilai sebagai nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan.

Pembiayaan mudharabah yang diberikan dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran, dan pembiayaan aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan, dan selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian, dan beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah kecuali telah disepakati bersama.

Pinjaman Qardh disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai tunai yang dapat direalisasikan. Pembiayaan yang mempunyai kemungkinan tak tertagih dibuatkan penyisihan penghapusannya.

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**f. Pembiayaan**

Pembiayaan ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah (akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa/ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri) tanpa perpindahan risiko manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (mujiir) kepada penyewa (musta'jir).

Bank menetapkan penyisihan kerugian (PPAP) sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan. Bank wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk ijarah atau Ijarah Muntahiyah bit Tamlik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ijarah disusutkan/diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan BPRS bagi aset yang sejenis.
- b. Ijarah Muntahiyah bit Tamlik disusutkan sesuai dengan masa sewa.

**g. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) / Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA)**

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) merupakan cadangan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian atas penurunan nilai aset produktif. Bank, terutama yang berasal dari pembiayaan dan piutang.

POJK Nomor 24 Tahun 2024 Bab IV Bagian Kesatu tentang PPKA, BPRS wajib menghitung PPKA berupa PPKA umum dan PPKA khusus untuk masing-masing Aset Produktif sebagai berikut:

<b>Kolektibilitas</b>	<b>%</b>	<b>Keterangan</b>
Lancar	0,50%	Dari pembiayaan lancar
Dalam Perhatian Khusus	3%	Setelah dikurangi nilai agunan yang diperhitungkan
Kurang Lancar	10%	Setelah dikurangi nilai agunan yang diperhitungkan
Diragukan	50%	Setelah dikurangi nilai agunan yang diperhitungkan
Macet	100%	Setelah dikurangi nilai agunan yang diperhitungkan

CKPN/PPKA disajikan sebagai pengurang nilai tercatat pembiayaan dan piutang dalam laporan posisi keuangan.

**h. Persediaan**

Yaitu persediaan barang-barang yang dimiliki perusahaan pada suatu tanggal tertentu baik diperoleh dari pembelian maupun proses operasional dengan maksud untuk kegiatan operasional perusahaan.

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**i. Aset Tetap dan Inventaris**

Aset tetap dan inventaris adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

Aset tetap dinyatakan berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) sesuai dengan taksiran masa manfaat ekonominya. Tarif penyusutan sebagai berikut:

Tarif penyusutan sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Tarif Penyusutan</b>
Bangunan Permanen	20	5%
Bangunan Semi Permanen	10	10%
Instalasi	8	12,5%
Inventaris Golongan I	4	25%
Inventaris Golongan II	8	12,5%

Aset tetap yang rusak atau tidak dapat dipergunakan lagi karena sebab-sebab normal disajikan terpisah dalam kelompok aset lain-lain. Pelaksanaan penghapusan dilakukan dengan Keputusan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Komisaris dan dibebankan sebagai biaya lain-lain.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba/rugi yang terjadi dibukukan sebagai pendapatan atau biaya pada periode bersangkutan.

**j. Aset Tidak Berwujud**

Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.

Aset tidak berwujud disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai (jika ada).

**k. Agunan Yang Diambil Alih**

Agunan Yang Diambil Alih adalah aset yang diperoleh BPRS, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi Liabilitasnya kepada BPRS. Selisih antara nilai aset yang diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat pelepasan aset.

**l. Pendapatan Yang Akan Diterima**

Pendapatan yang akan diterima merupakan pendapatan yang telah menjadi hak Perusahaan berdasarkan perjanjian yang berlaku namun belum diterima sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

Pendapatan yang akan diterima diakui pada saat hak atas pendapatan tersebut timbul sesuai dengan akad atau perjanjian yang mendasarinya, dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Perusahaan melakukan evaluasi atas kemungkinan tidak tertagihnya pendapatan yang akan diterima dan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai apabila terdapat indikasi penurunan nilai sesuai dengan kebijakan penurunan nilai aset keuangan.

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

**3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**m. Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

Aset Lain-lain disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka wajib disajikan tersendiri dalam neraca.

**n. Liabilitas Segera**

Liabilitas Segera adalah Liabilitas yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

**o. Utang Pajak**

Utang Pajak merupakan selisih kurang atas Liabilitas pajak penghasilan BPRS setelah memperhitungkan angsuran pajak atau pajak dibayar dimuka.

Utang Pajak disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

**p. Tabungan Wadiah**

Tabungan Wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendaki pemiliknya.

**q. Dana Syirkah Temporer**

Dana Syirkah Temporer adalah kewajiban bank kepada nasabah dan bank lain dalam bentuk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah dan mendapat bagi hasil setiap bulannya. Dana Syirkah Temporer dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada nasabah dan bank lain.

**r. Pembiayaan yang Diterima**

Pembiayaan yang Diterima adalah dana yang diterima dari bank umum, Bank Indonesia, atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

**s. Liabilitas Lain-lain**

Liabilitas Lain-lain diakui sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

Termasuk dalam Liabilitas Lain-lain antara lain dana yang diterima BPRS dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah.

## **PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### **3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **t. Modal**

##### **1. Modal Disetor**

- Modal Disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non-kas,
- Modal disetor dicatat berdasarkan:
  - a) Jumlah uang yang diterima,
  - b) Setoran dalam bentuk uang, sesuai transaksi nyata,
  - c) Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal
  - d) Setoran saham dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu nilai wajar yang disepakati RUPS
  - e) Nilai wajar aset non-kas yang diterima. Setoran saham dalam bentuk aset non-kas yang diserahkan, yaitu nilai *appraisal* tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris, atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris dan penyeter aset non-kas.
- Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Apabila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar daripada nilai nominalnya, maka selisihnya dibukukan pada akun agio saham

##### **2. Tambahan Modal Disetor (*Agio Saham*)**

- Tambahan Modal Disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pihak ketiga baik berupa dana kas maupun aset non-kas.
- Penambahan pos Tambahan Modal Disetor diakui pada saat:
  - a) dilakukan penambahan setoran kas oleh pemilik sebesar kas yang diterima;
  - b) dilakukan penambahan setoran aset non-kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang diterima.

##### **3. Modal Sumbangan**

- Modal Sumbangan diakui pada saat diterimanya sumbangan berupa kas atau aset non-kas dari pemilik,
- Modal sumbangan berupa kas dinilai sebesar kas yang diterima,
- Sumbangan berupa aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar aset non-kas yang diterima.

#### Dana Setoran Modal - Ekuitas

Dana Setoran Modal - Ekuitas (DSM - Ekuitas) adalah dana yang telah disetor secara riil ke rekening BPRS di bank umum dan diblokir untuk tujuan penambahan modal dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Dana setoran modal yang dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku direklasifikasi dari Liabilitas (DSM - Liabilitas) ke ekuitas (DSM - Ekuitas) sebesar jumlah dana yang memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku.

#### Surplus Revaluasi Aset Tetap

Surplus Revaluasi Aset Tetap adalah selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi.

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

**3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**u. Saldo Laba**

Saldo Laba (laba ditahan) adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah mempertimbangkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap.

Saldo laba dikelompokkan menjadi:

1. Cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto, setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan
2. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal, dan
3. Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari:
  - Laba rugi periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya, dan
  - Laba rugi periode berjalan

**v. Pendapatan Operasional**

Pendapatan Operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPRS. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bagi hasil dan pendapatan operasional lainnya.

Pendapatan Operasional Lainnya adalah berbagai pendapatan yang timbul dari aktivitas yang mendukung kegiatan operasional BPRS.

**w. Beban Operasional**

Beban Operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPRS.

Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan Liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

**x. Pendapatan Non-Operasional**

Pendapatan Non-Operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPRS.

**y. Beban Non-Operasional**

Beban Non-Operasional adalah semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPRS.

**z. Taksiran Pajak Penghasilan**

Taksiran Pajak Penghasilan adalah jumlah agregat beban pajak kini yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu periode.

Beban Pajak Kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, terdapat Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021.

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**aa. Aset Hak Guna**

Perusahaan mengakui aset hak guna atas sewa apabila kontrak sewa memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset selama periode waktu tertentu sebagai imbalan atas pembayaran.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak guna sebesar biaya perolehan, yang meliputi jumlah pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima, jika ada.

Sehubungan dengan kebijakan Perusahaan, pembayaran sewa dilakukan di muka untuk seluruh masa sewa sehingga Perusahaan tidak mengakui liabilitas sewa. Aset hak guna diakui sebesar nilai pembayaran sewa dimuka tersebut.

Aset hak guna selanjutnya diukur menggunakan model biaya, yaitu sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada.

Penyusutan aset hak guna dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu sewa atau masa manfaat aset, mana yang lebih pendek.

Perusahaan mengevaluasi penurunan nilai atas aset hak guna apabila terdapat indikasi bahwa nilai tercatat aset mungkin tidak dapat dipulihkan.

**bb. Liabilitas Imbalan Pascakerja**

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan pascakerja kepada karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

Liabilitas imbalan pascakerja dihitung berdasarkan penilaian aktuarial dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* yang dilakukan oleh aktuaris independen pada setiap akhir periode pelaporan.

Dalam perhitungan aktuarial tersebut, Perusahaan hanya memperhitungkan dana pesangon yang dikelola melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai aset program, sedangkan cadangan imbalan kerja yang sebelumnya dibentuk secara internal oleh manajemen tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas imbalan pascakerja.

Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal pelaporan setelah dikurangi dengan nilai wajar aset program yang memenuhi kriteria sesuai standar akuntansi yang berlaku.

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)***1. KAS**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Kas</b>		
Kas Tunai	3.186.708.500	3.180.033.000
<b>Jumlah</b>	<b>3.186.708.500</b>	<b>3.180.033.000</b>

**2. PENEMPATAN PADA BANK LAIN**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>a. Giro pada Bank Lain</b>		
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	204.417.045	90.357.300
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	18.397.719
<b>Jumlah</b>	<b>204.417.045</b>	<b>108.755.019</b>
<b>b. Tabungan pada Bank Lain</b>		
PT Bank Sumsel Babel Syariah	20.504.664.867	17.904.824.600
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	19.886.346.762	7.949.355.943
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	491.638.153	2.812.867.594
PT Bank Permata Syariah	116.832.709	77.939.453
<b>Jumlah</b>	<b>40.999.482.491</b>	<b>28.744.987.591</b>
<b>c. Deposito pada Bank Lain</b>		
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	35.000.000.000	18.000.000.000
PT Bank Permata Syariah	23.000.000.000	18.000.000.000
PT BPR Syariah Bangka	21.250.000.000	35.500.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>79.250.000.000</b>	<b>71.500.000.000</b>
<b>Total</b>	<b>120.453.899.536</b>	<b>100.353.742.610</b>

Penempatan pada bank lain merupakan dana yang ditempatkan pada bank umum dalam bentuk giro dan/atau tabungan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Bank.

Dalam pengelolaan risiko atas penempatan tersebut, Bank mempertimbangkan ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, termasuk batas maksimum nilai simpanan yang dijamin dan tingkat bunga penjaminan yang berlaku. Bank memastikan bahwa penempatan dana dilakukan pada bank yang memenuhi kriteria penjaminan serta memperhatikan batas maksimum simpanan yang dijamin oleh LPS.

Bank telah melakukan evaluasi atas eksposur penempatan pada bank lain dengan mempertimbangkan porsi dana yang dijamin dan yang tidak dijamin oleh LPS. Atas bagian penempatan yang tidak dijamin, Bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara memadai sesuai dengan kebijakan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian.

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)***3. PIUTANG DAN PEMBIAYAAN****a. Piutang**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Piutang Murabahah</b>		
Piutang Murabahah	142.602.761.466	153.841.566.691
Piutang Murabahah Iregular	3.495.212.030	5.008.274.442
Piutang Murabahah KPR Karyawan	3.430.499.771	4.556.390.150
Piutang Murabahah Karyawan	597.352.783	1.076.925.468
<b>Jumlah</b>	<b>150.125.826.051</b>	<b>164.483.156.751</b>
<b>Margin yang ditangguhkan</b>		
Piutang Murabahah	(37.678.857.618)	(41.275.241.881)
Piutang Murabahah Iregular	(881.148.936)	(1.149.737.366)
Piutang Murabahah KPR Karyawan	(574.352.251)	(803.877.437)
Piutang Murabahah Karyawan	(101.729.867)	(142.105.963)
<b>Jumlah</b>	<b>110.889.737.380</b>	<b>121.112.194.105</b>
<b>Piutang Multijasa</b>		
Piutang Multijasa	53.216.638	278.296.433
Piutang Multijasa Karyawan	20.126.654	40.966.658
Piutang Multijasa Irregular	11.097.475	69.196.475
<b>Jumlah</b>	<b>84.440.767</b>	<b>388.459.566</b>
<b>Margin yang ditangguhkan</b>		
Piutang Multijasa	(20.883.319)	(89.374.900)
Piutang Multijasa Karyawan	(2.435.000)	(4.925.000)
Piutang Multijasa Irregular	-	(21.000.000)
<b>Jumlah</b>	<b>61.122.448</b>	<b>273.159.666</b>

**b. Pembiayaan**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Pembiayaan Musyarakah</b>		
Pembiayaan Musyarakah	10.803.472.943	17.148.821.783
<b>Jumlah</b>	<b>10.803.472.943</b>	<b>17.148.821.783</b>
<b>Total</b>	<b>121.754.332.771</b>	<b>138.534.175.554</b>

**c. Piutang dan Pembiayaan Berdasarkan Kolektibilitas**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Kolektibilitas</b>		
Kolektibilitas 1 - Lancar	84.787.674.279	90.478.892.774
Kolektibilitas 2 - Dalam Perhatian Khusus	14.597.527.062	14.151.296.267
Kolektibilitas 3 - Kurang Lancar	2.440.424.406	1.461.071.348
Kolektibilitas 4 - Diragukan	2.296.551.766	1.897.908.216
Kolektibilitas 5 - Macet	17.632.155.258	30.545.006.949
<b>Jumlah</b>	<b>121.754.332.771</b>	<b>138.534.175.554</b>

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)***3. PIUTANG DAN PEMBIAYAAN****d. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>a. Cadangan Umum</b>		
Penempatan Pada Bank Lain	(464.811.307)	-
Piutang	(413.346.802)	(421.477.722)
Pembiayaan	(10.341.454)	(30.032.220)
Piutang Transaksi Multijasa	(250.125)	(884.546)
IMBT	(1.335.936)	(1.361.866)
<b>b. Cadangan Khusus</b>		
Piutang	(1.165.247.094)	(6.888.978.477)
Pembiayaan	(298.948.643)	(3.492.662.039)
Piutang Transaksi Multijasa	-	(21.410.000)
IMBT	(47.460.507)	(341.463.673)
<b>Total</b>	<b>(2.401.741.867)</b>	<b>(11.198.270.543)</b>

Berdasarkan SAK – EP yang mulai berlaku per 1 Januari 2025, akun Penyisihan Penghapusan Kerugian Aset berubah menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), meskipun untuk pengimplementasian perhitungan CKPN baru berlaku per tahun 2027 untuk BPRS.

**4. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA)**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>AYDA Tanah dan Bangunan</b>		
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun	9.071.705.409	10.120.594.763
Lebih dari 5 tahun	2.523.575.792	3.603.324.988
<b>Jumlah</b>	<b>11.595.281.201</b>	<b>13.723.919.751</b>

Agunan yang diambil alih (AYDA) merupakan aset yang diperoleh Perusahaan dari hasil penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pengambilalihan agunan dari nasabah.

AYDA dinyatakan sebesar nilai yang dapat direalisasikan, yaitu nilai tercatat setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjual atau menyelesaikan aset tersebut. Perusahaan melakukan evaluasi secara berkala atas nilai tercatat AYDA dan membentuk cadangan penurunan nilai apabila terdapat indikasi bahwa nilai tercatat melebihi nilai yang dapat direalisasikan.

Perusahaan terus melakukan upaya penyelesaian dan penjualan AYDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meminimalkan risiko penurunan nilai serta mempercepat realisasi aset.



**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)***5. ASET TETAP****Aset Renovasi Kantor Sewa**

Perusahaan melakukan pengeluaran untuk renovasi atas bangunan kantor yang disewa dari pihak ketiga guna menunjang kegiatan operasional. Pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari aset tetap karena memenuhi kriteria pengakuan aset, yaitu memiliki manfaat ekonomis di masa depan dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Aset renovasi atas bangunan sewa disajikan sebagai bagian dari aset tetap – renovasi bangunan sewa dan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya renovasi atas bangunan sewa diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode yang lebih pendek antara masa manfaat ekonomis aset renovasi dan sisa masa sewa bangunan, termasuk periode perpanjangan sewa apabila terdapat kepastian yang memadai bahwa perpanjangan tersebut akan dilakukan.

Perusahaan tidak memiliki kepemilikan atas bangunan yang disewa, namun memiliki hak untuk menggunakan dan memperoleh manfaat ekonomis dari hasil renovasi selama masa sewa.

**6. ASET HAK GUNA**

	2025				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
<b>Harga perolehan</b>					
Sewa Gedung					
Kantor	-	-	-	1.471.000.000	1.471.000.000
<b>Jumlah Harga Perolehan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.471.000.000</b>	<b>1.471.000.000</b>
<b>Akumulasi Amortisasi</b>					
Sewa Gedung					
Kantor	-	-	-	527.240.278	527.240.278
<b>Jumlah Harga Perolehan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>527.240.278</b>	<b>527.240.278</b>
<b>Nilai Buku</b>					
<b>Aset Hak Guna</b>	<b>-</b>				<b>943.759.722</b>

**Aset Hak Guna**

Perusahaan memiliki perjanjian sewa atas aset berupa bangunan/gedung yang digunakan untuk kegiatan operasional. Sehubungan dengan penerapan SAK Entitas Privat, Perusahaan mengakui aset hak guna atas perjanjian sewa tersebut.

Pembayaran sewa dilakukan di muka (*prepaid*) untuk seluruh masa sewa, sehingga Perusahaan tidak mengakui liabilitas sewa karena tidak terdapat kewajiban pembayaran sewa di masa mendatang pada tanggal pelaporan.

Aset hak guna diakui sebesar jumlah pembayaran sewa yang dilakukan di muka dan diamortisasi selama masa manfaat atau jangka waktu sewa, mana yang lebih pendek.

Perusahaan mengungkapkan bahwa perlakuan akuntansi atas transaksi ini didasarkan pada substansi ekonomi perjanjian sewa. Apabila di masa mendatang terdapat perubahan kondisi perjanjian yang menimbulkan kewajiban pembayaran tambahan, maka Perusahaan akan melakukan penyesuaian atas pengakuan liabilitas sewa sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)***7 ASET TIDAK BERWUJUD**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
SOP & Sistem Aplikasi	1.573.047.654	1.586.442.658
Amortisasi	(1.573.047.631)	(1.586.442.628)
<b>Nilai Buku Bersih</b>	<b>23</b>	<b>30</b>

**8 PENDAPATAN YANG AKAN DITERIMA**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Sewa	1.960.851.514	1.521.118.536
Pendapatan Ujroh	1.317.640.771	1.077.414.441
Pendapatan yang akan diterima lainnya	1.250.119.412	1.157.136.737
<b>Jumlah</b>	<b>4.528.611.697</b>	<b>3.755.669.714</b>

**9. ASET LAIN - LAIN**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>a. Persediaan</b>		
Persediaan ATK & Barang Cetak	222.969.779	325.178.349
Persediaan Materai	800.000	770.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b>223.769.779</b>	<b>325.948.349</b>
<b>b. Biaya dibayar di muka</b>		
Sewa dibayar di muka	4.125.000	660.494.426
Pajak dibayar di muka	16.719.628	18.674.428
Asuransi dibayar di muka	19.470.390	17.891.728
<b>Sub Jumlah</b>	<b>40.315.018</b>	<b>697.060.582</b>
<b>c. Lain - lain</b>		
Tagihan AYDA kepada nasabah	203.566.000	-
Lain - lain	33.144.085	155.323.801
<b>Sub Jumlah</b>	<b>236.710.085</b>	<b>155.323.801</b>
<b>Total</b>	<b>500.794.882</b>	<b>1.178.332.732</b>

**10. UTANG PAJAK**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
PPh Pasal 4 (2) Deposito	170.816.092	156.815.163
PPh Pasal 4 (2) Tabungan	62.672.955	63.516.421
PPh Pasal 21 Karyawan	24.668.401	-
<b>Jumlah</b>	<b>258.157.448</b>	<b>220.331.584</b>

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)***11. TABUNGAN WADIAH**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Tabungan Wadiah Perorangan		
Pihak ketiga	462.548.965	404.954.965
Pihak berelasi ( <i>Catatan 25</i> )	6.500.000.000	6.500.000.000
Tabungan Wadiah Pembiayaan	3.195.612.594	2.251.520.320
Tabungan Wadiah Perusahaan/Lembaga	30.000.000	25.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>10.188.161.559</b>	<b>9.181.475.286</b>

Berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 018/SE-Dir/BSB/IX/2023 tanggal 22 September 2023, PT BPRS Bangka Belitung melakukan migrasi produk Tabungan IB Pembiayaan menjadi Tabungan Wadiah Pembiayaan yang berlaku efektif setelah pembukuan melewati tanggal 19 September 2023. Sehubungan dengan perubahan akad menjadi wadiah, tidak terdapat pembagian hasil (nisbah) yang dikenakan, dan tabungan lama dengan status tidak aktif secara otomatis dimigrasikan menjadi Tabungan Wadiah Pembiayaan.

**12. DANA SYIRKAH TEMPORER**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>a. Tabungan Mudharabah</b>		
Tabungan Mudharabah Hidayah ( <i>Catatan 25</i> )	139.170.960.752	146.941.301.831
Tabungan Mudharabah Pendidikan	2.071.867.265	2.265.984.396
Tabungan Mudharabah Pembiayaan	6.898.391.455	8.360.681.522
Simpanan Pelajar IB	2.874.920.479	2.892.464.961
<b>Jumlah</b>	<b>151.016.139.951</b>	<b>160.460.432.710</b>
<b>b. Deposito Mudharabah</b>		
Deposito Berjangka 1 Bulan	5.422.600.000	6.272.600.000
Deposito Berjangka 3 Bulan	17.130.500.000	23.864.000.000
Deposito Berjangka 6 Bulan	28.967.500.000	29.025.700.000
Deposito Berjangka 12 Bulan	111.811.095.000	94.277.905.000
<b>Jumlah</b>	<b>163.331.695.000</b>	<b>153.440.205.000</b>
<b>Total</b>	<b>314.347.834.951</b>	<b>313.900.637.710</b>

Berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 018/SE-Dir/BSB/IX/2023 tanggal 22 September 2023, Tabungan Mudharabah Pembiayaan ditetapkan sebagai tabungan migrasi yang pelaksanaannya masih tertunda hingga waktu yang belum ditentukan. Pembukaan tabungan setelah tanggal 20 September 2023 secara otomatis dicatat sebagai Tabungan Wadiah Pembiayaan tanpa pembagian hasil, sedangkan pembukaan tabungan sebelum tanggal tersebut yang masih berstatus aktif tetap tercatat sebagai Tabungan Mudharabah Pembiayaan.

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)***13. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA**

Besarnya imbalan pascakerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang dibentuk atas imbalan kerja jangka panjang tersebut.

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung membukukan imbalan pascakerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pascakerja tersebut adalah 156 karyawan tetap dan 20 karyawan kontrak di tahun 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2025, perhitungan imbalan pascakerja masing-masing dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Nirmala, aktuaris independen, dalam laporannya bertanggal 10 Februari 2026.

Jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	<b>2025</b>
<b>Jumlah yang diakui di laba rugi</b>	
Biaya jasa kini	423.542.776
Bunga dampak atas batas atas aset	(290.612.472)
Biaya jasa lalu, selisih imbalan kerja dan perubahan manfaat	3.608.910.205
<b>Beban yang Diakui dalam Laporan Laba Rugi</b>	<b>3.741.840.509</b>
<b>Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti</b>	
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari:	
Biaya jasa kini	423.542.776
Biaya jasa lalu	2.872.344.392
Perubahan program manfaat	8.433.333
Selisih imbalan kerja yang di catatan pada beban Realisasi imbalan yang dibayarkan	736.565.813
Realisasi imbalan yang dibayarkan	(744.999.146)
<b>Nilai Sekarang Kewajiban Imbalan Pasti</b>	<b>3.295.887.168</b>
<b>Jumlah yang diakui di Penghasilan Komprehensif Lain (OCI)</b>	
Kerugian aktuarial pada batas atas aset	
<b>Beban pada penghasilan komprehensif lain</b>	<b>1.108.306.645</b>
<b>Laporan posisi keuangan</b>	
Nilai sekarang kewajiban imbalan pasti	3.295.887.168
Nilai wajar aset program	(4.366.522.884)
Dampak batas atas aset	1.108.306.645
<b>Liabilitas pada laporan posisi keuangan</b>	<b>37.670.929</b>

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

	<b>2025</b>
Tingkat diskonto	6,45% dan 4,58%
Tingkat kenaikan gaji	2,00%
Tingkat kematian	TMI IV
Usia pensiun normal	55 Tahun

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)***13. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA**

Analisis sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas pada 31 Desember 2025, imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

**Karyawan Tetap**

		2025	
		Dampak terhadap Kenaikan (Penurunan) liabilitas imbalan kerja Jangka Panjang	
	Perubahan Asumsi	Kenaikan Asumsi	Penurunan Asumsi
Tingkat diskonto	1%	2.996.331.587	3.555.483.882
Kenaikan upah	1%	3.551.386.604	3.068.524.179

**Karyawan Kontrak**

		2025	
		Dampak terhadap Kenaikan (Penurunan) liabilitas imbalan kerja Jangka Panjang	
	Perubahan Asumsi	Kenaikan Asumsi	Penurunan Asumsi
Tingkat diskonto	1%	37.570.349	37.772.894
Kenaikan upah	1%	37.670.929	37.670.929

Pada tahun 2025, Perusahaan untuk pertama kalinya menggunakan jasa aktuaris independen dalam menghitung kewajiban imbalan pascakerja sesuai dengan ketentuan SAK Entitas Privat. Perhitungan aktuaris dilakukan untuk menilai nilai kini kewajiban imbalan pasti serta nilai wajar aset program yang terkait dengan dana pesangon karyawan.

Perhitungan aktuaris tersebut hanya memperhitungkan dana pesangon yang dikelola melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat Syariah. Cadangan imbalan kerja yang sebelumnya dibentuk secara internal oleh manajemen tidak diperhitungkan dalam laporan aktuaris. Hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi dengan standar akuntansi yang berlaku serta memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kewajiban imbalan kerja Perusahaan.

Sebagai akibat dari penerapan perhitungan aktuaris, Perusahaan mengakui:

- Liabilitas imbalan kerja sebesar Rp37.670.929 pada laporan posisi keuangan,
- Beban imbalan kerja sebesar Rp3.741.840.509 pada laporan laba rugi, serta
- Kerugian aktuarial sebesar Rp1.108.306.645 pada penghasilan komprehensif lain.

Pengungkapan ini mencerminkan perubahan kebijakan pengelolaan imbalan kerja dari sebelumnya berbasis kontribusi ke DPLK menjadi pengakuan kewajiban imbalan pasti berdasarkan hasil perhitungan aktuaris.

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)***14. LIABILITAS LAIN-LAIN**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Cadangan pesangon karyawan	1.634.523.254	1.775.908.991
Cadangan pesangon pengurus	578.325.041	876.725.971
Cadangan Dana Pendidikan & Pelatihan	220.934.099	135.163.887
Kewajiban Segera	87.833.933	43.070.159
Titipan Pelunasan AYDA	84.000.000	84.000.000
Cadangan Aktivitas Karyawan	69.500.000	20.150.000
Cadangan RUPS	32.032.000	30.000.000
PIP Kendaraan Bermotor	15.345.000	25.900.000
Cadangan CKPN	2.062.750	300.000.000
Cadangan Penilaian Jaminan	175.000.000	-
Cadangan KAP	40.000.000	-
Cadangan Pakaian Seragam	21.150.000	-
Cadangan Kurban	14.285.716	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.974.991.793</b>	<b>3.290.919.008</b>

**15. PENDAPATAN BAGI HASIL**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>a. Pendapatan Bagi Hasil Kontraktual</b>		
Pendapatan Margin Multijasa	54.865.671.965	45.290.262.022
Pendapatan Margin Murabahah	21.465.533.158	19.740.835.134
Pendapatan Bagi Hasil Deposito	3.815.572.233	4.456.809.938
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	328.803.835	330.357.150
Pendapatan Bagi Hasil Giro & Tabungan	304.464.606	201.575.619
Pendapatan Bagi Hasil Ijarah	240.226.330	492.869.763
<b>Sub Jumlah</b>	<b>81.020.272.126</b>	<b>70.512.709.626</b>
<b>b. Pendapatan Provisi dan Administrasi</b>		
Pendapatan Provisi dan Administrasi	22.500.000	32.700.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b>22.500.000</b>	<b>32.700.000</b>
<b>Total</b>	<b>81.042.772.126</b>	<b>70.545.409.626</b>

**16. BEBAN BAGI HASIL**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Beban Bagi Hasil Kontraktual		
Beban Bagi Hasil Deposito Mudharabah	9.257.825.106	7.766.387.648
Beban Bagi Hasil Mudharabah	3.973.265.571	3.600.793.071
Beban Premi Penjaminan Dana Pihak Ketiga	631.827.776	617.221.215
<b>Jumlah</b>	<b>13.862.918.453</b>	<b>11.984.401.934</b>

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)***17. PENDAPATAN OPERASIONAL LAIN - LAIN**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Pendapatan Pemulihan CKPN	11.043.709.371	2.912.973.268
Imbalan Antar Kantor	7.757.931.724	7.364.522.723
Pendapatan Administrasi Simpanan	1.613.741.994	2.318.166.712
Pendapatan Komisi Asuransi Kendaraan	99.394.759	981.500
Pendapatan Komisi Asuransi Jiwa	90.949.578	85.215.661
Pendapatan Komisi Lain - Lain	13.554.285	9.156.810
Pendapatan Komisi Notaris	6.007.000	5.230.000
Pendapatan Jasa Transfer Bank Lain - Lain	1.430.000	1.290.000
Keuntungan Penjualan Ayda	1.278.084	-
Pendapatan Ganti Buku	1.060.000	1.120.000
Pendapatan Adm Tutup Rekening	461.000	812.000
Lain - Lain	-	516.060.261
<b>Jumlah</b>	<b>20.629.517.794</b>	<b>13.215.528.935</b>

**18. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
CKPN Piutang	6.329.461.181	16.949.983.255
CKPN Pembiayaan	4.455.662.352	9.320.075.466
CKPN Antar Bank	498.150.411	-
CKPN Ijarah	420.341.874	345.590.892
CKPN Jasa/ Pembiayaan Lain - Lain	4.015.938	964.177.906
CKPN Penghapusan Aset Produk	2.062.750	750.312.200
<b>Jumlah</b>	<b>11.709.694.505</b>	<b>28.330.139.719</b>

**19. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Beban Amortisasi Aset Lain - Lain	39.376.800.220	33.160.386.577
Beban Penyusutan Aset Tetap	974.521.215	797.810.219
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	65.756.905
<b>Jumlah</b>	<b>40.351.321.435</b>	<b>34.023.953.701</b>

**20. BEBAN PEMASARAN**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Beban Iklan dan Promosi	50.924.189	33.040.950
<b>Jumlah</b>	<b>50.924.189</b>	<b>33.040.950</b>

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)***21. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Beban Gaji Dan Upah	17.365.748.804	15.561.618.560
Beban Tenaga Kerja	5.134.091.010	1.611.442.569
Beban Sewa	1.022.353.137	1.257.193.815
Beban Iuran Berlangganan	523.569.202	536.476.516
Beban Pendidikan & Pelatihan	500.835.665	426.419.475
Beban Penggantian Bensin	377.579.925	390.569.000
Beban Perawatan & Perbaikan	306.617.540	387.756.354
Beban Percetakan	266.018.995	132.556.534
Beban Barang & Jasa	202.606.559	155.523.940
Beban Premi Asuransi	182.261.444	190.315.005
Beban Pemeliharaan & Perbaikan	170.609.013	119.401.852
Beban Perlengkapan Kantor	162.547.605	150.284.465
Beban Perjalanan Dinas	133.845.581	67.788.083
Beban Rapat	41.468.150	35.123.400
Beban Pajak (Non PPh)	39.605.288	41.095.107
Beban Transport & Ekspedisi	26.684.190	17.928.580
Beban Iuran Kenggotaan	8.400.000	6.600.000
<b>Jumlah</b>	<b>26.464.842.108</b>	<b>21.088.093.255</b>

**22. BEBAN OPERASIONAL LAIN - LAIN**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Beban Sumbangan	123.885.716	104.200.000
Beban RUPS & RUPSLB	30.000.000	75.188.000
Beban Retribusi	6.430.000	5.780.000
Beban Kepada Bank Lain	4.894.675	-
Beban Kebersihan	3.400.000	3.600.000
Beban Keamanan	1.500.000	1.440.000
Beban Parkir	1.148.500	888.000
Beban Ops Lainnya	10.004	-
<b>Jumlah</b>	<b>171.268.895</b>	<b>191.096.000</b>

**23. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>a. Pendapatan Non Operasional</b>		
Pendapatan Hapus Buku	2.647.304.223	788.276.024
Laba Penjualan Aktiva Tetap	199.306.134	8.999.966
Pendapatan Non Operasional Lain - Lain	541.747.603	160.999.121
<b>Jumlah</b>	<b>3.388.357.960</b>	<b>958.275.111</b>
<b>b. Beban Non Operasional</b>		
Beban Non Operasional Utama	7.792.098.724	7.408.010.723
Beban Non Operasional Lain - Lain	577.780.551	643.469.757
<b>Jumlah</b>	<b>8.369.879.275</b>	<b>8.051.480.480</b>
<b>Total</b>	<b>(4.981.521.315)</b>	<b>(7.093.205.369)</b>

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)***24. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Laba (Rugi) sebelum pajak</b>	<b>4.079.799.019</b>	<b>(18.982.992.367)</b>
<b>Koreksi fiskal positif</b>		
Beban aktivitas karyawan	13.030.000	-
Beban sumbangan	123.885.716	-
Beban non operasional utama - souvenir dan hadiah	26.567.000	-
Beban non operasional utama - denda dan sanksi	7.600.000	-
<b>Laba (Rugi) fiskal</b>	<b>4.250.881.735</b>	<b>(18.982.992.367)</b>
<b>Kompensasi rugi fiskal</b>		
Tahun 2019	-	(7.553.317.352)
Tahun 2021	(256.802.111)	(256.802.111)
Tahun 2022	(13.617.405.026)	(13.617.405.026)
Tahun 2024	(18.982.992.367)	-
<b>Jumlah akumulasi rugi fiskal</b>	<b>(32.857.199.504)</b>	<b>(21.427.524.489)</b>
<b>Laba (Rugi) fiskal setelah kompenasi kerugian Pajak kini</b>	<b>(28.606.317.769)</b>	<b>(40.410.516.856)</b>
	<u>-</u>	<u>-</u>

Perusahaan membukukan laba fiskal sebesar Rp4.250.881.735 yang telah dikompensasikan dengan rugi fiskal tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemanfaatan rugi fiskal dilakukan dengan metode urutan tahun terjadinya rugi (*first-in first-out*).

Sebagian rugi fiskal tahun 2019 sebesar Rp7.553.317.352 tidak dapat dimanfaatkan dan telah kedaluwarsa pada tahun pajak 2024, sehingga tidak dapat lagi dikompensasikan pada tahun pajak berikutnya.

Setelah memperhitungkan kompensasi rugi fiskal sampai dengan tahun pajak 2025, saldo rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan adalah sebesar Rp28.606.317.769.

**25. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

Perusahaan memiliki hubungan pihak berelasi dengan Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham mayoritas Perusahaan, yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Walaupun mayoritas saham dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan secara hukum masih berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) dan belum ditetapkan sebagai Perusahaan Daerah (Perseroda). Oleh karena itu, hubungan tersebut diklasifikasikan sebagai hubungan pihak berelasi sesuai dengan SAK EP BAB 33: Pihak Berelasi.

Pihak berelasi Perusahaan meliputi:

1. Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham
2. Entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah
3. Manajemen kunci Perusahaan (Direksi dan Dewan Komisaris)

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)***25. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

**Sifat hubungan dengan pihak berelasi**

<b>Pihak Berelasi</b>	<b>Sifat Hubungan</b>	<b>Jenis Transaksi</b>
1. Pemerintah Kota Pangkalpinang	Pemegang saham mayoritas	Penyertaan modal sesuai Perda
2. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	Pemegang saham mayoritas sekaligus program kerja sama	Penyertaan modal, Dukungan dana UMKM (simpanan wadiah Disperindagkop dan UMKM), Kerja sama pembiayaan UMKM
3. Pemerintah Kabupaten Bangka	Pemegang saham	Penyertaan modal sesuai Perda
4. Pemerintah Kabupaten Belitung	Pemegang saham	Penyertaan modal sesuai Perda
5. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	Pemegang saham	Penyertaan modal sesuai Perda
6. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemegang saham	Penyertaan modal sesuai Perda
7. Yayasan Kesejahteraan Pensiunan Timah	Pemegang saham minoritas	Penyertaan modal
8. Yayasan Peduli Koba	Pemegang saham minoritas	Penyertaan modal dan Tabungan Mudharabah Hidayah

**Transaksi dengan Pihak Berelasi**

	<b>2025</b>	<b>Persentase Aset/Liabilitas</b>
Tabungan Wadiah ( <i>Catatan 11</i> ) Diperindagkop UMKM Kab. Bateng	6.500.000.000	2%
Dana Syirkah Temporer ( <i>Catatan 12</i> ) Tabungan Mudharabah Hidayah Yayasan Peduli Koba	162.255.467	0%

**26. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Manajemen PT BPRS Bangka Belitung bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 yang diselesaikan pada tanggal 30 April 2026.

## **LAMPIRAN - INFORMASI TAMBAHAN**

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG****LAPORAN SUMBER DANA DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN**

Per 31 Desember 2025 dan 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>SUMBER DANA KEBAJIKAN</b>		
Pendapatan Non Halal	23.198.598	15.413.859
<b>JUMLAH SUMBER DANA KEBAJIKAN</b>	<b>23.198.598</b>	<b>15.413.859</b>
<b>PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN</b>		
Sumbangan / Bantuan	(25.300.000)	(14.901.000)
<b>JUMLAH PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN</b>	<b>(25.300.000)</b>	<b>(14.901.000)</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) SUMBER DANA ZAKAT</b>	(2.101.402)	512.859
<b>SALDO AWAL DANA KEBAJIKAN</b>	<b>2.760.995</b>	<b>2.248.136</b>
<b>SALDO AKHIR DANA KEBAJIKAN</b>	<b>659.593</b>	<b>2.760.995</b>

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG****LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT**

Per 31 Desember 2025 dan 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>SUMBER DANA ZAKAT</b>		
Zakat dari Bank Syariah	108.570.966	112.414.870
Zakat dari THR Karyawan	51.163.226	9.227.468
<b>JUMLAH SUMBER DANA ZAKAT</b>	<b>159.734.192</b>	<b>121.642.338</b>
<b>PENYALURAN DANA ZAKAT</b>		
Sumbangan / Bantuan	(9.500.000)	(4.000.000)
Buka Rek siswa kurang mampu	(6.360.000)	
Paket Sembako	(53.047.500)	(97.920.000)
Kegiatan Khitanan Masal	(21.800.000)	(26.500.000)
Kegiatan santunan Anak Yatim, Fakir Miskin dan Dhuafa	(27.700.000)	
<b>JUMLAH PENYALURAN DANA ZAKAT</b>	<b>(118.407.500)</b>	<b>(128.420.000)</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) DANA ZAKAT</b>	<b>41.326.692</b>	<b>(6.777.662)</b>
<b>SALDO AWAL DANA ZAKAT</b>	<b>43.065.788</b>	<b>49.843.450</b>
<b>SALDO AKHIR DANA ZAKAT</b>	<b>84.392.480</b>	<b>43.065.788</b>

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG****LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN INFAQ DAN SHADAQAH**

Per 31 Desember 2025 dan 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>SUMBER DANA INFAQ &amp; SHADAQAH</b>		
Infaq & Shadaqah	39.705.000	44.455.000
<b>JUMLAH SUMBER DANA INFAQ DAN SHADAQAH</b>	<b>39.705.000</b>	<b>44.455.000</b>
<b>PENYALURAN DANA INFAQ &amp; SHODAQAH</b>		
Sumbangan / Bantuan	(41.900.000)	(28.100.000)
Pembuatan Kaos untuk Pekerja Sosial Masyarakat PKP	(4.940.000)	-
Kegiatan Keagamaan	(500.000)	-
Bantuan biaya berobat pasien kurang mampu an Erzaka	-	(15.000.000)
Lainnya (Biaya Pembuatan & Ops SPPT PBB)	(520.000)	(2.000.000)
<b>JUMLAH PENYALURAN INFAQ &amp; SHODAQAH</b>	<b>(47.860.000)</b>	<b>(45.100.000)</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) DANA INFAQ &amp; SHADAQAH</b>	(8.155.000)	(645.000)
<b>SALDO AWAL DANA ZAKAT</b>	<b>14.337.715</b>	<b>14.982.715</b>
<b>SALDO AKHIR DANA ZAKAT</b>	<b>6.182.715</b>	<b>14.337.715</b>

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG**

**MANAGEMENT LETTER**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2025**

## MANAGEMENT LETTER

Laporan No.00081/2.1061/ML.8/07/1080-1/1/IV/2026

Yth. Pemegang Saham, Dewan Pengurus, dan Dewan Pengawas Syariah

### BPRS Bangka Belitung

Sehubungan dengan pelaksanaan audit atas laporan keuangan BPRS Bangka Belitung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, kami telah melakukan pemahaman dan evaluasi terbatas atas sistem pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Sebagai bagian dari proses audit tersebut, kami mengidentifikasi beberapa hal yang, menurut pandangan kami, masih dapat ditingkatkan guna memperkuat efektivitas pengendalian internal serta mendukung penyajian laporan keuangan yang lebih andal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal-hal tersebut kami sampaikan dalam Management Letter ini untuk menjadi perhatian dan bahan pertimbangan manajemen.

#### 1. Kekurangan Pembentukan PPAP/PPKA Pembiayaan

##### Kondisi

No.	Akad Pembiayaan	nama	Kualitas	PPAP yang Dibentuk	PPAP Audit	Kekurangan PPAP
1	Murabahah	Oktavia Heriyanti	5	10.000.000	48.358.338	(38.358.338)
2	Murabahah Efektif	Qhelvin Arief Setyawan	4	21.603.929	43.207.858	(21.603.929)
3	IMBT	Muhammad Zuliandi	5	10.000	4.718.070	(4.708.070)
4	IMBT	Edi Santoso	4	10.000	2.094.000	(2.084.000)
5	IMBT	Selvitriani	5	10.000	5.902.662	(5.892.662)
6	IMBT	Ariyanto	4	10.000	299.390	(289.390)
7	IMBT	Ahirudin	3	10.000	79.837	(69.837)
<b>Jumlah Kurang Catat PPAP 2025</b>						<b>(73.006.225)</b>

Berdasarkan hasil pengujian atas pembiayaan murabahah dan IMBT per 31 Desember 2025, kami menemukan bahwa entitas belum membentuk PPAP/PPKA secara memadai sesuai dengan kualitas pembiayaan.

Dari hasil rekalkulasi auditor, terdapat kekurangan pembentukan PPAP sebesar Rp73.006.225, dengan rincian antara lain:

- Pembiayaan IMBT hanya dibentuk PPAP dalam jumlah sangat kecil (misalnya Rp10.000)
- Terdapat selisih antara PPAP yang dibentuk dengan hasil perhitungan auditor

## Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan

Registered Public Accountants

Fatmawati Festival Blok B 11 - Jl. RS Fatmawati No. 50 , Jakarta 12430  
Phone : +62 21 751 4054 | Fax : +62 21 - 751 4054 | Email : office@kapslr.co.id  
www.kapslr.co.id

License No : 227 / KM.1 / 2016



Independent Affiliated of  
**UC&CS AMERICA**  
www.uccs-america.org  
Accounting Legal and Business Advisors  
A Strategic Alliance  
New York Mexico



## 1. Kekurangan Pembentukan PPAP/PPKA Pembiayaan – lanjutan

### Kriteria

POJK No. 24 Tahun 2024

tentang *Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat Syariah*, antara lain:

- Pasal 23  
BPRS wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPKA) atas aset produktif sesuai kualitasnya
- Pasal 24 ayat (3)  
PPKA khusus ditetapkan paling sedikit:
  - Kol 2: 3%
  - Kol 3: 10%
  - Kol 4: 50%
  - Kol 5: 100%Dari aset produktif setelah dikurangi nilai agunan yang memenuhi syarat dengan demikian:
  - Seluruh pembiayaan wajib dibentuk PPAP
  - Pembentukan harus berbasis outstanding pembiayaan dan kualitasnya
  - Agunan hanya dapat diperhitungkan jika memenuhi ketentuan

### Sebab

Berdasarkan analisis kami, kondisi tersebut disebabkan oleh:

1. Penggunaan dasar perhitungan yang tidak tepat, seperti hanya mempertimbangkan pembayaran/tunggakan
2. Evaluasi atas kualitas dan kelayakan agunan belum memadai, sehingga pengurang PPAP tidak didukung justifikasi yang cukup
3. Keterbatasan pengawasan internal dalam menghitung PPAP secara otomatis dan akurat

### Dampak

Kondisi tersebut dapat mengakibatkan:

1. Understatement beban pencadangan (PPAP)
2. Overstatement laba tahun berjalan
3. Ketidapatuhan terhadap POJK No. 24 Tahun 2024
4. Potensi risiko:
  - Temuan dari regulator
  - Penurunan tingkat kesehatan BPRS
  - Risiko kerugian yang tidak terantisipasi

An Independent Member of



Independent Affiliated of

**UC&CS AMÉRICA**  
www.uccs-america.org

Accounting Legal and Business Advisors  
A Strategic Alliance  
New York Mexico



## 1. Kekurangan Pembentukan PPAP/PPKA Pembiayaan – lanjutan

### Rekomendasi

Kami merekomendasikan agar manajemen:

1. Melakukan penyesuaian pembentukan PPAP sesuai hasil perhitungan auditor
2. Melakukan evaluasi atas agunan, termasuk:
  - Legalitas
  - Nilai terkini (appraisal)
  - Likuiditas
3. Meningkatkan pengendalian internal dan sistem perhitungan PPAP agar:
  - otomatis
  - akurat
  - konsisten
4. Melakukan review berkala atas kualitas pembiayaan, khususnya:
  - pembiayaan irreguler
  - pembiayaan dengan kolektibilitas tinggi (kol 3–5)

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan rekalkulasi yang telah dilakukan, kami menyimpulkan bahwa pembentukan PPAP/PPKA atas pembiayaan murabahah dan IMBT per 31 Desember 2025 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 24 Tahun 2024. Terdapat kekurangan pembentukan pencadangan sebesar **Rp73.006.225**, yang mengindikasikan bahwa proses penentuan kualitas pembiayaan, penilaian agunan, serta perhitungan cadangan belum dilakukan secara memadai dan konsisten.

Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko pembiayaan, khususnya dalam aspek pengukuran potensi kerugian. Selain berdampak pada ketidakpatuhan terhadap regulasi, hal ini juga berpotensi menyebabkan penyajian laporan keuangan yang tidak wajar, terutama terkait beban pencadangan dan laba tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan komitmen manajemen untuk segera melakukan penyesuaian pembentukan PPAP serta memperkuat sistem dan pengendalian internal terkait penilaian kualitas aset produktif. Langkah ini penting guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan regulator, meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta menjaga tingkat kesehatan dan keberlanjutan usaha BPRS secara keseluruhan.

An Independent Member of



Independent Affiliated of

**UC&CS AMÉRICA**  
www.uccs-america.org

Accounting Legal and Business Advisors  
A Strategic Alliance  
New York Mexico

## 2. Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Entitas Privat (SAK Entits Privat)

### Kriteria

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), entitas diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang meliputi antara lain:

- Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Laporan Arus Kas dan
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selain itu, SAK EP mengatur bahwa:

- Entitas wajib menyajikan Penghasilan Komprehensif Lain (OCI), termasuk dampak pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pascakerja
- CaLK harus memuat pengungkapan yang memadai, sistematis, dan sesuai dengan seluruh akun material yang disajikan dalam laporan keuangan
- Penyajian dan klasifikasi akun harus konsisten dan sesuai dengan struktur yang dipersyaratkan dalam standar.

### Kondisi

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan BPRS tahun buku 2025, kami mengidentifikasi bahwa penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya mengacu pada SAK EP, dengan indikasi sebagai berikut:

1. Laporan Laba Rugi belum menyajikan komponen Penghasilan Komprehensif Lain (OCI), khususnya terkait keuntungan/kerugian aktuarial atas program imbalan pascakerja
2. Tidak terdapat pemisahan yang jelas antara laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sehingga laporan belum memenuhi format laporan laba rugi komprehensif
3. Laporan Perubahan Ekuitas belum mencerminkan pergerakan OCI, termasuk dampaknya terhadap saldo ekuitas
4. Laporan Arus Kas belum disusun sepenuhnya sesuai klasifikasi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan secara memadai

## 2. Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Entitas Privat (SAK Entits Privat) - lanjutan

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) belum memadai, antara lain:
  - Pengungkapan kebijakan akuntansi belum lengkap
  - Tidak terdapat pengungkapan rinci atas imbalan pascakerja dan asumsi aktuarial
  - Beberapa akun material belum didukung dengan pengungkapan yang cukup
  - Struktur CaLK belum sistematis dan belum mengacu pada urutan penyajian laporan keuangan.
6. Terdapat biaya renovasi atas kantor yang disewa yang belum dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam bentuk aset renovasi bangunan sewa (leasehold improvement), melainkan masih dibebankan sebagai biaya periode berjalan.
7. Transaksi sewa kantor belum dicatat sesuai dengan ketentuan pengakuan aset hak guna (right-of-use asset) dan liabilitas sewa, namun masih disajikan sebagai biaya dibayar dimuka.
8. Penyesuaian atas kedua transaksi tersebut telah dilakukan oleh auditor dalam proses audit, namun pencatatan awal oleh manajemen belum mencerminkan penerapan standar yang berlaku secara tepat

### Sebab

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- Proses transisi/penerapan SAK EP yang belum sepenuhnya diimplementasikan secara menyeluruh
- Keterbatasan pemahaman teknis atas ketentuan penyajian dan pengungkapan dalam SAK EP, khususnya terkait OCI dan imbalan pascakerja
- Belum adanya template baku laporan keuangan yang sepenuhnya mengacu pada SAK EP
- Proses review internal atas laporan keuangan belum berjalan secara optimal.
- Belum memadainya pemahaman terkait perlakuan akuntansi atas transaksi sewa dan renovasi aset sewa sesuai SAK EP
- Belum diterapkannya kebijakan akuntansi yang jelas terkait kapitalisasi aset renovasi dan pengakuan aset hak guna serta liabilitas sewa



## 2. Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Entitas Privat (SAK Entits Privat) - lanjutan

### Akibat

Kondisi ini mengakibatkan:

- Laporan keuangan belum sepenuhnya memenuhi prinsip penyajian wajar sesuai standar yang berlaku
- Potensi salah saji penyajian (presentation misstatement), khususnya pada komponen ekuitas dan laba komprehensif
- Informasi keuangan yang disajikan menjadi kurang lengkap dan kurang andal sebagai dasar pengambilan keputusan
- Meningkatnya risiko temuan audit berulang serta potensi modifikasi opini apabila tidak dilakukan penyesuaian
- Ketidapatuhan terhadap ketentuan regulator terkait penyajian laporan keuangan BPRS.
- Potensi salah saji klasifikasi dan pengukuran aset, liabilitas, dan beban dalam laporan keuangan
- Aset dan liabilitas menjadi understated, khususnya terkait aset hak guna dan liabilitas sewa

### Rekomendasi

Kami merekomendasikan agar manajemen BPRS:

1. Melakukan penyesuaian format laporan keuangan agar sepenuhnya mengacu pada SAK EP, termasuk:
  - Menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain secara terpisah atau dalam satu laporan komprehensi
  - Mengakui dan menyajikan OCI, khususnya terkait imbalan pascakerja
2. Mengakui dan mengungkapkan komponen imbalan pascakerja secara memadai, termasuk:
  - Keuntungan/kerugian aktuarial dalam OCI
  - Pengungkapan asumsi aktuarial dalam CaLK
3. Menyusun ulang Laporan Perubahan Ekuitas dengan memasukkan seluruh komponen, termasuk laba rugi dan OCI

An Independent Member of



Independent Affiliated of



## 2. Ketidakesuaian Penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Entitas Privat (SAK Entits Privat) - lanjutan

4. Menyempurnakan Laporan Arus Kas sesuai dengan klasifikasi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berdasarkan metode yang dipilih (langsung/tidak langsung)
5. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara lengkap dan sistematis, yang mencakup:
  - Kebijakan akuntansi signifikan
  - Rincian masing-masing akun material
  - Pengungkapan risiko dan estimasi signifikan
  - Pengungkapan imbalan pascakerja sesuai standar
6. Menyusun template baku laporan keuangan berbasis SAK EP yang digunakan secara konsisten pada periode pelaporan berikutnya
7. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan terkait SAK EP, khususnya aspek penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.
8. Menerapkan kebijakan akuntansi yang tepat atas transaksi sewa sesuai SAK EP, dengan:
  - Mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada saat awal kontrak sewa
  - Melakukan pengukuran dan amortisasi aset hak guna secara sistematis selama masa sewa
9. Melakukan kapitalisasi atas biaya renovasi gedung yang disewa sebagai aset renovasi sewa, dan diamortisasi selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa manfaat ekonomis dan masa sewa

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penyajian laporan keuangan PT BPRS tahun buku 2025, dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) oleh manajemen belum dilakukan secara memadai dan menyeluruh, khususnya dalam aspek penyajian, pengungkapan, serta pengakuan transaksi tertentu.



## 2. Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Entitas Privat (SAK Entits Privat) – lanjutan

### Kesimpulan

Ketidaksesuaian tersebut tercermin antara lain pada belum disajikannya Penghasilan Komprehensif Lain (OCI), belum lengkapnya Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta belum tepatnya perlakuan akuntansi atas imbalan pascakerja, transaksi sewa, dan renovasi aset sewa. Meskipun sebagian penyesuaian telah dilakukan dalam proses audit, kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan laporan keuangan oleh manajemen masih belum sepenuhnya mengacu pada standar yang berlaku.

Dampak dari kondisi tersebut adalah meningkatnya risiko salah saji penyajian laporan keuangan, baik dari sisi klasifikasi, pengukuran, maupun pengungkapan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keandalan informasi keuangan serta berpotensi menimbulkan temuan audit berulang dan risiko modifikasi opini di masa mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan komitmen manajemen untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan, antara lain melalui penyusunan kebijakan akuntansi yang memadai, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan proses review internal. Dengan demikian, laporan keuangan yang disusun pada periode berikutnya diharapkan telah sepenuhnya sesuai dengan SAK EP dan mampu mencerminkan kondisi keuangan entitas secara wajar dan andal.

An Independent Member of



Independent Affiliated of





### 3. Perbedaan Saldo Awal 1 Januari 2025 pada Sistem IBA dengan Saldo Audited Tahun 2024

#### Kondisi

No	Akun	Islamic Banking Application 1 Januari 2025	Audited 2024	Selisih
1	Penempatan pada bank lain	100.353.742.609	100.353.742.610	(0,67)
2	Piutang Murabahah	164.483.156.749	164.483.156.751	(1,85)
3	Piutang Multijasa	388.459.565	388.459.566	(0,61)
4	Piutang Sewa	1.521.118.535	1.521.118.536	(0,58)
5	SOP & Sistem Aplikasi	1.586.442.654	1.586.442.658	(4,00)
6	Amortisasi SOP & Aplikasi	(1.586.442.628)	(1.586.442.628)	-
7	Tabungan Mudharabah	160.460.432.708	160.460.432.710	(2,16)
8	Cadangan Pendidikan & Pelatihan	135.163.885	135.163.887	(2,00)

Berdasarkan prosedur audit atas saldo awal tahun buku 2025, kami mengidentifikasi adanya perbedaan antara saldo awal per 1 Januari 2025 yang tercatat dalam sistem Islamic Banking Application (IBA) dengan saldo audited per 31 Desember 2024 pada beberapa akun, dengan rincian sebagai berikut:

- Penempatan pada bank lain: selisih Rp0,67
- Piutang murabahah: selisih Rp1,85
- Piutang multijasa: selisih Rp0,61
- Piutang sewa: selisih Rp0,58
- SOP dan Sistem Aplikasi: selisih Rp4,00
- Tabungan mudharabah: selisih Rp2,16
- Cadangan pendidikan dan pelatihan: selisih Rp2,00

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa saldo awal yang digunakan dalam pencatatan tahun berjalan tidak sepenuhnya mengacu pada laporan keuangan audited periode sebelumnya.

An Independent Member of



Independent Affiliated of



UC&S AMÉRICA

www.uccs-america.org

Accounting Legal and Business Advisors

A Strategic Alliance

New York Mexico



### 3. Perbedaan Saldo Awal 1 Januari 2025 pada Sistem IBA dengan Saldo Audited Tahun 2024 - lanjutan

Meskipun selisih yang ditemukan relatif tidak material secara kuantitatif, kami menilai bahwa permasalahan ini bersifat kualitatif signifikan, karena berkaitan dengan:

- disiplin pelaporan keuangan, dan
- efektivitas pengendalian internal atas proses pelaporan.

Oleh karena itu, kami mendorong manajemen untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh guna mencegah terulangnya kondisi serupa di periode mendatang.

#### Kriteria

Sesuai dengan SAK Entitas Privat, khususnya prinsip penyajian laporan keuangan:

- Saldo awal periode berjalan harus konsisten dan berasal dari saldo akhir laporan keuangan periode sebelumnya yang telah diaudit.
- Entitas wajib menjaga keterbandingan (*comparability*) dan keandalan (*reliability*) informasi keuangan.
- Setiap penyesuaian saldo awal harus didukung dengan dokumentasi memadai serta diungkapkan secara jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

#### Sebab

Berdasarkan diskusi dengan manajemen, perbedaan tersebut diduga disebabkan oleh:

- Proses closing tahun sebelumnya dan pembukaan tahun buku baru yang tidak dilakukan melalui prosedur rekonsiliasi yang ketat.
- Keterbatasan pengendalian dalam sistem aplikasi yang memungkinkan perubahan saldo tanpa jejak audit (*audit trail*) yang memadai.
- Tidak adanya proses review independen atas saldo awal sebelum digunakan dalam pencatatan periode berjalan.

An Independent Member of



Independent Affiliated of



### 3. Perbedaan Saldo Awal 1 Januari 2025 pada Sistem IBA dengan Saldo Audited Tahun 2024 - lanjutan

#### Dampak

Perbedaan saldo awal, meskipun secara nominal relatif kecil, dapat berdampak sebagai berikut:

- Menurunkan keandalan dan integritas laporan keuangan periode berjalan.
- Berpotensi menyebabkan salah saji kumulatif pada akun terkait, khususnya akun pembiayaan dan dana pihak ketiga.
- Mengganggu keterbandingan laporan keuangan antar periode.
- Dalam konteks pengawasan dan audit, kondisi ini dapat mengindikasikan kelemahan pengendalian internal, khususnya dalam proses closing dan opening balance.
- Berpotensi menjadi temuan berulang apabila tidak dilakukan perbaikan sistematis.

#### Rekomendasi

Kami merekomendasikan agar manajemen:

1. Melakukan Rekonsiliasi Saldo Awal
  - Menelusuri seluruh selisih saldo awal dan menyesuaikannya agar sesuai dengan laporan keuangan audited tahun sebelumnya.
  - Mendokumentasikan seluruh penyesuaian secara formal.
2. Memperkuat Prosedur Closing dan Opening Balance
  - Menetapkan prosedur baku bahwa saldo awal harus di-generate langsung dari saldo audited tanpa perubahan manual.
  - Mengunci (lock) data periode sebelumnya dalam sistem.
3. Meningkatkan Pengendalian Sistem
  - Memastikan sistem aplikasi memiliki audit trail yang memadai atas setiap perubahan saldo.
  - Membatasi akses perubahan data hanya kepada personel yang berwenang.

### 3. Perbedaan Saldo Awal 1 Januari 2025 pada Sistem IBA dengan Saldo Audited Tahun 2024 - lanjutan

#### Rekomendasi

Kami merekomendasikan agar manajemen:

4. Melakukan Review Independen
  - Melakukan pengecekan dan persetujuan saldo awal oleh fungsi yang independen (misalnya SPI atau pejabat yang ditunjuk).
5. Pengungkapan dalam Laporan Keuangan
  - Apabila terdapat penyesuaian material atau sistematis, agar diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan SAK Entitas Privat.

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil prosedur audit atas saldo awal per 1 Januari 2025, kami menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara saldo awal dalam sistem Islamic Banking Application (IBA) dengan saldo audited per 31 Desember 2024 pada beberapa akun. Meskipun secara kuantitatif selisih tersebut relatif tidak material, namun secara kualitatif kondisi ini mencerminkan adanya kelemahan dalam proses rekonsiliasi, disiplin pelaporan keuangan, serta pengendalian internal, khususnya terkait prosedur closing dan penetapan saldo awal.

Perbedaan tersebut berpotensi mempengaruhi keandalan dan keterbandingan laporan keuangan, serta dapat menimbulkan risiko salah saji kumulatif apabila tidak segera ditindaklanjuti secara menyeluruh. Selain itu, kondisi ini juga dapat menjadi indikasi adanya kelemahan sistem dan kontrol yang berpotensi menjadi temuan berulang dalam pemeriksaan di periode mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan komitmen manajemen untuk melakukan perbaikan secara sistematis, baik dari sisi rekonsiliasi, penguatan sistem aplikasi, maupun peningkatan fungsi pengendalian internal, guna memastikan bahwa saldo awal yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan saldo audited periode sebelumnya serta memenuhi prinsip keandalan dan keterbandingan sebagaimana diatur dalam SAK Entitas Privat.



#### 4. Pengelolaan dan Penyelesaian Aset yang Diambil Alih (AYDA) Belum Optimal

##### Kriteria

Berdasarkan ketentuan POJK No. 24 Tahun 2024 dan SAK Entitas Privat (SAK EP):

1. Aset yang Diambil Alih (AYDA) harus segera diselesaikan (dijual) dalam jangka waktu yang wajar.
2. AYDA harus dikelola secara aktif untuk meminimalkan potensi kerugian.
3. Jika terdapat indikasi penurunan nilai atau keterlambatan penyelesaian, entitas wajib:
  - Mengakui penurunan nilai (impairment) dan
  - Membentuk cadangan yang memadai.
4. Entitas harus memiliki rencana tindak lanjut yang jelas dan terukur atas setiap AYDA.

##### Kondisi

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat AYDA yang belum terselesaikan dan telah dimiliki dalam jangka waktu yang relatif lama, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Tgl AYDA	Nilai Pokok AYDA (Rp)	Action Plan s.d Des 2025	Rencana Tindak Lanjut 2026
1	Ervin Sept	4/12/2017	95.833.000	Proses jual jaminan	Proses jual jaminan ke tetangga dan posting
2	Alikan bin Yunus	28-07-2011	75.000.000	Proses jual jaminan	Belum ada penawaran karena lokasi agunan di pinggir jurang
3	Kusni Anwar	26-08-2013	50.000.000	Proses jual jaminan	Proses penawaran jaminan untuk dijual
4	Sisloly	30-12-2016	239.583.000	Proses jual jaminan	Masih mencari pembeli
5	Hendri Sandi	27-04-2017	1.776.243.000	Proses jual jaminan	Proses pemasangan plang lelang
6	Budiarti	31-12-2015	41.666.000	Kabur, Lelang KPKNL	Pemasangan plang jual, cari pembeli, proses lelang KPKNL
7	Lesmana	30-12-2016	209.000.000	Cash collection	Pemasangan plang jual dan pencarian pembeli
8	Pramudia T	22-06-2017	68.750.000	Nasabah kabur	Pemasangan plang jual dan pencarian pembeli

An Independent Member of



Independent Affiliated of

**UC&S AMÉRICA**  
www.uccs-america.org

Accounting Legal and Business Advisors  
A Strategic Alliance  
New York Mexico

#### **4. Pengelolaan dan Penyelesaian Aset yang Diambil Alih (AYDA) Belum Optimal - lanjutan**

Dari tabel di atas, diketahui bahwa:

- Sebagian AYDA telah dimiliki sejak tahun 2011–2017 (lebih dari 7–14 tahun).
- Status seluruh AYDA masih “proses jual jaminan” tanpa progres signifikan.
- Rencana tindak lanjut masih bersifat umum dan belum menunjukkan strategi percepatan yang konkret.

Berdasarkan hasil review atas tanggapan manajemen terkait kondisi rinci yang telah dijelaskan pada tabel diatas atas pengelolaan Aset Yang Diambil Alih (AYDA), kami mengidentifikasi beberapa kondisi yang memerlukan perhatian lebih lanjut, antara lain:

##### **1. Umur AYDA yang relatif Panjang**

Terdapat sejumlah AYDA yang telah berumur lebih dari 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun dan belum terselesaikan. Kendala utama yang dihadapi antara lain lokasi aset yang kurang marketable, legalitas yang belum sempurna (girik/SP3AT), serta keterbatasan daya beli masyarakat.

##### **2. Strategi penjualan yang belum optimal**

Upaya pemasaran telah dilakukan melalui media sosial, pemasangan plang, dan penawaran langsung. Namun demikian, strategi tersebut belum didukung dengan pendekatan yang lebih agresif, seperti kerja sama dengan agen properti atau penyesuaian harga secara signifikan.

##### **3. Permasalahan legalitas dan kepemilikan**

Sebagian AYDA masih memiliki dokumen yang belum sempurna (girik/SP3AT) sehingga tidak dapat diproses melalui lelang pada KPKNL. Selain itu, terdapat aset yang secara legal masih atas nama debitur.

##### **4. Keterlambatan proses Lelang**

Beberapa AYDA yang telah diambil alih sejak tahun-tahun sebelumnya baru direncanakan untuk dilelang pada periode mendatang, yang mengindikasikan adanya keterlambatan dalam proses penyelesaian.

#### **4. Pengelolaan dan Penyelesaian Aset yang Diambil Alih (AYDA) Belum Optimal – lanjutan**

Berdasarkan hasil review atas tanggapan manajemen terkait kondisi rinci yang telah dijelaskan pada tabel diatas atas pengelolaan Aset Yang Diambil Alih (AYDA), kami mengidentifikasi beberapa kondisi yang memerlukan perhatian lebih lanjut, antara lain:

#### **5. Pengendalian internal yang belum memadai**

Monitoring atas AYDA telah dilakukan secara berkala, namun indikator kinerja (KPI) yang digunakan masih bersifat umum dan belum spesifik. Selain itu, proses revidi independen masih terbatas pada internal cabang.

#### **6. Kondisi fisik aset dan subsequent events**

Terdapat AYDA yang berhasil dijual setelah tanggal pelaporan, namun beberapa aset mengalami penurunan kondisi fisik akibat kurangnya pemeliharaan.

#### **Sebab**

Berdasarkan hasil pembahasan dengan manajemen, kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Kendala eksternal, seperti kondisi pasar properti dan daya beli masyarakat
2. Legalitas aset yang belum lengkap atau belum dapat ditingkatkan statusnya
3. Strategi pemasaran yang masih terbatas
4. Tidak adanya target waktu penyelesaian yang jelas dan terukur.
5. Lemahnya fungsi monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian AYDA.

#### **Dampak**

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak sebagai berikut:

1. Penurunan nilai wajar AYDA seiring berjalannya waktu
2. Tertahannya dana bank dalam bentuk aset non-produktif (*non-earning assets*)
3. Potensi kerugian akibat biaya pemeliharaan dan penurunan kualitas aset
4. Keterlambatan realisasi kas dari hasil penjualan AYDA
5. Risiko hukum atas aset dengan legalitas yang belum sempurna
6. Potensi salah saji dalam laporan keuangan apabila tidak dilakukan penilaian dan pengungkapan secara memadai

#### 4. Pengelolaan dan Penyelesaian Aset yang Diambil Alih (AYDA) Belum Optimal - lanjutan

##### Rekomendasi

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan agar manajemen:

##### 1. Mempercepat Penyelesaian AYDA

- Melakukan evaluasi terhadap AYDA yang telah berumur panjang, termasuk mempertimbangkan strategi *cut-loss* atau penyesuaian harga
- Memperluas metode pemasaran, termasuk kerja sama dengan agen properti

##### 2. Memperkuat Aspek Legalitas

- Melakukan upaya peningkatan status legalitas (misalnya konversi girik/SP3AT menjadi sertifikat)
- Memastikan seluruh aset memiliki dokumen yang memadai untuk proses penjualan atau lelang

##### 3. Mengoptimalkan Proses Lelang

- Menjadwalkan lelang secara lebih proaktif melalui KPKNL
- Menetapkan nilai limit berdasarkan hasil penilaian independen yang terkini

##### 4. Memperkuat Pengendalian Internal

- Menyusun SOP khusus pengelolaan AYDA
- Menetapkan KPI yang spesifik dan terukur (misalnya target penyelesaian AYDA per periode)
- Mempertimbangkan reviu independen secara berkala

##### 5. Meningkatkan Pengelolaan Fisik Aset

- Melakukan pemeliharaan minimal untuk menjaga kondisi aset
- Mengevaluasi biaya pemeliharaan dibandingkan dengan manfaat ekonomis yang diperoleh

#### 4. Pengelolaan dan Penyelesaian Aset yang Diambil Alih (AYDA) Belum Optimal - lanjutan

##### Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi atas pengelolaan Aset Yang Diambil Alih (AYDA), dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan penyelesaian AYDA pada bank masih belum optimal dan memerlukan perhatian serius dari manajemen.

Hal ini tercermin dari umur AYDA yang relatif panjang (bahkan lebih dari 7-14 tahun), keterbatasan strategi pemasaran, kendala legalitas, serta belum adanya target penyelesaian yang terukur. Selain itu, proses lelang yang belum berjalan secara tepat waktu serta pengendalian internal yang belum memadai semakin memperlambat proses realisasi AYDA menjadi kas.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa AYDA masih berfungsi sebagai aset non-produktif (non-earning assets) yang berpotensi menurunkan kualitas aset bank secara keseluruhan, serta meningkatkan risiko kerugian akibat penurunan nilai aset, biaya pemeliharaan, dan risiko hukum.

Meskipun manajemen telah melakukan berbagai upaya, seperti pemasaran dan monitoring berkala, namun langkah tersebut masih bersifat umum dan belum didukung oleh strategi yang lebih agresif, terstruktur, dan berbasis target.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan komitmen dan langkah percepatan yang lebih konkret dan terukur, khususnya dalam:

- Penyelesaian AYDA berumur panjang
- Penguatan aspek legalitas
- Optimalisasi strategi penjualan dan lelang
- Peningkatan kualitas pengendalian internal

Dengan perbaikan tersebut, diharapkan AYDA dapat segera direalisasikan menjadi kas, sehingga dapat meningkatkan likuiditas, profitabilitas, serta kualitas aset bank secara keseluruhan.

## 5. Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun Berjalan Tidak Dilakukan Secara Sementara

### Kriteria

Berdasarkan prinsip dalam SAK Entitas Privat, entitas diwajibkan untuk menyajikan kewajiban perpajakan secara andal dan tepat waktu, termasuk pengakuan beban pajak kini berdasarkan estimasi terbaik pada periode berjalan. Selain itu, ketentuan perpajakan di Indonesia memperkenankan penyampaian SPT Tahunan berdasarkan perhitungan sementara (unaudited), yang selanjutnya dapat dilakukan pembetulan setelah laporan keuangan audit diterbitkan.

### Kondisi

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, diketahui bahwa Manajemen belum melakukan perhitungan sementara atas pajak penghasilan badan untuk tahun buku 2025. Perhitungan pajak sepenuhnya menunggu selesainya proses audit laporan keuangan, sehingga tidak terdapat estimasi kewajiban pajak kini yang disusun pada saat periode pelaporan.

### Sebab

Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan internal Manajemen yang mengandalkan hasil final audit sebagai dasar utama dalam penyusunan perhitungan pajak, serta belum adanya prosedur baku terkait penyusunan estimasi pajak secara periodik.

### Dampak

Kondisi ini dapat menimbulkan beberapa risiko sebagai berikut:

- Potensi keterlambatan dalam penyampaian SPT Tahunan.
- Risiko dikenakannya sanksi administrasi perpajakan (denda dan/atau bunga).
- Penyajian laporan keuangan interim yang tidak mencerminkan kewajiban pajak secara wajar.
- Keterbatasan Manajemen dalam melakukan perencanaan kas (cash flow) terkait kewajiban perpajakan.

## 5. Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun Berjalan Tidak Dilakukan Secara Sementara - lanjutan

### Rekomendasi

Kami merekomendasikan agar Manajemen:

1. Menyusun perhitungan sementara (provisional tax computation) atas pajak penghasilan badan berdasarkan data keuangan yang tersedia pada akhir periode pelaporan.
2. Menggunakan estimasi tersebut sebagai dasar pengakuan beban pajak kini dalam laporan keuangan, sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.
3. Tetap menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu berdasarkan perhitungan sementara tersebut.
4. Melakukan pembetulan SPT Tahunan setelah laporan keuangan audit selesai, apabila terdapat perbedaan material.
5. Menyusun dan menetapkan SOP terkait proses perhitungan dan pelaporan pajak secara periodik untuk memastikan kepatuhan dan ketepatan waktu pelaporan.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak dilakukannya perhitungan sementara pajak penghasilan badan pada akhir periode pelaporan menunjukkan bahwa proses pengakuan kewajiban perpajakan belum berjalan secara memadai dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan, baik dari sisi ketepatan waktu pelaporan maupun potensi sanksi administrasi, serta dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, khususnya terkait pengakuan beban dan liabilitas pajak. Selain itu, ketiadaan estimasi pajak juga membatasi kemampuan Manajemen dalam melakukan perencanaan keuangan yang optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan perbaikan dalam proses perhitungan dan pelaporan pajak melalui penyusunan estimasi pajak secara periodik serta penguatan kebijakan dan prosedur internal, agar kewajiban perpajakan dapat diakui secara tepat waktu, andal, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 6. Kekosongan Jabatan Komisaris Utama (Temuan Berulang OJK)

### Kriteria

Berdasarkan ketentuan POJK tentang Tata Kelola BPRS, BPRS wajib memiliki susunan Dewan Komisaris yang lengkap, termasuk Komisaris Utama, untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan efektif. Selain itu, setiap pengangkatan Komisaris harus melalui persetujuan regulator melalui mekanisme Fit and Proper Test oleh Otoritas Jasa Keuangan serta ditetapkan dalam RUPS.

### Kondisi

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa posisi Komisaris Utama pada BPRS masih dalam kondisi kosong. Temuan ini merupakan temuan berulang yang juga telah disampaikan oleh regulator pada tahun 2023, 2024, dan 2025.

Sebagai informasi, hingga bulan April 2026, Manajemen telah melakukan upaya perbaikan berupa:

- Calon Komisaris Utama telah lulus uji kompetensi (sertifikasi Komisaris) dan
- Proses pengajuan Fit and Proper Test kepada OJK sedang berlangsung.

Namun demikian, sampai dengan tanggal pemeriksaan, posisi Komisaris Utama belum efektif terisi karena masih menunggu persetujuan regulator.

### Sebab

Kondisi ini disebabkan oleh:

- Belum terselesaikannya proses Fit and Proper Test oleh regulator
- Keterbatasan kandidat yang memenuhi persyaratan kompetensi dan ketentuan regulator dan/atau
- Belum optimalnya perencanaan suksesi (succession planning) oleh Manajemen dan Pemegang Saham.

## 6. Kekosongan Jabatan Komisaris Utama (Temuan Berulang OJK) - lanjutan

### Dampak

Kekosongan jabatan Komisaris Utama secara berkelanjutan dapat menimbulkan risiko sebagai berikut:

- Tidak optimalnya fungsi pengawasan terhadap Direksi dan operasional BPRS
- Potensi ketidakpatuhan terhadap ketentuan regulator (POJK)
- Meningkatnya risiko tata kelola (governance risk), termasuk lemahnya implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG)
- Potensi sanksi administratif dari regulator
- Penilaian negatif dalam aspek kesehatan bank, khususnya faktor manajemen dan GCG.

### Rekomendasi

Kami merekomendasikan agar Manajemen dan Pemegang Saham:

1. Mempercepat proses penyelesaian Fit and Proper Test dengan memastikan seluruh dokumen dan persyaratan telah lengkap dan sesuai ketentuan regulator.
2. Melakukan koordinasi aktif dengan OJK untuk memonitor perkembangan proses persetujuan.
3. Menyusun rencana suksesi (succession plan) yang memadai untuk posisi Dewan Komisaris guna menghindari kekosongan jabatan di masa mendatang.
4. Menunjuk pejabat sementara atau mekanisme pengawasan alternatif (jika diperkenankan oleh ketentuan) untuk memastikan fungsi pengawasan tetap berjalan efektif selama masa transisi.
5. Mengungkapkan kondisi kekosongan jabatan Komisaris Utama beserta progres pengisiannya secara memadai dalam laporan kepada regulator dan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

## 6. Kekosongan Jabatan Komisaris Utama (Temuan Berulang OJK) - lanjutan

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kekosongan jabatan Komisaris Utama yang masih berlangsung hingga periode pemeriksaan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan pada tingkat Dewan Komisaris belum berjalan secara optimal. Kondisi ini juga merupakan temuan berulang dari regulator dalam beberapa tahun terakhir, yang mengindikasikan perlunya perhatian lebih serius dari Manajemen dan Pemegang Saham dalam memastikan pemenuhan struktur tata kelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Meskipun Manajemen telah melakukan upaya perbaikan melalui pemenuhan persyaratan kompetensi dan pengajuan Fit and Proper Test kepada regulator, namun selama persetujuan belum diperoleh, risiko terkait aspek tata kelola dan kepatuhan masih tetap ada.

Sehubungan dengan hal tersebut, percepatan penyelesaian proses persetujuan regulator serta penguatan perencanaan suksesi menjadi langkah penting guna memastikan keberlangsungan fungsi pengawasan yang efektif, meningkatkan penerapan Good Corporate Governance (GCG), serta meminimalkan risiko kepatuhan dan potensi sanksi dari regulator.

An Independent Member of



Independent Affiliated of





## 7. Analisis Tingkat Kesehatan Bank (Aspek Risk Profile, Earnings, Dan Capital)

**PT BPRS Bangka Belitung**

**Tahun Buku 2025**

**Ringkasan Rasio Keuangan Audited**

No.	Indikator	Rasio	Standar OJK	Keterangan
1	NPF Bruto	12,90%	≤ 5%	Tidak Sehat
2	NPF Netto	12,21%	≤ 5%	Tidak Sehat
3	KPMM (CAR)	13,13%	≥ 12%	Sehat
4	Modal Inti	10,57%	≥ 8%	Sehat
5	ROA	1,20%	Positif	Sehat
6	ROE	5,91%	-	Baik
7	BOPO	91,09%	≤ 85%	Kurang Efisien
8	Cash Rasio	13,67%	≥ 4%	Memadai
9	FDR	59,08%	80–90%	Kurang Optimal

### I. Kualitas Aset Produktif

#### Kondisi

Berdasarkan hasil analisis, rasio Non-Performing Financing (NPF) Bruto sebesar **12,90%** dan NPF Netto sebesar **12,21%**, yang berada jauh di atas ambang batas yang ditetapkan regulator.

#### Kriteria

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan bahwa rasio NPF yang sehat untuk BPRS adalah maksimal **5%**.

An Independent Member of



Independent Affiliated of

**UC&S AMÉRICA**

www.uccs-america.org

Accounting Legal and Business Advisors

A Strategic Alliance

New York Mexico

## 7. Analisis Tingkat Kesehatan Bank (Aspek Risk Profile, Earnings, Dan Capital)

### I. Kualitas Aset Produktif

#### Sebab

Tingginya rasio NPF tersebut antara lain disebabkan oleh:

- Proses analisis kelayakan pembiayaan yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) secara memadai
- Fungsi monitoring dan pengawasan pembiayaan berjalan belum optimal, khususnya dalam mendeteksi potensi penurunan kualitas pembiayaan sejak dini
- Proses penanganan pembiayaan bermasalah (remedial dan recovery) belum efektif, termasuk dalam pelaksanaan restrukturisasi
- Konsentrasi pembiayaan pada sektor atau debitor tertentu yang memiliki tingkat risiko relatif tinggi

#### Akibat

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- Penurunan kualitas aset produktif secara signifikan
- Meningkatnya kebutuhan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)
- Potensi kerugian yang dapat mempengaruhi profitabilitas dan keberlangsungan usaha bank
- Meningkatnya risiko ketidakpatuhan terhadap ketentuan regulator

#### Rekomendasi

Manajemen disarankan untuk:

- Memperketat proses analisis pembiayaan dengan memperkuat penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition)
- Meningkatkan fungsi monitoring pembiayaan secara berkala berbasis risiko
- Melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah secara selektif dan tepat waktu
- Menyusun dan mengimplementasikan action plan penurunan NPF dengan target yang terukur dan realistis sesuai ketentuan OJK



## 7. Analisis Tingkat Kesehatan Bank (Aspek Risk Profile, Earnings, Dan Capital)

### II. Permodalan (Capital Adequacy)

#### Kondisi

Rasio KPMM (CAR) tercatat sebesar **13,13%** dan Modal Inti sebesar **10,57%**, yang menunjukkan tingkat permodalan sangat kuat.

#### Kriteria

- Rasio KPMM (CAR) menunjukkan permodalan yang sehat
- Modal Inti positif menunjukkan kinerja yang sehat

#### Sebab

- Tingginya akumulasi laba ditahan
- Kebijakan konservatif dalam ekspansi pembiayaan
- Pembentukan cadangan modal yang memadai

#### Akibat

- Bank memiliki kapasitas yang sangat memadai dalam menyerap potensi risiko
- Tersedia ruang yang cukup untuk melakukan ekspansi usaha
- Berpotensi menekan efisiensi penggunaan modal

#### Rekomendasi

- Mengoptimalkan pemanfaatan modal melalui ekspansi pembiayaan yang tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian
- Menjaga kualitas aset agar permodalan tidak tergerus oleh peningkatan pembiayaan bermasalah
- Menyusun strategi permodalan jangka panjang yang selaras dengan rencana bisnis bank

An Independent Member of



Independent Affiliated of





## 7. Analisis Tingkat Kesehatan Bank (Aspek Risk Profile, Earnings, Dan Capital)

### III. Rentabilitas (Earnings)

#### Kondisi

Rasio profitabilitas menunjukkan ROA sebesar **1,20%**, ROE sebesar **5,91%**, dan BOPO sebesar **91,09%**.

#### Kriteria

- ROA positif menunjukkan kinerja yang sehat
- BOPO ideal menurut praktik industri adalah  $\leq$  **85%**

#### Sebab

- Beban operasional yang relatif tinggi, terutama pada beban administrasi dan penyusutan
- Efisiensi operasional yang belum optimal

#### Akibat

- Margin laba berpotensi tertekan
- Efisiensi operasional belum maksimal meskipun profitabilitas masih tergolong baik

#### Rekomendasi

- Melakukan efisiensi terhadap beban operasional, khususnya biaya administrasi dan overhead
- Mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk meningkatkan produktivitas
- Meningkatkan pendapatan berbasis fee (fee-based income) untuk memperbaiki struktur pendapatan

An Independent Member of



Independent Affiliated of





## 7. Analisis Tingkat Kesehatan Bank (Aspek Risk Profile, Earnings, Dan Capital)

### IV. Likuiditas (Liquidity)

#### Kondisi

Cash Ratio tercatat sebesar **13,67%** (memadai), sedangkan Financing to Deposit Ratio (FDR) sebesar **59,08%**, berada di bawah kisaran ideal.

#### Kriteria

OJK menetapkan kisaran FDR yang sehat berada pada rentang **80% – 90%**.

#### Sebab

- Penyaluran pembiayaan yang belum optimal
- Tingginya dana pihak ketiga yang belum dimanfaatkan secara produktif

#### Akibat

- Terjadinya idle fund yang berpotensi menurunkan tingkat pendapatan bank
- Efisiensi penggunaan dana menjadi kurang optimal

#### Rekomendasi

- Meningkatkan penyaluran pembiayaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian
- Melakukan diversifikasi produk pembiayaan untuk memperluas basis nasabah
- Menyeimbangkan pengelolaan likuiditas dan profitabilitas agar dana dapat dimanfaatkan secara optimal

An Independent Member of



Independent Affiliated of



## 7. Analisis Tingkat Kesehatan Bank (Aspek Risk Profile, Earnings, Dan Capital)

### V. Kesimpulan

Secara keseluruhan, tingkat kesehatan PT BPRS Bangka Belitung menunjukkan bahwa:

- Permodalan (Capital) berada dalam kondisi sangat sehat dan kuat
- Rentabilitas (Earnings) tergolong baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan efisiensi
- Likuiditas (Liquidity) dalam kondisi cukup memadai, namun belum optimal dalam pemanfaatan dana
- Kualitas Aset Produktif (Asset Quality) menjadi area utama yang memerlukan perhatian serius, khususnya dalam pengendalian pembiayaan bermasalah

Sehubungan dengan hal tersebut, perbaikan pada aspek kualitas aset melalui penguatan manajemen risiko pembiayaan menjadi prioritas utama guna meningkatkan tingkat kesehatan bank secara keseluruhan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan regulator.

Demikian Management Letter ini kami sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan PT BPRS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Hal-hal yang kami uraikan dalam surat ini terutama ditujukan untuk membantu manajemen dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta penyempurnaan proses administrasi dan pelaporan keuangan.

Temuan dan rekomendasi yang disampaikan tidak dimaksudkan untuk mencakup seluruh aspek pengendalian internal maupun seluruh kondisi yang mungkin memerlukan perhatian manajemen, mengingat pemeriksaan kami dilaksanakan berdasarkan standar audit yang berlaku dengan tujuan utama memberikan opini atas laporan keuangan.

Kami menyampaikan apresiasi atas kerja sama, bantuan, dan keterbukaan yang telah diberikan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, serta seluruh jajaran manajemen dan karyawan PT BPRS selama proses pemeriksaan berlangsung.

An Independent Member of



Independent Affiliated of





Besar harapan kami agar rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dalam melakukan perbaikan dan penguatan tata kelola perusahaan ke depan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**Kantor Akuntan Publik**  
**Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan**

**Slamet Riyanto CA., CPA**

Nomor Izin Akuntan Publik : AP 1080

Jakarta, 30 April 2026

An Independent Member of



Independent Affiliated of



**UC&S AMÉRICA**  
[www.uccs-america.org](http://www.uccs-america.org)

Accounting Legal and Business Advisors  
A Strategic Alliance  
New York Mexico

# LAMPIRAN

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG**  
**KUALITAS ASET PRODUKTIF**  
**31 DESEMBER 2025**

Keterangan	31 Desember 2025			31 Desember 2024
	Pembiayaan Yang Diberikan	Penempatan pada Bank Lain	Jumlah 2025	Jumlah 2024
<b>1. ASET PRODUKTIF</b>				
Lancar	140.101.583.000	119.962.261.000	260.063.844.000	248.175.189.784
Dalam Perhatian Khusus	26.897.283.000	-	26.897.283.000	24.167.068.954
Kurang Lancar	3.377.792.000	-	3.377.792.000	1.818.177.654
Diragukan	3.163.582.000	-	3.163.582.000	2.539.136.512
Macet	18.194.330.000	-	18.194.330.000	30.989.115.802
<b>JUMLAH</b>	<b>191.734.570.000</b>	<b>119.962.261.000</b>	<b>311.696.831.000</b>	<b>307.688.688.706</b>
<b>2. ASET PRODUKTIF YANG DIKLASIFIKASI</b>				
Dalam Perhatian Khusus (25%)	25%	6.724.320.750	-	6.724.320.750
Kurang Lancar (50%)	50%	1.688.896.000	-	1.688.896.000
Diragukan (75%)	75%	2.372.686.500	-	2.372.686.500
Macet (100%)	100%	18.194.330.000	-	18.194.330.000
<b>JUMLAH</b>		<b>28.980.233.250</b>	<b>-</b>	<b>28.980.233.250</b>
<b>3. PPAPWD</b>				
Lancar (0,5%)	0,5%	425.274.317	-	425.274.317
Dalam Perhatian Khusus (3%)	30%	104.856.465	-	104.856.465
Kurang Lancar (10%)	10%	23.635.372	-	23.635.372
Diragukan (50%)	50%	133.111.862	-	133.111.862
Macet (100%)	100%	1.177.046.319	-	1.177.046.319
<b>JUMLAH</b>		<b>1.863.924.335</b>	<b>-</b>	<b>1.863.924.335</b>
RASIO-RASIO :	Aset Produktif Yang Diklasifikasi		9,30%	10,99%
	Aset Produktif			
	PPKA Yang Dibentuk Bank		100%	100,00%
	PPKA Yang Wajib Dibentuk Bank			
	NPF Bruto			24.735.704.000
Rasio NPF Bruto			12,90%	16,82%
NPF Netto			23.401.910.447	24.691.630.941
Rasio NPF Netto			12,21%	11,75%

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG**  
**ASET TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR)**  
31 DESEMBER 2025

Keterangan		Nominal	Bobot Risiko %	ATMR
1.	Kas	3.186.708.500	0%	-
2.	Sertifikat Bank Indonesia	-	0%	-
3.	Kredit berupa agunan SBI, tabungan, dan deposito yang diblokir pada BPR	83.924.639	0%	-
4.	AYDA yang telah melampaui 1 tahun sejak tanggal pengambilalihan	-	0%	-
5.	Kredit dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah	-	15%	-
6.	Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat	92.962.261.383	20%	18.592.452.277
7.	Kredit kepada atau dijamin oleh bank lain atau pemerintah daerah	-	-	-
	a. Kredit kepada Bank lain	-	20%	-
	b. Kredit kepada Pemerintah Daerah	-	20%	-
	c. Bagian Kredit yang dijamin oleh Bank Lain	-	20%	-
	d. Bagian Kredit yang dijamin oleh Pemerintah Daerah	-	20%	-
8.	Bagian kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin pembiayaan termasuk lembaga penjaminan syariah yang merupakan anak perusahaan dari lembaga penjaminan berstatus BUMN	-	20%	-
9.	Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/ruko/rukan yang diikat dengan hak tanggungan pertama	27.786.057.617	30%	8.335.817.285
10.	Kredit kepada BUMN/BUMD atau yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan pembiayaan termasuk lembaga penjaminan syariah yang merupakan anak perusahaan dari lembaga penjaminan berstatus BUMN/BUMD namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20%	-	50%	-
11.	Kredit kepada pegawai / pensiunan	49.306.404.418	50%	24.653.202.209
12.	Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/ruko/rukan yang memiliki sertifikat yang dikuasai oleh BPRS dan didukung dengan surat kuasa menjual namun tidak diikat dengan hak tanggungan pertama	71.621.229.956	50%	35.810.614.978
13.	Kredit dengan usaha mikro dan kecil	1.901.702.487	70%	1.331.191.741
14.	Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal, atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan secara fidusia sesuai peraturan perundang-undangan	21.239.466.392	70%	14.867.626.474
15.	Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot resiko di atas	1.217.318.960	100%	1.217.318.960
16.	Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet	17.066.808.056	100%	17.066.808.056
	a. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo	-	100%	-
	b. Tagihan atau kredit dengan kualitas macet	-	100%	-
17.	Aset tetap (Nilai Buku)	18.590.420.116	100%	18.590.420.116
18.	AYDA yang belum melampaui 1 tahun sejak tanggal pengambilalihan	-	100%	-
19.	Aset lainnya selain tersebut di atas / RRA	4.247.935.243	100%	4.247.935.243
<b>JUMLAH ATMR</b>		<b>309.210.237.767</b>		<b>144.713.387.339</b>

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG**  
**PERMODALAN (CAR)**  
31 DESEMBER 2025

Keterangan	Jumlah Setiap Komponen	% yang diperhitungkan	Jumlah
<b>Modal</b>			
<b>I. MODAL INTI</b>			
<b>1. Modal Inti Utama</b>			
a. Modal disetor	50.287.140.000	100%	50.287.140.000
b. Cadangan tambahan modal			
1) Agio (Disagio)	-	100%	-
2) Dana setoran modal ekuitas	-	100%	-
3) Modal sumbangan	70.852.000	100%	70.852.000
4) Cadangan umum	4.697.000.664	100%	4.697.000.664
5) Cadangan tujuan	-	100%	-
6) Laba (Rugi) tahun-tahun lalu	41.238.781.378	100%	41.238.781.378
7) Laba (Rugi) tahun berjalan setelah dikurangi PPAP dan taksiran utang PPh atau Rugi tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP	2.971.492.374	Paling tinggi 50% apabila Laba atau 100% apabila rugi	1.485.746.187
a) Laba (Rugi) tahun berjalan	2.971.492.374		
b) Kekurangan pembentukan PPAP -/-	-		
c) taksiran hutang PPh -/-	-		
8) Pajak tangguhan -/-	-	100%	-
9) Goodwill -/-	-	100%	-
10) AYDA berupa tanah, bangunan, dan/atau rumah -/-			
a) Melampaui jangka waktu 1 tahun s.d 3 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	-	15%	-
b) Melampaui jangka waktu 3 tahun s.d 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai laporan posisi keuangan BPR -/-		50%	-
c) Melampaui jangka waktu 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai laporan posisi keuangan BPR -/-	-	100%	-
<b>Sub Total Cadangan Tambahan Modal</b>			34.985.182.527
<b>Jumlah Modal Inti Utama</b>			15.301.957.473
<b>1.2 Modal Inti Tambahan</b>	-	100%	-
<b>1.3 JUMLAH MODAL INTI (I.1 + I.2)</b>			15.301.957.473

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG**  
**PERMODALAN (CAR)**  
31 DESEMBER 2025

Keterangan	Jumlah Setiap Komponen	% yang diperhitungkan	Jumlah
<b>II. MODAL PELENGKAP</b>			
II.1 Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu (paling tinggi 50% dari modal inti)	-	Paling tinggi 50% dari modal inti	-
II.2 Keuntungan revaluasi tetap	2.810.667.065	100%	2.810.667.065
II.3 PPAP Umum	-	Paling tinggi 1,25% dari ATMR	890.085.624
<b>II.4 Jumlah Modal Pelengkap (II.1 + II.2 + II.3)</b>	-	Paling tinggi 100% dari modal inti	3.700.752.689
<b>Jumlah</b>			19.002.710.162
III. MODAL MINIMUM (12% x ATMR)			17.365.606.481
IV. KELEBIHAN (KEKURANGAN) MODAL			1.637.103.682
V. Jumlah Modal (I.3 + II.4)			19.002.710.162
ATMR			144.713.387.339
Rasio KPMM (Modal / ATMR)			13,13%
Rasio Modal Inti (Modal Inti / ATMR)			10,57%

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG**  
**RENTABILITAS**  
**PERHITUNGAN ROA**  
**31 DESEMBER 2025**

<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>ASET PADA TANGGAL :</b>	
31 January 2025	332.668.412.134
28 February 2025	333.108.915.468
31 March 2025	329.828.838.223
30 April 2025	330.158.729.207
31 May 2025	333.847.439.295
30 June 2025	341.170.923.143
31 July 2025	348.516.349.036
31 August 2025	343.068.818.935
30 September 2025	344.669.134.552
31 October 2025	348.087.757.138
30 November 2025	353.906.200.654
31 December 2025	347.405.187.409
<b>JUMLAH</b>	<b>4.086.436.705.195</b>
<b>JUMLAH ASET RATA-RATA</b>	<b>340.536.392.100</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK TAHUN 2025</b>	<b>4.079.799.019</b>
<b>A. RETURN ON ASSET (ROA)</b>	
<b>LABA BERSIH MUTASI SEBELUM PAJAK/ASET RATA -RATA</b>	<b>1,20%</b>

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG**  
**RENTABILITAS**  
**PERHITUNGAN BOPO**  
**31 DESEMBER 2025**

<b>KETERANGAN</b>	<b>2025</b>
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	
<b>Pendapatan Bunga</b>	
Pendapatan Bagi Hasil Bukan Bank	81.020.272.126
Pendapatan Bagi Hasil dari Bank Lain	-
Pendapatan Administrasi	22.500.000
<b>Jumlah Pendapatan Bunga</b>	<b>81.042.772.126</b>
<b>Pendapatan Lainnya</b>	
Pendapatan Operasional Lainnya	20.629.517.794
<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>	<b>101.672.289.920</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Beban Bagi Hasil	13.862.918.453
<b>Beban Lainnya</b>	
Beban Pemasaran	50.924.189
Beban Penyisihan / Penyusutan / Amortisasi	52.061.015.940
Beban Administrasi dan Umum	26.464.842.108
Beban Operasional Lainnya	171.268.895
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>92.610.969.585</b>
<b>Rasio Efisiensi (BOPO)</b>	<b>91,09%</b>

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG**  
**CASH RATIO (CR)**  
31 DESEMBER 2025

<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>ALAT LIQUID</b>	
1. Kas	3.186.708.500
2. Giro Pada Bank Lain	204.417.045
3. Tabungan (ABA-ABP)	40.999.482.491
<b>JUMLAH ALAT LIQUID</b>	<b>44.390.608.036</b>
<b>HUTANG LANCAR</b>	
1. Kewajiban Segera	258.157.448
2. Simpanan Pihak Ke 3	
Tabungan	161.204.301.510
Deposito Berjangka	163.331.695.000
<b>JUMLAH HUTANG LANCAR</b>	<b>324.794.153.958</b>
<b>CASH RATIO (CR)</b>	<b>13,67%</b>

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG**  
**LIKUIDITAS (FINANCING TO DEPOSIT RATIO)**  
**31 DESEMBER 2025**

KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
<b>AKUN-AKUN NERACA</b>	
1. Simpanan Pihak Ketiga	
a. Tabungan	161.204.301.510
b. Deposito Berjangka	163.331.695.000
2. Pinjaman bukan dari bank lain (> 3 bulan)	-
3. Deposito dan Pinjaman diterima dari Bank lain (ABP) (> 3 bulan)	-
4. Modal Pinjaman	-
5. Modal Inti	-
Jumlah Dana Yang Diterima	324.535.996.510
6. Aset Produktif	
a. Pembiayaan yang diberikan	191.734.570.000
b. Lainnya	-
Jumlah Aset Produktif	191.734.570.000
<b>FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)</b>	<b>59,08%</b>

**PT BPR SYARIAH BANGKA BELITUNG**  
**RETURN ON EQUITY (ROE)**  
31 DESEMBER 2025

KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
Laba mutasi setelah pajak	2.971.492.374
<b>Jumlah laba mutasi setelah pajak</b>	<b>2.971.492.374</b>
Modal Disetor	50.287.140.000
<b>Jumlah modal disetor</b>	<b>50.287.140.000</b>
<b>RETURN ON EQUITY (ROE)</b>	<b>5,91%</b>